

Bunga Rampai Penelitian Mandiri 2016

MODEL INOVASI PELAYANAN PUBLIK

DI KOTA BANDUNG DAN KABUPATEN CIAMIS



PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Model Inovasi Pelayanan Publik di Kota Bandung dan Kabupaten Ciamis

Editor :

Baban Sobandi



Diterbitkan Oleh :

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) I
Lembaga Administrasi Negara
Sumedang
2016

Model Inovasi Pelayanan Publik di Kota Bandung dan Kabupaten Ciamis

Penulis : Yunni Susanty, dkk
Penanggung jawab : Kepala PKP2A I LAN
Editor : Baban Sobandi
Desain sampul : Budi Permana

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Cetakan I, 2016

Hak Penerbitan pada :

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I
Lembaga Administrasi Negara (PKP2A 1 LAN)

Alamat : Jl. Kiara Payung KM. 4,7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat
45363
Telp/ Fax : +62 22 7780048 / +62 22 7790055
Email : info@bandung.lan.go.id, admin@litbang-lan-bdg.info

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Model Inovasi Pelayanan Publik di Kota Bandung dan Kabupaten
Ciamis

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga
Administrasi Negara 2016

ISBN : 978-602-6497-03-1

Silahkan mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan mencantumkan sumbernya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan anugerah-Nya sehingga pada tahun 2016, kami dapat menyelesaikan Bunga Rampai Penelitian Mandiri yang berjudul "Model Inovasi Pelayanan Publik di Kota Bandung dan Kabupaten Ciamis". Bunga Rampai Penelitian Mandiri ini kami susun dengan tujuan untuk memberikan masukan/rekomendasi kepada Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan publik di Daerah. Bunga Rampai Penelitian Mandiri tahun 2016 ini memuat empat tulisan, yang terdiri dari : (1) Model Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran Di Kota Bandung (2) Model Inovasi " Wisata Buku Sahabat Anak" Dalam Rangka Meningkatkan Minat Baca Masyarakat Kabupaten Ciamis (3) Model Inovasi Sistem Informasi Penilaian (SIP) Di Kota Bandung dan (4) Model Inovasi Hibah dan Bansos Online di Kota Bandung.

Penelitian mandiri terkait model inovasi di Pemerintah Daerah ini dilatarbelakangi karena semakin tingginya tuntutan masyarakat kepada Pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan publik yang prima. Untuk itu, sehubungan dengan amanah Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menginginkan agar setiap Pemerintah Daerah dapat berinovasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik, kami mengkaji beberapa model inovasi pelayanan publik di Kota Bandung dan Kabupaten Ciamis sebagai bagian dari Pemerintah Daerah yang telah berinovasi. Penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana implementasi model inovasi pelayanan publik yang selama ini berjalan. Berdasarkan hal tersebut, kami memberikan beberapa rekomendasi terkait strategi pengembangan model inovasi untuk mengantisipasi kendala yang dihadapi selama pelaksanaan inovasi pelayanan publik.

Akhir kata, kami menyadari bahwa laporan Bunga Rampai Penelitian Mandiri 2016 yang dihasilkan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan kritik untuk penyempurnaan penelitian mandiri ini. Akhir kata, kami berharap agar hasil penelitian mandiri ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya. Terima Kasih

Sumedang, Oktober 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman sampul	i
Halaman ISBN	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
MODEL INOVASI PELAYANAN AKTA KELAHIRAN DI KOTA BANDUNG	
<i>Oleh : Putri Wulandari dan Yunni Susanty</i>	
MODEL INOVASI " WISATA BUKU SAHABAT ANAK" DALAM RANGKA MENINGKATKAN MINAT BACA MASYARAKAT KABUPATEN CIAMIS	
<i>Oleh : Krismiyati dan Pratiwi</i>	
MODEL INOVASI SISTEM INFORMASI PENILAIAN (SIP) DI KOTA BANDUNG	
<i>Oleh : Susy Ella dan Indra Risni Utami</i>	
MODEL INOVASI HIBAH DAN BANSOS ONLINE DI KOTA BANDUNG	
<i>Oleh : Wawan Dharma Setiawan dan Candra Setya Nugroho</i>	

MODEL INOVASI PELAYANAN AKTA KELAHIRAN DI KOTA BANDUNG

Oleh :
Putri Wulandari & Yunni Susanty

A. PENDAHULUAN

Akta kelahiran merupakan dokumen resmi kependudukan hasil pencatatan identitas terhadap peristiwa kelahiran seseorang. Akta kelahiran mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang menyangkut identitas diri dan status kewarganegaraan. Hal ini ditegaskan pula dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak, yang menyebutkan bahwa akta kelahiran merupakan identitas diri yang harus diberikan sejak anak dilahirkan. Tanpa adanya akta kelahiran, seorang anak tidak dapat memperoleh hak-hak dasarnya sebagai warga negara, yaitu mendapatkan perlindungan.

Berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hak atas identitas anak, diantaranya adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Dalam Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sementara dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara. Dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Kemudian dalam Pasal 15 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, serta pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual.

Beberapa peraturan di atas menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara nya, dengan syarat bahwa setiap warga memiliki identitas diri, yaitu akta kelahiran. Namun, hingga saat ini, pentingnya kepemilikan akta kelahiran tersebut belum diimbangi dengan jumlah kepemilikan akta kelahiran penduduk di Indonesia. Harian Pos Kota (2016) menyebutkan bahwa hingga Mei 2016, tercatat baru sebanyak 61% anak Indonesia yang memiliki akta kelahiran. Sementara 39% sisanya atau sekitar 33.3 juta anak Indonesia belum memiliki akta kelahiran. Secara *dejure* 39% anak Indonesia tersebut tidak diakui keberadaannya oleh negara.

Kondisi demikian mengharuskan pemerintah melakukan upaya peningkatan jumlah kepemilikan akta kelahiran di Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengamanahkan agar setiap pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggungjawab untuk menyelenggarakan urusan

administrasi kependudukan, yang salah satunya adalah akta kelahiran. Untuk menjawab tantangan yang diberikan tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan berbagai inovasi pelayanan akta kelahiran.

Salah satu daerah yang telah berinovasi dalam hal pelayanan akta kelahiran adalah Kota Bandung. Dengan jumlah kepemilikan akta kelahiran yang baru mencapai 73,4% pada Mei 2016, Pemerintah Kota Bandung harus menentukan strategi agar cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran seperti yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal, yaitu 90% di tahun 2020 dapat tercapai. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) melakukan upaya peningkatan kepemilikan akta kelahiran melalui inovasi Akta Kelahiran *online*, Memberikan Pelayanan Keliling (Mepeling) dan *Delivery service* Akta Kelahiran.

Inovasi Akta Kelahiran *Online* adalah inovasi pemrosesan akta kelahiran cukup dengan mengakses website resmi disdukcapil.bandung.go.id atau aktaonline.bandung.go.id untuk mendaftar dan mendapatkan akta kelahiran secara *online*. Sementara inovasi Mepeling merupakan inovasi untuk memberikan pelayanan dengan sistem "jepput bola" kepada masyarakat dengan berkeliling ke tempat-tempat yang telah ditentukan seperti kecamatan-kecamatan, sekolah-sekolah ataupun tempat-tempat umum di wilayah kota Bandung. Sistem jepput bola ini juga bekerja sama dengan pihak rumah sakit, sehingga setiap ada kelahiran Disdukcapil akan langsung membuatkan akta kelahiran. Sedangkan inovasi *Delivery service* Akta Kelahiran adalah inovasi pelayanan akta kelahiran yang bekerja sama dengan PT.Pos Indonesia dan Bank Jabar Banten, sehingga warga yang telah mendaftar dapat pulang dan menunggu di rumah, karena akta kelahiran yang sudah selesai akan diantarkan ke rumah warga. Adapun tujuan dari ketiga inovasi pelayanan akta kelahiran ini pada dasarnya dilakukan untuk meningkatkan kepemilikan akta kelahiran di Kota Bandung dengan cara mendekatkan pelayanan sehingga lebih mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam implementasinya, pemanfaatan ketiga inovasi pelayanan akta kelahiran oleh masyarakat Kota Bandung ini dapat dikatakan belum optimal. Hal ini dapat terlihat salah satunya dari jumlah penerbitan akta kelahiran melalui ketiga inovasi pelayanan akta kelahiran pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran berdasarkan tiga inovasi pengelolaan akta kelahiran

No.	Inovasi	Periode	Jumlah Penerbitan
1.	Jepput Bola (Mepeling)	April – November 2015	2040
		Februari 2016	152
2.	Akta Kelahiran <i>Online</i>	Juli – Agustus 2016	Tidak tercatat karena sangat sedikit
3.	<i>Delivery Service</i> Akta Kelahiran	Juni 2016	111

Sumber: Disdukcapil Kota Bandung, 2016

Rendahnya pemanfaatan ketiga inovasi pelayanan akta kelahiran di Kota Bandung tersebut disebabkan oleh berbagai hal, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Disdukcapil Kota Bandung. Faktor yang berasal dari dalam Disdukcapil seperti terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM), terbatasnya sarana dan prasarana, serta sosialisasi yang kurang tepat sasaran. Sementara faktor dari luar Disdukcapil adalah kurang terinformasikannya ketiga inovasi pengelolaan akta kelahiran yang dimiliki oleh Disdukcapil Kota Bandung ke sebagian masyarakat kota Bandung, karakteristik sebagian masyarakat yang belum familiar dengan teknologi, tidak memiliki akses untuk memanfaatkan inovasi tersebut, dan lain sebagainya.

Melihat berbagai kendala/kelemahan dalam implementasi inovasi pelayanan akta kelahiran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung, maka Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara (PKP2A I LAN) melalui unit Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara (KKIAN) melakukan penelitian mandiri dengan judul **Model Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran di Kota Bandung**. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Model Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran di Kota Bandung? Rumusan permasalahan tersebut kemudian di *breakdown* menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana desain/formulasi ketiga model inovasi pelayanan akta kelahiran di Kota Bandung?
2. Bagaimana tujuan dan pemanfaatan ketiga model inovasi pelayanan akta kelahiran di Kota Bandung?
3. Bagaimana kelebihan, kelemahan serta strategi pengembangan model ketiga inovasi pelayanan akta kelahiran di Kota Bandung?
4. Prasyarat dan karakteristik daerah seperti apa yang dapat mereplikasi ketiga inovasi pelayanan akta kelahiran di Kota Bandung?

B. HASIL PENELITIAN

Adapun hasil penelitian dan analisa yang dilaporkan meliputi : (1) desain/formulasi ketiga model inovasi pelayanan akta kelahiran di Kota Bandung (2) tujuan dan pemanfaatan ketiga model inovasi pelayanan akta kelahiran di Kota Bandung, (3) kelebihan, kelemahan serta strategi pengembangan model ketiga inovasi pelayanan akta kelahiran di Kota Bandung, dan yang terakhir (4) prasyarat dan karakteristik daerah yang dapat mereplikasi ketiga inovasi pelayanan akta kelahiran di Kota Bandung.

1 Desain Model Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran Di Kota Bandung

Berikut ini akan diuraikan secara detail mengenai desain/formula ketiga model inovasi pelayanan akta kelahiran di Kota Bandung. Desain/formula setiap model akan mencakup beberapa aspek, yaitu : nama inovasi, kelembagaan yang menangani inovasi, mekanisme pelaksanaan inovasi, sumber daya manusia pelaksana, sumber dana yang digunakan, waktu pelaksanaan pelayanan inovasi, dan infrastruktur (sarana dan prasarana) yang digunakan.

B.1.1 Desain Model Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran *Online* Di Kota Bandung

Inovasi Akta Kelahiran *Online* diluncurkan oleh Disdukcapil Kota Bandung di pertengahan tahun 2015. Dengan komitmen yang kuat dari pimpinan, Akta Kelahiran *Online* dibangun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari inovasi ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat Kota Bandung dalam membuat akta kelahiran. Pemohon tidak perlu lagi datang dan mengantri di Kantor Disdukcapil kota Bandung karena pelaksanaan pelayanan akta kelahiran *online* dilakukan melalui website resmi disdukcapil.bandung.go.id atau aktaonline.bandung.go.id yang dapat diakses 24 jam.

Tabel 1.2 berikut ini merangkum secara detail desain model inovasi akta kelahiran *online* di Kota Bandung.

Tabel 1.2

Desain Model Inovasi Akta Kelahiran *Online* Di Kota Bandung

No.	Aspek Inovasi	Penjelasan
1.	Nama Inovasi	Akta Kelahiran <i>Online</i>
2.	Tujuan	Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat Kota Bandung dalam membuat akta kelahiran
3.	Kelembagaan yang menangani	Disdukcapil Kota Bandung
4.	Kebijakan dan Komitmen Pimpinan	Pimpinan telah memiliki komitmen untuk peningkatan pelayanan akta kelahiran melalui inovasi akta kelahiran <i>online</i> .
5.	Sumber Dana	Berasal dari APBD Kota Bandung.
6.	Waktu Pelaksanaan Pelayanan	Untuk registrasi dapat dilakukan 24 jam, sedangkan penyerahan berkas persyaratan dilakukan pada jam kerja.
7.	Kerjasama/Kemitraan	Disdukcapil melakukan kerjasama dengan Institut Teknologi Bandung dalam hal pembuatan aplikasi akta kelahiran <i>online</i> .
8.	Metode Sosialisasi	Sosialisasi mengenai akta kelahiran <i>online</i> dilakukan melalui berbagai macam media, baik audio, visual, maupun audio visual seperti media massa (cetak), media elektronik (radio, televisi, internet).
9.	Mekanisme Pelaksanaan Inovasi	<ol style="list-style-type: none">Pemohon cukup mengakses website resmi disdukcapil.bandung.go.id atau aktaonline.bandung.go.idMengisi biodata seperti nama, alamat email, dan no. telp untuk memperoleh nomor registrasi, namun jika telah melakukan registrasi sebelumnya dapat langsung memasukkan nomor registrasi beserta alamat email

No.	Aspek Inovasi	Penjelasan
		<p>3. Mengirimkan berkas persyaratan seperti Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan/RS/Penolong Kelahiran, Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Nikah, dan Akta Kelahiran Ibu ke Disdukcapil.</p> <p>4. Proses verifikasi dan pembuatan akta kelahiran di Disdukcapil.</p>
10.	SDM Pelaksana	Belum tersedia petugas Disdukcapil yang secara khusus bertugas menangani berbagai permasalahan pelayanan akta kelahiran <i>online</i> .
11.	Infrastruktur yang digunakan	Belum adanya server khusus yang menampung <i>database</i> akta kelahiran <i>online</i> dan jaringan internet yang masih kurang memadai, yaitu masih menggunakan 6 Mbps.

Sumber: diolah peneliti

B.1.2 Desain Model Inovasi Mepeling “Jemput Bola” Di Kota Bandung

Inovasi Mepeling merupakan kependekan dari Memberikan Pelayanan Keliling. Inovasi yang diinisiasi oleh Disdukcapil Kota Bandung ini bertujuan untuk memberikan percepatan pelayanan akta kelahiran melalui sistem “jemput bola” kepada masyarakat yang ingin membuat akta kelahiran. Dengan komitmen yang kuat dari pimpinan, inovasi ini dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung dengan metode sosialisasi lebih banyak dilakukan di media sosial.

Tabel 1.3 berikut ini menjelaskan secara detail desain model inovasi Mepeling “Jemput Bola” di Kota Bandung.

Tabel 1.3
Desain Model Inovasi Mepeling “Jemput Bola” Di Kota Bandung

No.	Aspek Inovasi	Penjelasan
1.	Nama Inovasi	Mepeling “Jemput Bola”
2.	Tujuan	Memberikan percepatan pelayanan akta kelahiran
3.	Kelembagaan yang menangani	Disdukcapil Kota Bandung
4.	Kebijakan dan Komitmen Pimpinan	Pimpinan telah memiliki komitmen untuk peningkatan pelayanan akta kelahiran melalui inovasi akta kelahiran <i>online</i> .
5.	Sumber Dana	Berasal dari APBD Kota Bandung.
6.	Waktu Pelaksanaan Pelayanan	<u>Hari kerja:</u> Pelayanan Mepeling dapat dilakukan satu minggu satu kali atau dua minggu satu kali, bahkan dapat dilakukan satu bulan satu kali,

No.	Aspek Inovasi	Penjelasan
		tanpa jadwal yang jelas dari pukul 09.00 – 19.00 WIB. <u>Hari Minggu:</u> Tidak ada pelayanan
7.	Kerjasama/Kemitraan	Disdukcapil melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit dalam hal informasi kelahiran.
8.	Metode Sosialisasi	Sosialisasi mengenai Mepeling “Jemput Bola” dilakukan melalui media sosial, yaitu melalui akun twitter @DisdukcapilBdg , akun Instagram DisdukcapilBdg, dan akun facebook DISDUKCAPIL Kota Bandung.
9.	Mekanisme Pelaksanaan Inovasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon dapat memperoleh informasi terkait jadwal pelayanan Mobil Mepeling melalui akun twitter @DisdukcapilBdg, akun Instagram DisdukcapilBdg, dan akun facebook DISDUKCAPIL Kota Bandung. 2. Pemohon dapat mengunjungi langsung ke lokasi dimana mobil Mepeling berada dengan membawa persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk proses pengajuan akta kelahiran
10.	SDM Pelaksana	Belum tersedia petugas Disdukcapil yang secara khusus bertugas melakukan pelayanan Mepeling. Petugas Mepeling merupakan petugas <i>front office</i> di Disdukcapil
11.	Infrastruktur yang digunakan	Mobil keliling berjumlah satu buah

Sumber: diolah peneliti

B.1.3 Desain Model Inovasi *Delivery Service* Akta Kelahiran Di Kota Bandung

Delivery Service akta kelahiran merupakan inovasi pelayanan akta kelahiran yang diluncurkan Disdukcapil Kota Bandung pada tanggal 20 Mei 2016. Inovasi yang diinisiasi langsung oleh Walikota Bandung, Ridwan Kamil, bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat kota Bandung dalam memperoleh akta kelahiran melalui pelayanan jasa pengiriman akta kelahiran. Dengan memanfaatkan pelayanan *delivery service*, akta kelahiran yang sudah selesai diproses akan langsung diantar ke alamat yang dituju.

Tabel 1.4 berikut ini menjelaskan secara detail desain model inovasi akta kelahiran *online* di Kota Bandung.

Tabel 1. 4
Desain Model Inovasi *Delivery Service* Akta Kelahiran Di Kota Bandung

No.	Aspek Inovasi	Penjelasan
1.	Nama Inovasi	<i>Delivery Service</i> Akta Kelahiran
2.	Tujuan	Memberikan pelayanan jasa pengiriman akta kelahiran
3.	Kelembagaan yang menangani	Disdukcapil Kota Bandung
4.	Kebijakan dan Komitmen Pimpinan	Pimpinan telah memiliki komitmen untuk meningkatkan pelayanan akta kelahiran melalui inovasi <i>Delivery Service</i> Akta Kelahiran.
5.	Sumber Dana	Berasal dari dana CSR yang diberikan oleh Bank BJB dan PT Pos Indonesia
6.	Waktu Pelaksanaan Pelayanan	Jam Kerja
7.	Kerjasama/Kemitraan	Disdukcapil melakukan kerjasama dengan Bank BJB dan PT Pos Indonesia.
8.	Metode Sosialisasi	Minimnya informasi terkait <i>Delivery Service</i> Akta Kelahiran
9.	Mekanisme Pelaksanaan Inovasi	Menuliskan nama dan alamat yang dituju
10.	SDM Pelaksana	Belum tersedia petugas Disdukcapil yang bertugas menuliskan nama dan alamat tujuan. Petugas pengantar akta kelahiran merupakan petugas PT Pos yang bertugas mengantarkan surat-surat.
11.	Infrastruktur yang digunakan	-

Sumber: diolah peneliti

2 Tujuan Dan Pemanfaatan Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran Di Kota Bandung

Tiga inovasi pelayanan akta kelahiran di Kota Bandung memiliki dua tujuan utama. Tujuan yang pertama adalah untuk meningkatkan jumlah kepemilikan akta kelahiran penduduk Kota Bandung, sementara tujuan yang kedua adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dengan memberikan fasilitas pelayanan yang mudah, praktis, cepat, dan efisien. Berikut ini akan dibahas mengenai kedua tujuan inovasi pelayanan akta kelahiran di Kota Bandung.

2.1 Tujuan Pertama: Meningkatnya Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran

Tujuan pertama inovasi pelayanan akta kelahiran, yaitu untuk mengetahui apakah dengan adanya ketiga inovasi ini telah meningkatkan kepemilikan akta kelahiran di Kota Bandung ataukah tidak, dapat dilihat berdasarkan data jumlah kepemilikan akta kelahiran sebelum dan setelah inovasi tersebut dilakukan. Data yang diperoleh dari Disdukcapil Kota Bandung menunjukkan bahwa dibandingkan tahun 2014, jumlah penduduk Kota Bandung pada tahun 2016 mengalami

penurunan. Jumlah penduduk Kota Bandung pada tahun 2014 mencapai 2.693.500 orang, sementara hingga Mei 2016 hanya mencapai 2.378.627 orang. Penurunan yang mencapai 314.873 orang ini dapat terjadi karena berbagai macam faktor.

Berbeda dengan jumlah penduduk yang mengalami penurunan, jumlah kepemilikan akta kelahiran di Kota Bandung justru mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah kepemilikan akta kelahiran yang signifikan terjadi antara tahun 2014 ke tahun 2015. Dimana pada tahun 2014 jumlah kepemilikan akta kelahiran hanya mencapai 559.358 akta, sementara jumlah kepemilikan akta kelahiran pada tahun 2015 melonjak hingga mencapai 1.728.931 akta. Lonjakan kepemilikan akta kelahiran ini lebih dari 200%. Kemudian hingga Mei 2016, peningkatan jumlah kepemilikan akta kelahiran mencapai 1.745.845 akta.

Adanya peningkatan jumlah kepemilikan akta kelahiran di Kota Bandung menurut Kepala Bidang Pencatatan, Sugiharto dapat terjadi karena dua kemungkinan. Kemungkinan pertama bisa terjadi karena kesadaran masyarakat Kota Bandung akan pentingnya memiliki akta kelahiran yang meningkat. Peningkatan kesadaran masyarakat Kota Bandung akan pentingnya akta kelahiran menurut Sugiharto terutama terjadi pada bulan Juni setiap tahunnya. Masyarakat Kota Bandung akan berbondong-bondong untuk membuat akta kelahiran anak mereka dikarenakan akta kelahiran menjadi salah satu persyaratan untuk masuk sekolah. Untuk melihat berapa banyak jumlah permintaan akta kelahiran setiap bulannya, dapat dilihat berdasarkan jumlah penerbitan akta kelahiran yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Bandung pada Tabel 1.5 berikut ini.

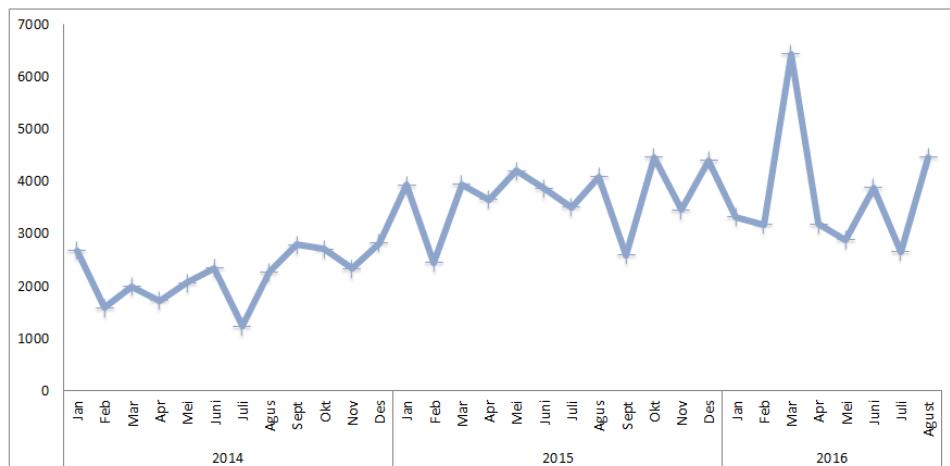
Tabel 1.5
Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran Pada Disdukcapil Kota Bandung
Periode 2014 – Agustus 2016

2014		2015		2016	
Bln	Jumlah Penerbitan	Bln	Jumlah Penerbitan	Bln	Jumlah Penerbitan
Jan	2670	Jan	3936	Jan	3319
Feb	1575	Feb	2447	Feb	3174
Mar	1988	Mar	3944	Mar	6440
Apr	1713	Apr	3649	Apr	3187
Mei	2054	Mei	4200	Mei	2885
Juni	2344	Juni	3867	Juni	3880
Juli	1228	Juli	3503	Juli	2650
Ags	2264	Ags	4087	Ags	4467
Sept	2783	Sept	2593		
Okt	2706	Okt	4461		
Nov	2333	Nov	3454		
Des	2822	Des	4403		

Sumber: Disdukcapil, 2016

Berdasarkan Tabel 1.5 di atas dapat diketahui bahwa penerbitan akta kelahiran melonjak di setiap bulannya, tidak hanya pada bulan Juni seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pencatatan, Sugiharto. Penerbitan akta kelahiran yang dilakukan Disdukcapil Kota Bandung meliputi penerbitan akta kelahiran umum dan akta kelahiran terlambat, baik untuk Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang berdomisili di Kota Bandung.

Rata-rata penerbitan akta kelahiran pada tahun 2015 adalah sebanyak 3.712 akta per bulan dan hingga Juli 2016 rata-rata penerbitan akta kelahiran mencapai 3.648 akta. Dengan jumlah penerbitan akta kelahiran yang sedemikian tingginya menjadi salah satu indikator penentu bahwa tingkat kesadaran masyarakat Kota Bandung akan kepemilikan akta kelahiran meningkat. Gambar 1.1 berikut ini menunjukkan trend jumlah penerbitan akta kelahiran sebagai salah satu indikator penentu tingkat kesadaran masyarakat Kota Bandung akan kepemilikan akta kelahiran meningkat.



Sumber: Disdukcapil Kota bandung, 2016

Gambar 1.1
Trend Peningkatan Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran Di Kota Bandung

Selain kesadaran yang meningkat, kemungkinan kedua tingginya angka kepemilikan akta kelahiran menurut Kepala Bidang Pencatatan Sipil, Bapak Sugiharto adalah karena berhasilnya program inovasi yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Bandung. Untuk melihat seberapa besar keberhasilan dari berbagai program inovasi ini dalam meningkatkan kepemilikan akta kelahiran di Kota Bandung, dapat dilihat dari seberapa banyak masyarakat yang memanfaatkan ketiga pelayanan tersebut. Berikut ini akan diuraikan mengenai pemanfaatan ketiga inovasi pelayanan akta kelahiran di Kota Bandung.

2.1.1 Pemanfaatan Model Inovasi Akta Kelahiran *Online* Di Kota Bandung

Dilihat berdasarkan jumlah masyarakat yang melakukan permohonan akta kelahiran, inovasi pelayanan akta kelahiran *online* belum mendapatkan respon yang signifikan dari masyarakat Kota Bandung. Jumlah pemohon akta kelahiran melalui *online* jumlahnya sedikit sekali. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil, Bapak Sugiharto, bahwa dari sekitar 150 hingga 200 pemohon setiap harinya, jumlah masyarakat Kota Bandung yang menggunakan akta kelahiran *online* tidak mencapai sepuluh jari.

Sedikitnya respon masyarakat Kota Bandung yang memanfaatkan pelayanan akta kelahiran *online* dikarenakan belum seluruhnya masyarakat Kota Bandung mengetahui mengenai adanya inovasi akta kelahiran *online*. Hasil wawancara dengan beberapa penduduk Kota Bandung menyatakan bahwa mereka belum mengetahui adanya inovasi akta kelahiran *online* yang dilakukan oleh Disdukcapil.

Menurut Bapak Sugiharto, rendahnya respon masyarakat Kota Bandung untuk memanfaatkan akta kelahiran *online* ini karena beberapa alasan. Alasan pertama, pemohon akta kelahiran berbeda dengan pemohon perijinan. Pemohon perijinan umumnya berasal dari masyarakat kalangan menengah ke atas, sehingga tidak asing untuk menggunakan teknologi seperti *smart phone*, gadget atau lainnya. Sedikit berbeda dengan masyarakat pemohon akta kelahiran yang berasal dari semua lapisan masyarakat. Tidak semua masyarakat Kota Bandung memiliki dan dapat menggunakan teknologi dengan baik. Sehingga hal ini menjadi salah satu kendala dalam menerapkan pelayanan akta kelahiran *online*.

Alasan kedua, masyarakat Kota Bandung masih memiliki budaya ketimuran yang cukup kuat, mereka senang berkelompok, bertemu banyak orang dan sebagainya. Untuk melakukan permohonan akta kelahiran pun demikian, pemohon lebih memilih datang langsung ke kantor Disdukcapil, bertemu dan bertanya langsung kepada petugas daripada harus melakukan permohonan melalui *online*. Melalui pelayanan akta kelahiran *online*, semua proses harus dilakukan melalui *online* (internet), seperti mengisi formulir pendaftaran (registrasi) via internet, serta mengupload berkas persyaratan juga melalui internet. Bagi sebagian orang, penggunaan teknologi bisa jadi merupakan hal yang memberatkan. Sehingga walaupun pelayanan akta kelahiran telah berjalan, masyarakat Kota Bandung masih memilih melakukan permohonan akta kelahiran secara konvensional.

2.1.2 Pemanfaatan Model Inovasi Mepeling "Jemput Bola" Di Kota Bandung

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pencatatan Sipil, Bapak Sugiharto, bahwa pelayanan Mepeling (dulunya disebut pelayanan Jemput Bola) dilakukan dari pukul 9 pagi hingga pukul 7 malam. Jumlah masyarakat pengguna pelayanan Mepeling tidaklah tetap, berfluktuatif setiap kali beroperasi. Tabel 1.6 berikut ini menunjukkan banyaknya akta kelahiran yang diterbitkan Disdukcapil melalui permohonan pelayanan mobil keliling.

Tabel 1.6

Rekapitulasi Penerbitan Akta Kelahiran Melalui Pelayanan Mobil Keliling Periode April – November 2015 Dan Februari 2016

Tahun	Bulan	Kecamatan	Akta Kelahiran Umum	Akta Kelahiran Terlambat	Jumlah Penerbitan
2015	April	Lengkong	43	-	43
		Bojongloa Kaler	47	-	47
	Mei	Sukajadi	73	13	86
	Juni	Kiaracondong	43	5	48
		Andir	35	5	40
	Juli	Astana Anyar	45	50	95
		Regol	43	29	72
	Agustus	Cibeunying Kidul	30	34	64
		Panyileukan	26	76	102
	September	Cinambo	27	34	61
		Mandalajati	42	8	50
		Gedebage	49	667	716
	Oktober	Bojongloa Kidul	19	83	102
	November	Plaza Balaikota	33	113	146
		Cicendo	17	28	45
		Batununggal	14	103	117
		Buah Batu	19	98	117
		Coblong	27	12	39
		Bandung Wetan	12	38	50
2016	Februari	Rancasari	11	4	15
		Arcamanik	16	121	137

Sumber: Disdukcapil Kota Bandung, 2016

Dari tabel 1.6 di atas, dapat diketahui bahwa dari bulan April hingga November 2015 inovasi Mepeling telah berkontribusi dalam peningkatan kepemilikan akta kelahiran di kota Bandung. Jumlah akta kelahiran yang dikeluarkan pada periode tersebut adalah sebanyak 2040 akta kelahiran yang berasal dari kategori akta kelahiran umum maupun akta kelahiran terlambat. Sementara, untuk Februari 2016, Mepeling telah menerbitkan 152 akta kelahiran. Sedangkan, untuk melihat frekuensi pelayanan Mepeling ini beroperasi, dapat dilihat pada tabel 1.7 berikut ini .

Tabel 1.7

Frekuensi Pelayanan Dan Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran Melalui Mepeling
Pada Periode April – November 2015

No.	Bulan	Frekuensi Pelayanan	Jumlah Penerbitan Kelahiran	Akta
1.	April	2	90	
2.	Mei	1	86	
3.	Juni	2	88	
4.	Juli	2	167	
5.	Agustus	2	166	
6.	September	3	827	
7.	Oktober	1	102	
8.	November	6	514	

Sumber: Disdukcapil Kota Bandung, 2016

Berdasarkan data pada Tabel 1.7 di atas, pada periode April – November 2015, tercatat jumlah frekuensi Mepeling di Kota Bandung adalah sebanyak 19 kali. Rata-rata pelayanan yang dilakukan setiap bulannya sekitar 2 hingga 3 kali per bulan. Menurut Kepala Disdukcapil Kota Bandung, Popong Nuraeni, pelayanan Mepeling belum berjalan maksimal dikarenakan keterbatasan mobil keliling yang hanya berjumlah satu unit.

2.1.3 Pemanfaatan Model Inovasi *Delivery Service* Akta Kelahiran Di Kota Bandung

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Disdukcapil Kota Bandung, Ibu Uum Sumiati, diketahui bahwa dengan rata-rata 150 akta yang diterbitkan setiap harinya, dalam satu bulan jumlah penerbitan akta kelahiran mencapai 3.500 akta. Dari 3.500 akta yang dapat diterbitkan dalam jangka waktu satu setengah bulan, hanya sekitar 111 akta yang dikirim melalui pelayanan *Delivery Service*. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sekitar 2% masyarakat pemohon akta kelahiran yang memanfaatkan pelayanan *Delivery Service* ini. Sedangkan, sembilan puluh delapan persen sisanya diambil sendiri oleh pemohon. Tabel 1.8 berikut ini menunjukkan jumlah akta kelahiran yang dikirim melalui pelayanan *Delivery Service* akta kelahiran.

Tabel 1.8

Jumlah Akta Kelahiran Yang Dikirim Melalui Pelayanan *Delivery Service* Akta Kelahiran

No.	Tanggal Pengiriman	Kecamatan	Tujuan	Jumlah
1.	7 Juni 2016	Situsaeur		28
		Cipedes		20
		Sekejati		17
		Ujungberung		15
		Asia Afrika		10
		Cikutra		6

No.	Tanggal Pengiriman	Kecamatan Pengiriman	Tujuan	Jumlah
2.	9 – 13 Juni 2016	Ujungberung	4	
		Situsaeur	4	
		Cipedes	1	
		Cikutra	5	
		Sekejati	1	

Sumber: Disdukcapil Kota Bandung, 2016

2.2 Tujuan Kedua: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Selanjutnya, tujuan kedua inovasi pelayanan akta kelahiran adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Tujuan yang kedua ini dapat dilihat berdasarkan data hasil survei kepuasan masyarakat yang telah dilakukan. Survey kepuasan masyarakat ini dilakukan kepada masyarakat pengguna pelayanan yang diselenggarakan oleh Disdukcapil Kota Bandung dimana untuk tahun 2014 dilakukan survei kepada 148 orang, sementara untuk tahun 2015 dilakukan kepada 150 orang. Namun, survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini ditujukan untuk semua pelayanan di Disdukcapil, bukan hanya yang terkait akta kelahiran saja.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan terhadap hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2014 dan 2015, maka nilai indeks unit pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tahun 2014 dan 2015 termasuk pada mutu pelayanan dengan nilai B dan termasuk pada kategori memiliki kinerja unit pelayanan yang baik .

3 Kelebihan, Kelemahan, Serta Strategi Pengembangan Model Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran Di Kota Bandung

Berdasarkan penjelasan terkait desain inovasi akta kelahiran yang dimiliki oleh Disdukcapil Kota Bandung, berikut akan diuraikan mengenai kelebihan, kelemahan, serta strategi pengembangan dari ketiga model inovasi tersebut.

3.1 Kelebihan, Kelemahan, Serta Strategi Pengembangan Model Inovasi Akta Kelahiran *Online* Di Kota Bandung

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa inovasi akta kelahiran *online* belum maksimal dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Bandung. Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Sekretaris Disdukcapil, Kepala Bagian Pencatatan Sipil, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta petugas pelayanan akta kelahiran, yang menyatakan bahwa hanya sedikit sekali masyarakat Kota Bandung yang memanfaatkan pelayanan akta kelahiran ini.

Hingga penelitian ini dilakukan, inovasi akta kelahiran *online*, belum dapat meningkatkan jumlah kepemilikan akta kelahiran di Kota Bandung secara signifikan. Padahal secara konseptual inovasi akta kelahiran *online* dilaksanakan untuk mempermudah masyarakat Kota Bandung untuk memiliki akta kelahiran. Dengan

menggunakan akta kelahiran *online*, terdapat beberapa kelebihan yang ditawarkan Disdukcapil kepada masyarakat Kota Bandung, yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.9
Kelebihan Model Inovasi Akta Kelahiran *Online* Di Kota Bandung

No	Uraian
1)	Masyarakat Kota Bandung tidak lagi menghabiskan waktu untuk mengantre di kantor Disdukcapil,
2)	Masyarakat Kota Bandung memiliki kejelasan informasi karena semua prosesnya dilakukan secara <i>online</i> ,
3)	Permohonan akta Kelahiran <i>Online</i> dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja
4)	Memiliki kejelasan waktu penyelesaian akta kelahiran,
5)	Menghilangkan praktik pencaloan.

Berbagai kelebihan yang ditawarkan Disdukcapil dalam melakukan pelayanan akta kelahiran *online* tersebut kurang mendapat respon dari masyarakat Kota Bandung dikarenakan dalam implementasinya masih ditemukan kelemahan pada beberapa aspek. Beberapa kelemahan yang teridentifikasi ketika inovasi ini diaplikasikan diuraikan ke dalam delapan aspek, yaitu sumber dana, waktu pelaksanaan pelayanan, kerjasama/kemitraan, metode sosialisasi, mekanisme pelaksanaan inovasi, SDM pelaksana, infrastruktur yang digunakan, dan aspek lainnya. Berikut akan diuraikan beberapa kelemahan yang teridentifikasi beserta strategi pengembangannya pada Tabel 1.10 berikut ini.

Tabel 1.10
Kelemahan Dan Strategi Pengembangan Model Inovasi Akta Kelahiran *Online*

No.	Aspek Inovasi	Kelemahan	Strategi Pengembangan Model
1.	Sumber Dana	Sumber anggaran untuk pelayanan akta kelahiran <i>online</i> hanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.	Selain menggunakan APBD, sebaiknya pihak Disdukcapil berusaha mendapatkan CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>) dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bandung. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban APBD dan juga untuk menjalin kemitraan dengan <i>stakeholder</i> .
2.	Waktu Pelaksanaan Pelayanan	Untuk registrasi permohonan akta kelahiran dapat dilakukan selama 24 jam, sedangkan penyerahan berkas persyaratan dilakukan pada jam kerja di kantor Disdukcapil.	Baik registrasi permohonan akta kelahiran maupun penyerahan berkas persyaratan dapat dilakukan selama 24 jam, karena semua proses dilakukan secara <i>online</i> .
3.	Kerjasama/Kemitraan	Disdukcapil melakukan kerjasama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam hal pembuatan aplikasi akta kelahiran <i>online</i> . Namun hingga saat ini belum dilakukan monitoring dan evaluasi dari pihak ITB maupun Disdukcapil. Sehingga terjadinya kelemahan aplikasi tidak diketahui oleh kedua belah pihak.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengingat implementasi inovasi akta kelahiran <i>online</i> yang masih baru, Disdukcapil dan pihak pembuat aplikasi akta kelahiran <i>online</i> harus terus melakukan komunikasi dan koordinasi. Sehingga kelemahan/kekurangan yang terdapat dalam aplikasinya dapat segera tertangani. 2) Untuk mendukung infrastruktur akta kelahiran <i>online</i> seperti jaringan internet ataupun infrastruktur lainnya, selain dengan ITB, Disdukcapil dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang terdapat di Kota Bandung.
4.	Metode Sosialisasi	1) Inovasi akta kelahiran <i>online</i> baru diaplikasikan selama dua bulan,	1) Disdukcapil harus menentukan lapisan masyarakat mana yang akan menjadi target utama

No.	Aspek Inovasi	Kelemahan	Strategi Pengembangan Model
		<p>dengan berbagai keterbatasan inovasi ini belum mendapatkan respon yang maksimal dari masyarakat Kota Bandung.</p> <p>2) Belum semua masyarakat Kota Bandung mengetahui adanya inovasi akta kelahiran <i>online</i>. Hal ini menjadi salah satu penyebab tingginya angka pembuatan akta kelahiran secara konvensional, yaitu dengan mendatangi langsung kantor Disdukcapil Kota Bandung.</p> <p>3) Sosialisasi mengenai akta kelahiran <i>online</i> dilakukan melalui berbagai macam media, baik audio, visual, maupun audio visual seperti media massa (cetak), media elektronik (radio, televisi, internet), dan sebagainya namun hasilnya kurang optimal.</p>	<p>dalam pelayanan akta kelahiran <i>online</i>. Dengan adanya target, Disdukcapil dapat menentukan strategi dalam sosialisasi inovasi akta kelahiran tersebut.</p> <p>2) Target masyarakat yang akan dituju untuk pelayanan akta kelahiran <i>online</i> adalah masyarakat yang 'melek' internet, dan 'tidak gaptek'. Lapisan masyarakat yang memiliki kedua karakter ini adalah lapisan masyarakat yang masih muda, mahasiswa/mahasiswi, para pelajar. Disdukcapil dapat melakukan sosialisasi ke sekolah /kampus dengan harapan siswa tersebut akan menyampaikan kepada orang tua atau orang disekitar mereka.</p> <p>3) Alasan mengapa siswa/mahasiswa yang menjadi salah satu target sosialisasi adalah bahwa mereka nantinya akan berkeluarga dan memiliki keturunan, sehingga pada saatnya nanti mereka sudah mengetahui akan adanya kemudahan dalam hal pembuatan akta kelahiran.</p>
5.	Mekanisme Pelaksanaan Inovasi	<p>1) Mekanisme pelaksanaan inovasi akta kelahiran <i>online</i> masih sebatas melakukan pendaftaran permohonan akta kelahiran saja, sedangkan untuk penyerahan berkas persyaratan tetap harus</p>	<p>1) Dengan hanya melakukan pendaftaran melalui <i>online</i> saja dan proses pengiriman berkas tetap harus dilakukan di kantor Disdukcapil menjadikan masyarakat yang akan melakukan permohonan akta kelahiran <i>online</i> bekerja dua kali. Proses ini kurang efektif, karena pemohon harus melakukan registrasi <i>online</i> di tempat lain (rumah, kantor, atau</p>

No.	Aspek Inovasi	Kelemahan	Strategi Pengembangan Model
		dilakukan langsung ke kantor Disdukcapil.	<p>2) warung internet), dan pemohon juga harus datang ke kantor Disdukcapil untuk melakukan penyerahan berkas persyaratan.</p> <p>2) Dengan adanya pelayanan akta kelahiran <i>online</i>, diharapkan segala prosesnya dilakukan secara <i>online</i> pula, artinya apabila ditemukan kekurangan data, dapat diinformasikan secara <i>online</i> (interaksi antara petugas dan pemohon dilakukan secara <i>online</i>).</p> <p>3) Apabila akta kelahiran yang dibuat secara <i>online</i> telah selesai, pengiriman berkas dapat dilakukan melalui pelayanan <i>delivery service</i>.</p> <p>4) Disdukcapil hendaknya menyediakan <i>customer care</i> yang berfungsi sebagai admin/operator yang akan menampung segala macam pertanyaan, saran, masukan dan keluhan dari masyarakat.</p>
		2) Dalam hal pengisian aplikasi, terdapat beberapa hal yang membingungkan pemohon akta kelahiran <i>online</i> , seperti pemohon harus mengisi keterangan yang sebetulnya telah tersedia di Disdukcapil, serta terdapat kelurahan/ kecamatan yang tidak tersedia dalam aplikasi akta kelahiran <i>online</i> .	<p>➤ Secara teknis, dalam hal pengisian informasi melalui aplikasi <i>online</i>, terdapat beberapa hal yang dapat diperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila database Disdukcapil telah terintegrasi, setelah pengisian nama dan NIK, hendaknya informasi lainnya dapat secara otomatis terjawab, tidak ditanyakan kembali kepada pemohon. Disdukcapil dapat mengintegrasikan seluruh informasi kependudukan dalam satu database yang lengkap.

No.	Aspek Inovasi	Kelemahan	Strategi Pengembangan Model
			<p>2. Disdukcapil harus mengevaluasi kembali aplikasi yang telah dibuatnya, khususnya seluruh nama kelurahan/kecamatan yang terdapat di Kota Bandung harus tersedia dalam aplikasi.</p>
6.	SDM Pelaksana	Belum tersedia petugas Disdukcapil yang secara khusus bertugas menangani berbagai permasalahan pelayanan akta kelahiran <i>online</i> . Petugas pelayanan akta kelahiran <i>online</i> saat ini masih digabung dengan petugas pelayanan akta kelahiran di loket yang ada di Disdukcapil.	Disdukcapil hendaknya menyiapkan SDM khusus yang bertugas untuk menangani pelayanan akta kelahiran <i>online</i> , tidak digabung dengan petugas pelayanan akta kelahiran konvensional
7.	Infrastruktur yang digunakan	<u>Disdukcapil</u> <ol style="list-style-type: none"> 1) Saat ini, server yang digunakan untuk akta kelahiran <i>online</i> masih bergabung dengan server Disdukcapil lainnya. 2) Jaringan internet yang tersedia saat ini adalah 6 MBps. <u>Masyarakat</u> <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk dapat mengakses inovasi akta kelahiran <i>online</i>, dibutuhkan sarana smart 	<p>1) Disdukcapil harus menyediakan server khusus untuk pelayanan akta kelahiran <i>online</i>, atau kapasitas server harus diperbesar.</p> <p>2) Jaringan internet yang diperlukan oleh Disdukcapil adalah sebanyak 15 MBps. Untuk memperoleh dukungan internet yang lebih besar tersebut, Disdukcapil dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bandung.</p> <p>Untuk pemohon akta kelahiran yang tidak memiliki sarana smart phone (<i>gadget</i>), komputer atau pun internet, strategi yang dapat dilakukan oleh</p>

No.	Aspek Inovasi	Kelemahan	Strategi Pengembangan Model
		<p>phone (<i>gadget</i>), komputer atau pun internet. Tidak semua pemohon akta kelahiran di Kota Bandung memiliki sarana dan prasarana tersebut.</p> <p>2) Dalam menggunakan akta kelahiran <i>online</i>, pemohon harus mengikuti prosesnya melalui internet. Tidak semua masyarakat Kota Bandung memiliki dan dapat menggunakan teknologi dengan baik.</p>	<p>Disdukcapil adalah dengan memaksimalkan pelayanan mobil keliling Mepeling.</p>
8.	Lainnya	<p>Budaya sebagian masyarakat Kota Bandung masih ingin melakukan permohonan akta kelahiran secara konvensional (datang sendiri ke Disdukcapil). Dengan datang langsung ke kantor Disdukcapil, pemohon bisa bertemu dan bertanya langsung kepada petugas.</p>	<p>Dengan adanya akta kelahiran <i>online</i>, Disdukcapil dapat memberikan pembatasan (kuota) untuk pelayanan akta kelahiran langsung ke Disdukcapil. Dengan demikian, diharapkan masyarakat pemohon akta kelahiran akan memanfaatkan pelayanan akta kelahiran <i>online</i> maupun Mepeling.</p>

Sumber : diolah peneliti

3.2 Kelebihan, Kelemahan, Serta Strategi Pengembangan Model Inovasi Mepeling “Jemput Bola” Di Kota Bandung

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa inovasi *Mepeling* telah mendapat respon dari masyarakat Kota Bandung. Hal ini terjadi karena *Mepeling* telah menjadi program Disdukcapil yang dirasakan manfaatnya oleh sebagian masyarakat Kota Bandung. Dengan adanya mobil keliling di kecamatan, rumah sakit, ataupun sekolah-sekolah, masyarakat cukup mendatangi mobil keliling tersebut, dan mendapatkan pelayanan *Mepeling*. Dengan *Mepeling*, masyarakat dapat menentukan lokasi mana yang paling mudah dijangkau untuk pembuatan akta kelahiran.

Tabel 1.11
Kelebihan Model Inovasi Mepeling “Jemput Bola” Di Kota Bandung

No	Uraian
1)	Pelayanan <i>Mepeling</i> “Jemput Bola” mendekatkan pelayanan ke masyarakat.
2)	Masyarakat tidak perlu datang dan mengantre di kantor Disdukcapil.
3)	Masyarakat cukup mengisi formulir permohonan, kemudian menyerahkan persyaratannya kepada petugas <i>mepeling</i> .
4)	Masyarakat dapat menentukan lokasi mana yang paling mudah dijangkau untuk pembuatan akta kelahiran.
5)	Menghilangkan praktek pencaloan.

Dalam implementasinya, inovasi *Mepeling* “Jemput Bola” ini masih menemui berbagai kendala/kelemahan. Beberapa kelemahan yang teridentifikasi ketika inovasi ini diaplikasikan beserta strategi pengembangannya akan diuraikan ke dalam delapan aspek, yaitu sumber dana, waktu pelaksanaan pelayanan, kerjasama/kemitraan, metode sosialisasi, mekanisme pelaksanaan inovasi, SDM pelaksana, infrastruktur yang digunakan, dan aspek lainnya.

Tabel 1.12
Kelemahan Dan Strategi Pengembangan Model Inovasi Mepeling “Jemput Bola”

No.	Aspek Inovasi	Kelemahan	Strategi Pengembangan Model
1.	Sumber Dana	Sumber anggaran yang digunakan untuk kegiatan Jemput Bola/Mepeling berasal dari APBD	Pengadaan mobil Mepeling tentunya memiliki anggaran yang besar. Selain menggunakan APBD, sebaiknya pihak Disdukcapil berusaha mendapatkan CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>) dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bandung. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban APBD dan juga untuk menjalin kemitraan dengan <i>stakeholder</i> .
2.	Waktu Pelaksanaan Pelayanan	-	Untuk menjaring pemohon akta kelahiran yang tidak dapat mendatangi mobil keliling dapat dilakukan dengan memaksimalkan inovasi akta kelahiran <i>online</i> (24 jam).
3.	Kerjasama/Kemitraan	Hingga saat ini Disdukcapil belum melakukan kerjasama dengan pihak manapun dalam hal inovasi Jemput Bola/Mepeling.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengadaan mobil Mepeling tentunya memiliki anggaran yang besar. Selain menggunakan APBD, sebaiknya pihak Disdukcapil berusaha mendapatkan CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>) dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bandung. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban APBD dan juga untuk menjalin kemitraan dengan <i>stakeholder</i>. ➤ Strategi yang lain adalah Disdukcapil dapat melakukan kerjasama dengan kepolisian di wilayah Kota Bandung. Alasannya adalah karena program Sim Keliling yang dimiliki kepolisian telah

No.	Aspek Inovasi	Kelemahan	Strategi Pengembangan Model
			memiliki jadwal, jumlah SDM dan sarana prasarana lainnya yang relatif memadai. Sambil menunggu pengadaan mobil keliling, Disdukcapil dapat bekerjasama dengan kepolisian Kota Bandung untuk memanfaatkan jadwal dan sarana prasarana Sim Keliling. Disdukcapil cukup menyediakan SDM untuk inovasi Mepelingnya.
4.	Metode Sosialisasi	Sosialisasi inovasi Jemput Bola/Mepeling, lebih banyak dilakukan di sosial media, dimana tidak semua masyarakat Kota Bandung memiliki dan aktif di media social. Hal ini menyebabkan ketidaktahuan informasi mengenai inovasi Mepeling	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Seperti halnya inovasi akta kelahiran <i>online</i>, Disdukcapil dapat menentukan lapisan masyarakat mana yang akan menjadi target utama dalam pelayanan Jemput Bola/Mepeling. Dengan adanya target, Disdukcapil dapat menentukan strategi dalam sosialisasi inovasi akta kelahiran tersebut. ➤ Target masyarakat yang akan dituju untuk pelayanan Jemput Bola/Mepeling ini adalah masyarakat yang berada di daerah yang jauh dari Disdukcapil atau masyarakat yang sedang berada di klinik bersalin/rumah sakit. Disdukcapil dapat melakukan sosialisasi ke tempat-tempat tersebut dengan harapan masyarakat tersebut akan menyampaikannya kepada orang disekitar mereka.

No.	Aspek Inovasi	Kelemahan	Strategi Pengembangan Model
		<p>Inovasi akta kelahiran Mepeling belum memiliki jadwal pelayanan yang terorganisir dengan baik. Hal ini membuat masyarakat sulit untuk mengetahui lokasi dimana mobil keliling berada, sehingga sebagian besar masyarakat belum memanfaatkan inovasi akta kelahiran Mepeling ini.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Disdukcapil sebaiknya memiliki jadwal operasi mobil Mepeling secara teratur. Meskipun belum dapat beroperasi setiap harinya, namun dengan adanya jadwal rutin dimana mobil Mepeling akan beroperasi, masyarakat dapat memiliki waktu untuk mempersiapkan berkas dan persyaratan ketika ingin membuat akta kelahiran melalui inovasi Mepeling ini. Selain itu, masyarakat akan memperkirakan lokasi Mepeling mana yang lebih mudah untuk dijangkau. ➤ Dengan jadwal yang tetap dan terorganisir dengan baik, pihak Disdukcapil kota Bandung sebaiknya menginformasikan jadwal dan lokasi dimana Mepeling berada tidak hanya melalui media social saja, namun dapat dilakukan melalui berbagai macam media baik audio, visual, maupun audio visual seperti media massa (cetak), media elektronik (radio, televisi)
5.	Mekanisme Pelaksanaan Inovasi	-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ - Disdukcapil sebaiknya memiliki jadwal operasi mobil Mepeling secara teratur. Meskipun belum dapat beroperasi setiap harinya, namun dengan adanya jadwal rutin dimana mobil Mepeling akan beroperasi, masyarakat dapat memiliki waktu untuk mempersiapkan berkas dan

No.	Aspek Inovasi	Kelemahan	Strategi Pengembangan Model
			<p>persyaratan ketika ingin membuat akta kelahiran melalui inovasi Mepeling ini. Selain itu, masyarakat akan memperkirakan lokasi Mepeling mana yang lebih mudah untuk dijangkau. Dengan jadwal yang tetap dan terorganisir dengan baik, pihak Disdukcapil kota Bandung sebaiknya menginformasikan jadwal dan lokasi dimana Mepeling berada tidak hanya melalui media social saja, namun dapat dilakukan melalui berbagai macam media baik audio, visual, maupun audio visual seperti media massa (cetak), media elektronik (radio, televisi)</p>
6.	SDM Pelaksana	<p>Jumlah SDM yang bertugas melakukan pelayanan Jemput Bola/Mepeling (keluar kantor) sebanyak 5 orang untuk satu mobil keliling. Dikarenakan petugas yang melakukan kegiatan mepeling juga merupakan petugas front office pada Disdukcapil Kota Bandung, sehingga pekerjaan yang ada di kantor Disdukcapil menjadi terhambat, seperti proses verifikasi dokumen yang menjadi persyaratan pembuatan akta kelahiran.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SDM yang bertugas untuk melakukan pelayanan mepeling dikhkususkan dari petugas <i>front office</i> yang terdapat di kantor Disdukcapil. ➤ Apabila petugas khusus mepeling telah tersedia, dapat juga dilakukan proses pergantian petugas. Misalnya, pada minggu pertama, lima orang petugas keluar untuk melakukan pelayanan mepeling, pada minggu kedua lima orang tersebut melakukan pelayanan di kantor Disdukcapil.

No.	Aspek Inovasi	Kelemahan	Strategi Pengembangan Model
		Dengan kelemahan ini, Disdukcapil belum berani melaksanakan kegiatan mepeling setiap hari.	
7.	Infrastruktur yang digunakan	Jumlah mobil keliling yang tersedia berjumlah 1 buah, sehingga pelayanan jemput bola yang dilakukan Disdukcapil belum mampu menjangkau seluruh wilayah Kota Bandung	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Disdukcapil telah melakukan pengadaan kendaraan khusus untuk operasional jemput bola/mepeling yang berjumlah enam buah, dan hingga September 2016 proses lelang masih dilakukan. ➤ Lamanya proses pengadaan barang hendaknya disesuaikan dengan jumlah hari yang telah tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional yaitu 90 hari kalender.
8.	Lainnya	-	-

Sumber: diolah peneliti

3.3 Kelebihan, Kekurangan, Serta Strategi Pengembangan Model Inovasi *Delivery Service* Akta Kelahiran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa inovasi *Delivery Service* Akta Kelahiran belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat Kota Bandung. Padahal secara konseptual inovasi *Delivery Service* akta kelahiran dilaksanakan untuk mempermudah masyarakat Kota Bandung memiliki akta kelahiran. Terdapat beberapa keuntungan apabila masyarakat Kota Bandung menggunakan pelayanan *Delivery Service* akta kelahiran. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sonny Gantira menambahkan bahwa dengan adanya pelayanan *Delivery Service* ini, masyarakat Kota Bandung sudah diberikan kemudahan untuk mendapatkan akta kelahiran, tidak harus datang dan mengantri kembali di Disdukcapil Kota Bandung untuk memperoleh akta kelahiran yang telah selesai. Bapak Sonny menambahkan bahwa cukup dengan menuliskan alamat tujuan maka akta kelahiran akan dikirim. Biaya pengiriman akta kelahiran gratis, karena dalam proses pengiriman akta kelahiran Disdukcapil Kota Bandung menjalin kerja sama dengan PT Pos.

Tabel 1.13

Kelebihan Model Inovasi *Delivery Service* Akta Kelahiran Di Kota Bandung

No	Uraian
1)	Masyarakat tidak perlu datang dan mengantri di kantor Disdukcapil untuk mengambil akta kelahiran yang telah selesai di proses.
2)	Biaya pengiriman akta kelahiran gratis.
3)	Menghilangkan praktek pencaloan

Beberapa kelemahan lainnya yang teridentifikasi ketika inovasi *Delivery Service* Akta Kelahiran ini diaplikasikan beserta strategi pengembangannya akan diuraikan secara detail ke dalam delapan aspek, yaitu kebijakan/ komitmen pimpinan, sumber dana, kerjasama/kemitraan, metode sosialisasi, mekanisme pelaksanaan inovasi, SDM pelaksana, infrastruktur yang digunakan, dan aspek lainnya sebagai berikut.

Tabel 1.14
Kelemahan Dan Strategi Pengembangan Model Inovasi *Delivery Service* Akta Kelahiran

No.	Aspek	Kelemahan	Model Pengembangan Inovasi
1.	Kebijakan dan Komitmen Pimpinan	Pimpinan telah memiliki komitment untuk peningkatan pelayanan akta kelahiran.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Komitmen dari pimpinan (Walikota) sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan pelayanan <i>Delivery Service</i> akta kelahiran ini. ➤ Dalam implementasi inovasi pelayanan akta kelahiran ini, Disdukcapil dapat menerapkan kebijakan sepihak dalam pengiriman akta kelahiran. Apabila akta kelahiran telah selesai dibuat, Disdukcapil dapat melakukan pengiriman tanpa mendapatkan persetujuan dari pihak pemohon. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang mengambil akta kelahirannya sendiri ke Disdukcapil.
2.	Sumber Dana	Sumber anggaran yang digunakan berasal dari APBD	Pengadaan perangko dan proses pengiriman akta kelahiran dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Ke depannya dapat dikembangkan kembali CSR dengan perusahaan lainnya, agar tidak memberatkan APBD.
3.	Kerjasama/Kemitraan	Adanya kendala dari PT Pos membuat pengiriman menjadi terhambat.	Pihak Disdukcapil, melalui Subbag Umum dan Kepegawaian harus

No.	Aspek	Kelemahan	Model Pengembangan Inovasi
		Masyarakat pemohon yang telah dijanjikan akan mendapatkan akta kelahiran kurang dari 10 hari akan mendatangi kantor Disdukcapil apabila dalam kurun waktu tersebut belum mendapatkan akta kelahirannya.	selalu melakukan koordinasi dengan PT Pos, guna membahas permasalahan yang terjadi dalam pengiriman akta kelahiran.
4.	Metode Sosialisasi	Minimnya informasi terkait <i>Delivery Service</i>	Disdukcapil dapat melakukan sosialisasi inovasi <i>Delivery Service</i> akta kelahiran ini kepada seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai media, namun tentunya metode sosialisasi disesuaikan dengan segmen yang akan dituju.
5.	Mekanisme Pelaksanaan Inovasi	Masyarakat cukup menuliskan alamat pengiriman akta kelahiran pada form yang telah disediakan. Form ini nantinya akan ditempel pada amplop yang akan dikirim beserta akta kelahirannya.	Form untuk penulisan nama dan alamat yang dituju sebagai penerima berkas akta kelahiran tersebut seharusnya tersedia pada aplikasi akta kelahiran <i>online</i> maupun jemput bola (mepeling).
6.	SDM Pelaksana	Terbatasnya SDM menyebabkan tidak adanya petugas yang menuliskan/mengetikkan kembali alamat yang ditulis pemohon, sehingga form yang dituliskan pemohon langsung ditempel pada amplop pengiriman, kecuali ketika terdapat mahasiswa/siswa SMK yang sedang melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL)	Dengan adanya inovasi <i>Delivery Service</i> ini tidak dibutuhkan kembali petugas untuk menuliskan nama dan alamat yang dituju, karena form untuk penulisan nama dan alamat sebagai penerima berkas akta kelahiran tersebut hendaknya tersedia pada inovasi akta kelahiran

No.	Aspek	Kelemahan	Model Pengembangan Inovasi
7.	Infrastruktur yang digunakan	-	<p>Untuk pelayanan <i>Delivery Service</i> akta kelahiran ini tidak dibutuhkan sarana dan prasarana khusus, karena proses pengiriman akta kelahiran dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Namun, apabila jasa pengiriman yang dilakukan melalui jasa kurir bermotor, maka tentunya perlu dipikirkan kembali terkait pengadaan sarana transportasi untuk <i>Delivery Service</i> ini yang tentunya akan tergantung pada APBD yang tersedia</p> <p>Untuk pelayanan <i>Delivery Service</i> akta kelahiran ini tidak dibutuhkan sarana dan prasarana khusus.</p>
8.	Lainnya	<p>Tingkat kepercayaan masyarakat pemohon akta kelahiran yang masih rendah terhadap inovasi <i>Delivery Service</i> akta kelahiran menyebabkan sebagian besar warga menolak untuk diantarkan langsung ke rumah. Hal ini menyebabkan persentase pengguna inovasi ini sangat rendah.</p>	<p>Walaupun Disdukcapil telah melakukan sosialisasi inovasi <i>Delivery Service</i> akta kelahiran dengan menggunakan berbagai macam media komunikasi (tulis, lisan, audio, visual elektronik maupun non elektronik), namun kurang mendapat respon dari masyarakat.</p> <p>Adanya respon yang rendah dari masyarakat ini bisa terjadi karena teknik komunikasi, sarana prasarana</p>

No.	Aspek	Kelemahan	Model Pengembangan Inovasi
			<p>yang digunakan, waktu serta target responden yang dituju tidak tepat sasaran.</p> <p>Dengan mempertimbangkan heterogenitas masyarakat Kota Bandung, maka teknik komunikasi, sarana prasarana yang digunakan, serta waktu penyampaian agar ditinjau kembali.</p>

Sumber: diolah peneliti

4 Prasyarat Dan Karakteristik Daerah Yang Ingin Mereplikasi Inovasi Akta Kelahiran

Secara umum, strategi pembangunan Kota Bandung yang dicanangkan oleh Walikota Bandung, Ridwan Kamil didasarkan pada Segitiga Manajemen yang terdiri dari desentralisasi, inovasi dan kolaborasi. Desentralisasi yang dimaksud adalah adanya distribusi kewenangan dari Walikota ke Lurah, RT/RW, dan lembaga pemberdayaan masyarakat lainnya. Sementara inovasi yang dimaksud adalah upaya untuk mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik, menjadi lebih santun, tertib dan bahagia serta didukung oleh *leadership* dan tata kelola yang baik. Sedangkan prinsip manajemen yang ketiga adalah kolaborasi dengan berbagai pihak, karena anggaran yang berasal dari APBD terbatas untuk mengakomodir semua kebutuhan.

Ketiga prinsip manajemen tersebut berusaha dijalankan oleh Disdukcapil Kota Bandung demi meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, yang salah satunya terkait pelayanan akta kelahiran. Ketiga inovasi pelayanan akta kelahiran yang telah diuraikan sebelumnya, dilakukan untuk meningkatkan percepatan kepemilikan akta kelahiran penduduk Kota Bandung serta pelayanan kependudukan menuju tata kelola yang lebih baik. Berbagai inovasi yang telah dilakukan oleh Disdukcapil Kota Bandung ini mendapatkan apresiasi dari sebagian pihak masyarakat, karena dinilai telah memberikan kemudahan bagi penduduk Kota Bandung dalam hal pembuatan akta kelahiran. Tentunya inovasi yang sudah ada di suatu daerah, dapat dijadikan contoh/dapat direplikasi oleh pemerintah di daerah lain yang belum melakukan inovasi dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukannya, terutama pelayanan akta kelahiran.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada prinsipnya sebuah inovasi dapat direplikasi oleh daerah lain. Untuk mereplikasi inovasi dari daerah lain, daerah dapat menyesuaikan beberapa hal seperti mendesain ulang inovasi, memodifikasi, uji terap inovasi serta memberikan pelatihan kepada pegawainya (LAN, 2014). Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti telah menentukan berbagai prasyarat yang harus dimiliki serta karakteristik daerah yang dapat mereplikasi inovasi akta kelahiran yang terdapat di Kota Bandung. Prasyarat dan karakteristik daerah yang harusnya dimiliki, sebaiknya adalah:

- Daerah yang memiliki masyarakat yang responsif terhadap perubahan
- Daerah yang sebagian besar masyarakatnya familiar dengan perkembangan teknologi, seperti *smart phone*, *gadget*, *internet*, dan lainnya.
- Daerah yang memiliki dukungan APBD yang memadai untuk penyediaan sarana prasarana dan kebutuhan lainnya
- Daerah yang memiliki SDM yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas
- Daerah yang memiliki dukungan dan komitmen yang kuat dari para pemimpinnya, yang dapat dituangkan dalam berbagai bentuk kebijakan untuk menjamin keberlangsungan inovasi yang ada

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Disdukcapil Kota Bandung memiliki tiga inovasi pelayanan akta kelahiran yang terdiri dari akta kelahiran online, inovasi Mepeling (istilah lain adalah jemput bola) dan inovasi Delivery Service akta kelahiran. Inovasi Akta Kelahiran Online adalah inovasi pemrosesan akta kelahiran cukup dengan mengakses website resmi *disdukcapil.bandung.go.id* atau *aktaonline.bandung.go.id*. untuk mendaftar dan mendapatkan akta kelahiran secara online. Sementara inovasi Mepeling merupakan inovasi untuk memberikan pelayanan dengan sistem “jemput bola” kepada masyarakat dengan berkeliling ke tempat-tempat yang telah ditentukan seperti kecamatan-kecamatan, sekolah-sekolah ataupun tempat-tempat umum di wilayah kota Bandung. Sistem jemput bola ini juga bekerja sama dengan pihak rumah sakit, sehingga setiap ada kelahiran Disdukcapil akan langsung membuatkan akta kelahiran. Sedangkan inovasi Delivery Service Akta Kelahiran adalah Inovasi pelayanan akta kelahiran yang bekerja sama dengan PT.Pos Indonesia dan Bank Jabar Banten, sehingga warga yang telah mendaftar dapat pulang dan menunggu di rumah, karena akta kelahiran yang sudah selesai akan diantarkan ke rumah warga.

Ketiga inovasi tersebut pada dasarnya memiliki dua tujuan utama yaitu untuk meningkatkan jumlah kepemilikan akta kelahiran penduduk di Kota Bandung dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Berdasarkan data yang diperoleh, peningkatan jumlah kepemilikan akta kelahiran di Kota Bandung, terhitung mulai tahun 2014 hingga di bulan agustus 2016 menunjukkan trend peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sugiharto, hal tersebut dapat terjadi karena dua kemungkinan. Pertama, dikarenakan kesadaran masyarakat yang meningkat terkait pentingnya kepemilikan akta kelahiran. Dan, yang kedua terjadi karena keberhasilan ketiga inovasi yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Bandung. Sementara, dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, berdasarkan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2014 dan 2015, Disdukcapil Kota Bandung memperoleh nilai B, yang menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Disdukcapil Kota Bandung termasuk dalam kategori Baik.

Namun, dalam hal pemanfaatannya, ketiga inovasi pelayanan akta kelahiran tersebut dapat dikatakan belum berjalan optimal. Respon yang diberikan masyarakat pun berbeda-beda terhadap ketiga inovasi tersebut. Respon yang cukup besar diberikan masyarakat untuk inovasi Mepeling. Hal ini ditandai dengan jumlah pemohon yang signifikan setiap kali Mobil Mepeling beroperasi. Berbeda dengan inovasi Mepeling yang mendapatkan respon cukup baik dari masyarakat Kota Bandung, pelayanan akta kelahiran online dan Delivery Service akta kelahiran kurang mendapatkan respon yang signifikan. Pemohon akta kelahiran online jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah pemohon akta kelahiran setiap harinya. Dari 150 hingga 200 pemohon, masyarakat Kota Bandung yang menggunakan akta kelahiran online tidak mencapai 10 orang. Sementara untuk inovasi Delivery Service akta kelahiran, dari 5.500 akta kelahiran yang diterbitkan dalam waktu satu setengah bulan, hanya sekitar 117 akta yang dikirim melalui pelayanan Delivery Service. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sekitar 2%

masyarakat pemohon akta kelahiran yang memanfaatkan pelayanan Delivery Service ini. Sembilan puluh delapan persen sisanya diambil sendiri oleh pemohon.

Sedangkan, dalam implementasinya, ketiga inovasi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan yang ditawarkan inovasi akta online, Mepeling dan delivery service adalah masyarakat Kota Bandung tidak perlu datang langsung ke kantor Disdukcapil untuk mengajukan proses pembuatan akta kelahiran. Melalui inovasi akta online, masyarakat dapat mengajukan semua proses permohonan akta kelahiran secara online melalui website maupun smartphone. Sementara, untuk inovasi Mepeling, masyarakat cukup mengisi formulir permohonan, kemudian menyerahkan persyaratan kepada petugas mepeling. Untuk akta kelahiran yang sudah selesai dibuat, maka warga dapat menunggu di rumah, karena akta kelahiran akan diantarkan langsung ke rumah warga melalui inovasi delivery service.

Namun, disamping kelebihan yang dimiliki, pemanfaatan ketiga inovasi Respon masyarakat yang belum optimal dalam memanfaatkan inovasi yang ada, pada dasarnya karena terkendala berbagai aspek, dimana pada setiap aspeknya, terdapat pula berbagai kelemahan. Untuk akta online, dikarenakan respon masyarakat Kota Bandung yang masih rendah untuk pemanfaatan akta kelahiran online ini, sehingga belum tersedia petugas Disdukcapil yang secara khusus bertugas menangani berbagai permasalahan pelayanan akta kelahiran online. Selain itu, sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan akta kelahiran online masih belum optimal. Hal ini terbukti dari belum adanya server khusus yang menampung database akta kelahiran online dan jaringan internet yang masih kurang memadai, yaitu masih menggunakan 6 MBps. Selain itu, kendala yang dihadapi dalam implementasi akta online ini dikarenakan akta kelahiran online baru sebatas melayani perihal pendaftaran saja, namun pengiriman berkas persyaratan harus tetap dilakukan langsung ke kantor Disdukcapil. Hal ini terjadi karena sistem aplikasi akta kelahiran online belum berjalan sebagaimana mestinya.

Sementara, untuk inovasi Mepeling, dengan adanya mobil keliling yang mendatangi kecamatan, rumah sakit, ataupun sekolah-sekolah dalam rangka jemput bola pelayanan akta kelahiran, masyarakat telah diberikan kemudahan dengan cukup mendatangi mobil keliling tersebut, dan mengisi formulir permohonan, kemudian menyerahkan persyaratan kepada petugas mepeling tersebut. Dengan Mepeling, masyarakat dapat menentukan ke lokasi mana yang paling mudah dijangkau untuk pembuatan akta kelahiran. Namun, pelayanan akta kelahiran menggunakan mobil keliling ini belum maksimal dikarenakan beberapa kendala dalam melakukan pelayanan tersebut. Beberapa kendala yang dialami diantaranya adalah terbatasnya jumlah mobil yang tersedia, dan jumlah petugas yang melayani. Dari satu mobil yang akan melakukan pelayanan keliling, dibutuhkan lima orang petugas. Dikarenakan petugas yang melayani jemput bola merupakan petugas front office yang melayani masyarakat di Disdukcapil, sehingga dengan melakukan Jemput Bola, terdapat berbagai pekerjaan yang terhambat, seperti verifikasi persyaratan menjadi terhambat. Sehingga dengan terbatasnya sarana prasarana dan SDM ini, maka kegiatan pelayanan Jemput Bola ini dilakukan satu minggu satu kali atau dua minggu satu kali, bahkan dilakukan satu bulan satu kali. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah SDM yang tersedia dan sudah barang tentu anggaran yang tersedia.

Pelayanan Jemput Bola (Mepeling) yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Bandung pun belum memiliki jadwal pelayanan yang tetap. Sehingga masyarakat Kota Bandung tidak bisa mengetahui dimana mobil keliling ini berada apabila sedang beroperasi. Akibatnya masyarakat tidak mengetahui keberadaan mobil keliling selanjutnya. Seperti yang diakui oleh salah satu pemohon, yang tidak menyebutkan namanya, bahwa mobil keliling hanya beroperasi satu hari di kecamatannya, dan hari berikutnya sudah tidak ada. Selanjutnya Sekretaris Disdukcapil, Ibu Uum Sumiati menjelaskan bahwa hingga penelitian ini dilakukan, jumlah mobil keliling yang tersedia berjumlah satu buah, sehingga pelayanan jemput bola yang dilakukan Disdukcapil belum mampu menjangkau seluruh wilayah Kota Bandung. Rencana pengadaan enam buah mobil keliling tengah dilakukan. Hal ini dilakukan agar pelayanan jemput bola (Mepeling) ini dapat dilakukan dengan maksimal.

Sedangkan, kemudahan yang diberikan oleh inovasi Delivery Service, belum dimanfaatkan secara optimal oleh sebagian masyarakat Kota Bandung. Hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat masih banyak yang menolak untuk mendapatkan pelayanan ini. Minimnya informasi mengenai Delivery Service mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat akan inovasi ini menjadi rendah. Sehingga mereka menginginkan untuk mengambil sendiri akta kelahirannya atau melalui jasa kurir. Kelemahan lainnya yang diakui oleh Sekretaris Disdukcapil, Ibu Uum Sumiati adalah bahwa terbatasnya petugas front office di Disdukcapil menyebabkan tidak adanya petugas yang menuliskan/mengetikkan kembali alamat yang ditulis pemohon. Hal ini menyebabkan form yang sudah dituliskan pemohon langsung ditempel pada amplop pengiriman, kecuali ketika terdapat mahasiswa/siswa SMK yang sedang melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL), siswa/mahasiswa itulah yang mengetikkan alamat yang telah ditulis pemohon. Selain itu, kendala lain berasal dari PT Pos sebagai partner Disdukcapil dalam pelayanan ini. Dengan adanya kendala di PT Pos mengakibatkan akta kelahiran yang seharusnya dapat selesai dan sampai di tangan pemohon maksimal selama 10 hari, menjadi terlambat. Akibatnya beberapa masyarakat pemohon mengeluhkan hal tersebut dengan mendatangi ke kantor Disdukcapil.

2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka kami memberikan rekomendasi terkait strategi pengembangan model inovasi pelayanan akta kelahiran di Disdukcapil Kota Bandung ke dalam beberapa aspek. Berikut diuraikan secara lebih terperinci.

1. Kebijakan dan Komitmen Pimpinan

- ⊕ Komitmen dari pimpinan (Walikota) sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan ketiga inovasi pelayanan akta kelahiran ini.
- ⊕ Dalam implementasi inovasi pelayanan akta kelahiran *Delivery Service*, Disdukcapil dapat menerapkan kebijakan sepihak dalam pengiriman akta kelahiran. Apabila akta kelahiran telah selesai dibuat, Disdukcapil dapat melakukan pengiriman tanpa mendapatkan persetujuan dari pihak pemohon. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang mengambil akta kelahirannya sendiri ke Disdukcapil

2. Sumber Dana

- ⊕ Selain menggunakan APBD, sebaiknya pihak Disdukcapil berusaha mendapatkan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bandung. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban APBD dan juga untuk menjalin kemitraan dengan *stakeholder*.
- ⊕ Untuk inovasi *delivery service*, pengadaan perangko dan proses pengiriman akta kelahiran dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Ke depannya dapat dikembangkan kembali CSR dengan perusahaan lainnya, agar tidak memberatkan APBD

3. Kerjasama/Kemitraan

- ⊕ Disdukcapil dapat melakukan kerjasama dalam hal penyediaan jaringan internet, misalnya dengan PT Telkom untuk keberlangsungan inovasi akta *online*
- ⊕ Pengadaan mobil Mepeling tentunya memiliki anggaran yang besar. Selain menggunakan APBD, sebaiknya pihak Disdukcapil berusaha mendapatkan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bandung. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban APBD dan juga untuk menjalin kemitraan dengan *stakeholder*.
- ⊕ Pihak Disdukcapil, melalui Subbag Umum dan Kepegawaian harus selalu melakukan koordinasi dengan PT Pos, guna membahas permasalahan yang terjadi dalam *delivery service* akta kelahiran.

4. Metode Sosialisasi

- ⊕ Disdukcapil harus menentukan lapisan masyarakat mana yang akan menjadi target utama dalam pelayanan akta kelahiran, baik untuk inovasi akta *online*, Mepeling maupun untuk *delivery service*. Dengan adanya target, Disdukcapil dapat menentukan strategi dalam sosialisasi inovasi pelayanan akta kelahiran tersebut.
- ⊕ Target masyarakat yang akan dituju untuk pelayanan akta kelahiran *online* adalah masyarakat yang 'melek' internet, dan 'tidak gaptek'. Lapisan masyarakat yang memiliki kedua karakter ini adalah lapisan masyarakat yang masih muda, mahasiswa/mahasiswi, para pelajar. Disdukcapil dapat melakukan sosialisasi ke sekolah /kampus dengan harapan siswa tersebut akan menyampaikan kepada orang tua atau orang disekitar mereka.
- ⊕ Target masyarakat yang akan dituju untuk pelayanan Jemput Bola/Mepeling ini adalah masyarakat yang berada di daerah yang jauh dari Disdukcapil atau masyarakat yang sedang berada di klinik bersalin/rumah sakit. Disdukcapil dapat melakukan sosialisasi ke tempat-tempat tersebut dengan harapan masyarakat tersebut akan menyampaikannya kepada orang disekitar mereka.
- ⊕ Disdukcapil sebaiknya memiliki jadwal operasi mobil Mepeling secara teratur. Meskipun belum dapat beroperasi setiap harinya, namun dengan adanya jadwal rutin dimana mobil Mepeling akan beroperasi, masyarakat dapat memiliki waktu untuk mempersiapkan berkas dan persyaratan ketika ingin membuat akta kelahiran melalui inovasi Mepeling ini. Selain itu,

masyarakat akan memperkirakan lokasi Mepeling mana yang lebih mudah untuk dijangkau.

- ⊕ Dengan jadwal yang tetap dan terorganisir dengan baik, pihak Disdukcapil kota Bandung sebaiknya menginformasikan jadwal dan lokasi dimana Mepeling berada tidak hanya melalui media social saja, namun dapat dilakukan melalui berbagai macam media baik audio, visual, maupun audio visual seperti media massa (cetak), media elektronik (radio, televisi)

5. Mekanisme Pelaksanaan Inovasi

- ⊕ Bagi pemohon akta online, dengan hanya melakukan pendaftaran melalui *online* saja dan proses pengiriman berkas tetap harus dilakukan di kantor Disdukcapil menjadikan masyarakat yang akan melakukan permohonan akta kelahiran *online* bekerja dua kali. Proses ini kurang efektif, karena pemohon harus melakukan registrasi *online* di tempat lain (rumah, kantor, atau warung internet), dan pemohon juga harus datang ke kantor Disdukcapil untuk melakukan penyerahan berkas persyaratan.
- ⊕ Dengan adanya pelayanan akta kelahiran *online*, diharapkan segala prosesnya dilakukan secara *online* pula, artinya apabila ditemukan kekurangan data, dapat diinformasikan secara *online* (interaksi antara petugas dan pemohon dilakukan secara *online*).
- ⊕ Apabila akta kelahiran yang dibuat secara *online* telah selesai, pengiriman berkas dapat dilakukan melalui pelayanan *Delivery Service*.
- ⊕ Disdukcapil hendaknya menyediakan *customer care* yang berfungsi sebagai admin/operator yang akan menampung segala macam pertanyaan, saran, masukan dan keluhan dari masyarakat.

6. SDM Pelaksana

- ⊕ Disdukcapil hendaknya menyiapkan SDM khusus yang bertugas untuk menangani pelayanan akta kelahiran *online*, Mepeling maupun *delivery service*, tidak digabung dengan petugas pelayanan akte kelahiran konvensional. Apabila petugas khusus mepeling telah tersedia, dapat juga dilakukan proses pergantian petugas. Misalnya, pada minggu pertama, lima orang petugas keluar untuk melakukan pelayanan mepeling, pada minggu kedua lima orang tersebut melakukan pelayanan di kantor Disdukcapil

7. Infrastruktur yang digunakan

- ⊕ Untuk pelayanan akta online, Disdukcapil harus menyediakan server khusus untuk pelayanan akta kelahiran *online*, atau kapasitas server harus diperbesar. Jaringan internet yang diperlukan oleh Disdukcapil adalah sebanyak 15 MBps. Untuk memperoleh dukungan internet yang lebih besar tersebut, Disdukcapil dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bandung.
- ⊕ Untuk pelayanan inovasi Mepeling, Disdukcapil telah melakukan pengadaan kendaraan khusus untuk operasional jemput bola/mepeling yang berjumlah enam buah, dan hingga September 2016 proses lelang masih dilakukan. Lamanya proses pengadaan barang hendaknya disesuaikan

dengan jumlah hari yang telah tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional yaitu 90 hari kalender.

- ⊕ Untuk pelayanan *Delivery Service* akta kelahiran ini tidak dibutuhkan sarana dan prasarana khusus, karena proses pengiriman akta kelahiran dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Namun, apabila jasa pengiriman yang dilakukan melalui jasa kurir bermotor, maka tentunya perlu dipikirkan kembali terkait pengadaan sarana transportasi untuk *Delivery Service* ini yang tentunya akan tergantung pada APBD yang tersedia
- ⊕ Untuk pemohon akta kelahiran *online* yang tidak memiliki sarana *smart phone (gadget)*, komputer atau pun internet, strategi yang dapat dilakukan oleh Disdukcapil adalah dengan memaksimalkan pelayanan mobil keliling Mepeling.
- ⊕ Form untuk penulisan nama dan alamat yang dituju sebagai penerima berkas akta kelahiran tersebut seharusnya tersedia pada aplikasi akta kelahiran *online* maupun jemput bola (mepeling).

8. Aspek Lainnya

- ⊕ Dengan adanya akta kelahiran *online*, Disdukcapil dapat memberikan pembatasan (kuota) untuk pelayanan akta kelahiran langsung ke Disdukcapil. Dengan demikian, diharapkan masyarakat pemohon akta kelahiran kan memanfaatkan pelayanan akta kelahiran *online* maupun Mepeling.
- ⊕ Walaupun Disdukcapil telah melakukan sosialisasi inovasi *Delivery Service* akta kelahiran dengan menggunakan berbagai macam media komunikasi (tulis, lisan, audio, visual elektronik maupun non elektronik), namun kurang mendapat respon dari masyarakat.
- ⊕ Adanya respon yang rendah dari masyarakat ini bisa terjadi karena teknik komunikasi, sarana prasarana yang digunakan, waktu serta target responden yang dituju tidak tepat sasaran.
- ⊕ Dengan mempertimbangkan heterogenitas masyarakat Kota Bandung, maka teknik komunikasi, sarana prasarana yang digunakan, serta waktu penyampaian agar ditinjau kembali

Sementara bagi pemerintah yang ingin mereplikasi ketiga inovasi akta pelayanan akta kelahiran yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Bandung, sebaiknya dapat memenuhi beberapa aspek yang telah diuraikan di atas berdasarkan rekomendasi strategi pengembangan model inovasi pelayanan akta kelahiran yang telah dituliskan. Berikut kami uraikan prasyarat dan karakteristik daerah jika ingin mereplikasi inovasi pelayanan akta kelahiran yang ada di Kota Bandung.

- Daerah yang memiliki masyarakat yang responsif terhadap perubahan
- Daerah yang sebagian besar masyarakatnya familiar dengan perkembangan teknologi, seperti *smart phone, gadget, internet*, dan lainnya.
- Daerah yang memiliki dukungan APBD yang memadai untuk penyediaan sarana prasarana dan kebutuhan lainnya
- Daerah yang memiliki SDM yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas

- Daerah yang memiliki dukungan dan komitmen yang kuat dari para pemimpinnya, yang dapat dituangkan dalam berbagai bentuk kebijakan untuk menjamin keberlangsungan inovasi yang ada.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Akta Kelahiran Online di Kota Bandung*, www.m.tempo.co di akses pada tanggal 7 September 2016
- Ancok, Djamiludin. (2012). *Kepemimpinan dan Inovasi*. Penerbit Erlangga.
- Aqsa, Alghiffari. (). *Kajian Singkat UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*,<https://alghif.wordpress.com/2012/03/31/kajian-singkat-uu-no-23-tahun-2006-tentang-administrasi-kependudukan-terkait-akta-kelahiran/> diakses pada tanggal 2 September 2016
- Fuadona, Farah. (2016). *Maksimalkan Pelayanan Disdukcapil Kota Bandung Kirim Dokumen via Kurir*, <http://bandung.merdeka.com/halo-bandung/maksimalkan-pelayanan-disdukcapil-kota-bandung-kirim-dokumen-via-kurir-1604140.html>,diakses pada tanggal 14 Juni 2016
- Hardiansyah .(2011). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hidayat, Feriawan. (2015). *Program "Lahir Procot Pulang Bawa Akta" Banyuwangi Raih Penghargaan dari JK*, <http://www.beritasatu.com/nasional/269846-program-lahir-procot-pulang-bawa-akta-banyuwangi-raih-penghargaan-dari-jk.html> diakses pada tanggal 29 September 2016
- Hukum Online. (2016). *Terabaikan, 50 Juta Anak Indonesia Tidak Memiliki Akta Kelahiran*,<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5792447bd5551/terabaikan--50-juta-anak-indonesia-tidak-memiliki-akta-kelahiran> diakses pada tanggal 2 Oktober 2016
- Imanuddin, Muhammad. (2015). *Disertasi : Inovasi Pelayanan Publik :Percepatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*.** <http://sinovik.menpan.go.id/index.php/site/article/223> diakses pada tanggal 29 September 2016.
- Inovasi Jemput Bola di Kota Bandung*, www.bedanews.com diakses pada tanggal 7 September 2016
- Inovasi pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul* <http://dukcapil.gunungkidul.kab.go.id/inovasi-pelayanan-di-dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-kabupaten-gunungkidul/>,diakses pada tanggal 2 September 2016
- Miftah. (2016). *Bandung Menjawab*. <http://portal.bandung.go.id/bandung-menjawab-disdukcapil> diakses pada tanggal 14 juni 2016
- Napitupulu, Paimin. (2007). *Pelayanan Publik dan Customer Satisfaction*, Bandung: Alumni
- Ndraha.(2000). *Ilmu Pemerintahan (kybernetology)*, Rineka Cipta : Jakarta
- Nugroho. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik* <http://nugrohodidik.blogspot.co.id/2012/12/implementasi-kebijakan-publik.html> diakses pada tanggal 21 September 2016
- Pasolong, Harbani. (2010). *Teori Administrasi Publik* , Bandung: Alfabeta.

- Prasetya, Bonny. (2015). *Workshop Kepemimpinan dan Inovasi Pemda Provinsi Bangka Belitung*. <http://bkd.babelprov.go.id/content/pejabat-eselon-ii-iii-pemprov-babel-ikuti-workshop-kepemimpinan-translate> diakses pada tanggal 29 September 2016.
- Purwanto dan Sulistyastuti, (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi di Indonesia*, JKMP-MAP. Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
- Rasyid. (2000). *Makna Pemerintahan*, Jakarta : Yarsif Watampone.
- Rizki Dwi Satrio, et al .*Jurnal Administrasi Publik VOL 3 No 11 : Inovasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*, Malang : Universitas Brawijaya
- Said, M. Mas'ud. (2007). *Birokrasi di Negara Birokratus*, Malang : UMM Press
- Subarsono, AG. (2011). *Analisis kebijakan Publik : Konsep. Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, CV. Alfabeta: Bandung.
- Susanto. (2010). *60 Management Gems*, Jakarta : Kompas.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: AIPPI
- Winarno, Budi. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service (CAPS).

Peraturan dan Perundang-undangan

- Undang Undang Dasar 1945
- Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Walikota Bandung No. 001 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- Peraturan Walikota Bandung No. 1338 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung
- Permendagri No 9 tahun 2016 tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran
- Perppenpan RB 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Pub

MODEL INOVASI “WISATA BUKU SAHABAT ANAK” DALAM RANGKA MENINGKATKAN MINAT BACA MASYARAKAT KABUPATEN CIAMIS

Oleh:
Krismiyati Tasrin & Pratiwi

A. Latar Belakang

“Any book that helps a child to form a habit of reading, to make reading one of his deep and continuing needs, is good for him”. (Buku apapun yang membantu anak-anak untuk membentuk kebiasaan membaca, untuk terus memenuhi kebutuhannya, adalah baik untuknya). Kutipan dari Maya Angelou, seorang pejuang hak-hak sipil di Amerika Serikat tersebut sangat menggambarkan pentingnya menanamkan kebiasaan membaca pada anak sejak dini. Hal ini penting mengingat begitu banyaknya manfaat yang diperoleh dari kebiasaan membaca (*benefits of reading*). Beberapa manfaat tersebut di antaranya dengan membaca dapat mengembangkan pikiran (*develops mind*), memberikan kepuasan (*gives satisfaction*), mengembangkan imajinasi (*expands the imagination*), menemukan hal-hal baru (*discover new things*), meningkatkan kemampuan untuk fokus (*enhances the ability to focus*), meningkatkan pengetahuan (*improves knowledge*), dan lain-lain. Seadatee-Shamir, A dan Siavoshi, Z (2014) dan Owusu-Acheaw, Micheal (2014) menyebutkan bahwa membaca dapat meningkatkan potensi anak baik akademis dan non-akademis.

Beberapa hasil survei dan penelitian menyatakan bahwa minat baca di Indonesia secara umum masih tergolong rendah. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan mengingat tinggi rendahnya minat baca akan mempengaruhi kehidupan seseorang dan bahkan kemajuan suatu bangsa. Itulah mengapa gerakan peningkatan minat baca sering dikampanyekan oleh banyak pihak dan menjadi agenda utama setiap tahun dari perpustakaan daerah dan perpustakaan nasional. Ini tidak lain disebabkan karena membaca dapat memberikan banyak manfaat, salah satunya meningkatkan pengetahuan dan wawasan.

Salah satu cara untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang maju di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi adalah menjadikan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang gemar membaca terutama bagi kelompok anak usia sekolah. Pengembangan budaya membaca anak usia sekolah ini tentunya bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja melainkan tanggung jawab bersama, dan dapat dilakukan melalui berbagai jalur, baik jalur lingkungan rumah/keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat.

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang menaruh perhatian (*concern*) cukup besar pada persoalan minat baca masyarakat terutama kelompok anak usia sekolah. Dilatar belakangi oleh minimnya angka kunjungan ke perpustakaan daerah, Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (Kaperpusipda), sejak Tahun 2015 mulai menggulirkan sebuah program dalam rangka peningkatan minat baca anak yaitu “Wisata Buku Sahabat Anak (WBSA)”. Dilihat dari 8 kriteria inovasi LAN, program ini dapat dikategorikan sebagai *inovasi* karena program ini memenuhi *unsur kebaharuan*. Jika dibandingkan dengan program di bidang perpustakaan lainnya yang kurang bersifat partisipatif dan lebih banyak terfokus pada upaya penyediaan

infrastruktur, pembaruan sistem informasi, promosi melalui media cetak dan elektronik, program ini merupakan program yang berbeda. Perbedaan itu terletak pada pembangunan jejaring (*networking*) yang melibatkan mitra eksternal Kaperpusipda Kabupaten Ciamis. Selain itu, keunikan program ini juga terletak pada subjek yang menjadi kelompok sasaran yakni kelompok usia sekolah dasar. Kelompok sasaran ini dinilai paling tepat untuk menanamkan minat baca sejak dini.

Berkaitan dengan hal tersebut, selanjutnya penelitian ini bermaksud untuk menyusun Model Inovasi "Wisata Buku Sahabat Anak" dalam rangka meningkatkan minat baca anak di Kabupaten Ciamis. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan masukan/rekomendasi pengembangan inovasi WBSA untuk kedepannya baik untuk implementasi inovasi di Kabupaten Ciamis maupun apabila inovasi tersebut akan direplikasi untuk diterapkan di daerah lain.

Untuk itu, tulisan ini akan disajikan dalam struktur penulisan sebagai berikut: 1) *Latar Belakang* yang menjelaskan mengenai urgensi dilakukannya penelitian; 2) *Positioning Kajian* ini diantara kajian/penelitian yang ada sebelumnya; 3) *Metodologi Penelitian*, 4) *Model Inovasi "Wisata Buku Sahabat Anak"* Kabupaten Ciamis yang terdiri dari penjelasan mengenai latar belakang inisiasi inovasi, stakeholders dan perannya dalam implementasi inovasi, langkah-langkah implementasi inovasi, sumber daya yang diperlukan dalam rangka implementasi inovasi, dampak/kemanfaatan program inovasi, prasyarat implementasi inovasi, serta kelemahan/kekurangan inovasi; 5) *Rekomendasi Model Pengembangan inovasi "Wisata Buku Sahabat Anak"* yang secara rinci akan menjelaskan mengenai deskripsi model pengembangan inovasi, konsepsi desain model inovasi pengembangan, stakeholders yang terlibat, sumber daya yang diperlukan, potensi kendala yang mungkin timbul dan langkah antisipasinya; 6) *Kesimpulan* yang berisi penjelasan mengenai alur perubahan model inovasi *Wisata Buku Sahabat Anak* dari hasil inisiasi awal sampai model pengembangan yang direkomendasikan. Selain itu, bagian akhir ini juga menjelaskan mengenai potensi replikasi model pengembangan inovasi peningkatan minat baca anak untuk penerapan di daerah lain.

B. Positioning Penelitian Diantara Penelitian Sejenis Yang Ada Sebelumnya

Penelitian-penelitian tentang inovasi peningkatan budaya baca pernah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Penelitian Nurita (2010) menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran inkuiri kontekstual dapat meningkatkan hasil belajar, keaktifan belajar, dan minat baca siswa. Dalam penelitian tersebut masih ada 4 siswa (18%) yang belum mencapai ketuntasan individu. Hasil penelitian menyarankan agar hal ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh penelitian lain agar mengoptimalkan kegiatan serupa sehingga ketuntasan belajar klasikalnya dapat mencapai 100%. Keberhasilan penerapan pembelajaran inkuiri kontekstual ini dapat diterapkan pada penelitian lain sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan sehingga menjadi lebih baik. Meski demikian, penelitian ini tidak menjabarkan prasyarat model, kelemahan dan konsep pengembangannya lebih lanjut.

Dua tahun setelahnya, Panduwati & Yudan Hermawan (2012) melakukan penelitian tentang model inovasi peningkatan minat baca di Rumah Sakit. Penelitian yang berjudul *PKM GT- Book Corner at Hospital sebagai Inovasi Model Perpustakaan*

Ruang Publik Menuju Masyarakat Cinta Baca tersebut menjabarkan mekanisme dan deskripsi inovasi pojok buku di rumah sakit. Inovasi ini dilakukan dengan menyediakan pojok buku bagi pasien dan keluarga pasien yang sedang menunggu atau dirawat. Tidak ada partisipasi dalam program tersebut yang diungkap, tidak ada pula prasyarat dan pengembangan inovasi yang dijabarkan dalam penelitian tersebut.

Penelitian yang lebih komprehensif dilakukan pada tahun 2013 oleh Juniawan Hidayanto. Penelitian ini membuktikan hasil bahwa ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Taman Bacaan Masyarakat di Ungaran dengan melakukan berbagai upaya yang antara lain dengan melakukan berbagai kegiatan literasi dan usaha kreatif. Pengembangan minat baca juga mengalami kendala sebagaimana diungkap penelitian ini yakni kurangnya pendampingan dan ruang atau tempat-tempat menyimpan buku yang kurang luas. Program taman bacaan masyarakat tersebut juga telah melakukan beberapa hal sebagai solusi yakni dengan melakukan berbagai kegiatan dan usaha produktif sehingga masyarakat lebih sering dan tidak canggung dalam menggunakan layanan TBM Area Publik. Simpulan dalam penelitian ini mengungkap bahwa keberhasilan tujuan Taman Bacaan Masyarakat Area Publik tergantung pada kegiatan partisipatif, kemitraan dan kinerja pengelola.

Selanjutnya, penelitian Ni M. Yudasmini, A.A.I.N. Marhaeni, Nyoman Jampel (2015) menjabarkan metode lain dalam peningkatan minat baca yakni *Cooperative Integrated Reading and Composition* (CIRC). CIRC merupakan pembelajaran yang muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi dengan temannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa aktivitas siswa dalam bentuk diskusi sangat menentukan keberhasilan siswa dalam memahami segala konsep dalam pembelajaran. Dalam bentuk kelompok kecil siswa saling membantu memecahkan masalah yang ada. Pemahaman siswa akan menjadi kuat karena siswa sendiri yang menemukannya melalui diskusi dari bahan bacaan yang telah mereka baca. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) terdapat perbedaan minat baca siswa yang mengikuti model pembelajaran CIRC dengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional pada siswa kelas VI di Sekolah Dasar Gugus Buruan, (2) terdapat perbedaan kemampuan memahami bacaan siswa yang mengikuti model pembelajaran CIRC dengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional pada siswa kelas VI di Sekolah Dasar Gugus Buruan, dan (3) terdapat perbedaan secara bersama-sama minat baca dan kemampuan memahami bacaan siswa yang mengikuti model pembelajaran CIRC dengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional pada siswa kelas VI di Sekolah Dasar Gugus Buruan.

Penelitian Frediyanto, D. (2012) menjabarkan faktor lain yang dapat meningkatkan minat baca. Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara fasilitas perpustakaan dan pelayanan perpustakaan terhadap minat baca pengunjung Perpustakaan Daerah Kabupaten Boyolali. Selain itu, minat baca juga dapat ditanamkan sejak dini dengan melakukan beberapa cara. Pembinaan minat baca pada usia dini akan lebih efektif bila orang tua berperan serta secara aktif dalam mendorong, membimbing anaknya untuk gemar membaca. Terkait dengan upaya pembangunan minat baca anak, Santoso, H., & Sos, S. (2008) menjelaskan bahwa upaya orang tua akan lebih optimal apabila terlebih dahulu anak dikenalkan dengan buku bergambar selain itu juga didukung oleh: (a) pihak penerbit buku (b) pihak

sekolah (c) pihak media massa (terutama radio/TV). Dalam keluarga miskin, keterlibatan orang tua menjadi berkurang karena orang tua mengalami stres tingkat tinggi, sehingga mereka kurang dapat meningkatkan minat membaca anak. Namun Sandjaja, S. (2001) menjelaskan bahwa apabila keluarga miskin mendapat dukungan sosial, maka mereka dapat mengatasi stres keluarga dan mau terlibat untuk menolong anak dalam membaca sehingga minat membaca anak juga meningkat.

Dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya sebagaimana dijelaskan di atas, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan design inovasi peningkatan minat baca yang diimplementasikan di Kabupaten Ciamis saja tetapi juga mencoba mengkritisi model inovasi yang ada dan menawarkan model inovasi pengembangan dalam rangka peningkatan minat baca yang melibatkan stakeholders yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan beberapa hasil penelitian tentang praktek terbaik penyelenggaraan inovasi di beberapa negara (Borins: 2000, Pattakos and Dundon: 2003, Kamarck: 2003, Pattakos and Dundon: 2003, Dunleavt: 2008, Homburg: 2008, Howard: 2012, Kalvet: 2012, Grydehøj, A.: 2013, Bender: 2015), yang menjelaskan bahwa kesuksesan dan keoptimalan pencapaian inovasi didukung oleh 15 aspek yakni: 1) *Partisipasi banyak stakeholder*; 2) *Visi yang jelas dan dirumuskan bersama oleh semua stakeholder*; 3) *Program inovasi yang kontekstual secara sosial dan budaya*; 4) *Kejelasan desain inovasi termasuk peran stakeholder yang jelas dan target capaian periodik*; 5) *Alokasi sumber daya yang jelas, sumber perolehan dan alokasinya*; 6) *Pengembangan kapasitas bagi stakeholder yang berpartisipasi melalui pelatihan atau pertukaran sumber daya*; 7) *Dasar hukum yang jelas dan mendukung dari pemimpin tertinggi*; 8) *Diseminasi inovasi melalui media social*; 9) *Kepemimpinan*; 10) *Pembangunan sistem informasi dalam rangka integrasi data dan percepatan prosedur pelayanan*; 11) *Transparansi dalam publikasi proses-proses inovasi, perolehan dan alokasi sumber daya*; 12) *Pengakuan dan penghargaan bagi tim yang inovatif*; 13) *Restrukturisasi industry*; 14) *Alih daya urusan pemerintah kepada swasta*; 15) *Inovasi terbuka dalam arti bahwa inovasi dapat dimulai dari stakeholder mana saja tidak hanya dari pemerintah*. Inovasi terbuka ini dapat diinisiasi dari pembentukan forum kerjasama dan pembangunan sistem informasi.

C. Metodologi Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (*casestudy*) dimana penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Di sini perlu dilakukan analisis secara tajam terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus tersebut sehingga akhirnya akan diperoleh kesimpulan yang akurat. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu objek tertentu dan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber.

Secara teoritis, penelitian *case study* dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*). Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Penelitian *case study* merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu dan hasil penelitian tersebut memberikan gambaran luas serta mendalam mengenai unit sosial tertentu. Tujuan lain dilakukannya studi

kasus adalah untuk mendapatkan pembelajaran tentang fenomena-fenomena khusus dan mendapatkan faktor-faktor yang menyebabkannya berdasarkan kekhasan lokus penelitian.

Fenomena yang menjadi kasus dalam penelitian ini adalah Model Inovasi *Wisata Buku Sahabat Anak* dalam rangka meningkatkan minat baca anak di wilayah Kabupaten Ciamis. Mengacu pada tujuan tersebut, dapat dilihat bahwa objek penelitiannya adalah model inovasi *Wisata Buku Sahabat Anak* yang diinisiasi oleh Kantor Perpusipda Kabupaten Ciamis. Meskipun *leading sector* dari inovasi ini adalah Kantor Perpusipda, namun objek penelitian ini secara umum akan mencakup seluruh Kabupaten Ciamis mengingat yang menjadi kelompok target (*target group*) dari inovasi ini mencakup seluruh anak usia sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dimaksud diperoleh dari narasumber di Kantor Perpusipda dan Guru sekolah sebagai narasumber. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer tersebut adalah melalui teknik wawancara (*interview*).

D. Model Inovasi “Wisata Buku Sahabat Anak” Kabupaten Ciamis

Bagian ini mendeskripsikan tentang proses implementasi inovasi “Wisata Buku Sahabat Anak” di Kabupaten Ciamis. Adapun aspek-aspek yang akan dibahas dalam bagian ini adalah latar belakang yang mendasari inisiasi inovasi, stakeholder atau pihak-pihak yang berpartisipasi, langkah-langkah implementasi, sumber daya yang diperlukan, prasyarat implementasi serta kendala yang muncul dalam implementasi program inovasi.

D.1 Latar Belakang Inisiasi Inovasi

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (Bapusipda) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013 menunjukkan bahwa minat baca di Kabupaten Ciamis tergolong cukup baik¹. Meski demikian, inisiatör program WBSA menilai bahwa hasil penelitian tersebut kurang dapat merepresentasikan kondisi riil yang terjadi. Menurutnya, minat baca di Kabupaten Ciamis masih rendah. Hal ini terlihat dari hasil wawancaranya terhadap beberapa siswa yang menganggap perpustakaan sebagai tempat yang sepi selain juga para siswa tersebut beranggapan bahwa membaca adalah kegiatan yang membosankan dan tidak menyenangkan. Dari total penduduk Kabupaten Ciamis sebanyak 1.531.359 orang, hanya sekitar 50 orang diantaranya yang mengunjungi dan

¹ Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur indeks membaca Bapusipda (2013) adalah: a) *ketersediaan fasilitas membaca* yang dilihat dari ketersediaan perpustakaan sekolah, perpustakaan umum, termasuk perpustakaan desa dan taman bacaan; b) *tingkat pemanfaatan sumber bacaan* yang dilihat dari rata-rata kepemilikan bahan pustaka (jumlah dan jenis), bahan bacaan yang dibaca, rata-rata kunjungan masyarakat ke perpustakaan, tingkat koleksi yang dimanfaatkan, keanggotaan perpustakaan; c) *kebiasaan membaca masyarakat* yang diukur dari rata-rata durasi membaca (per-kali membaca), rata-rata frekuensi membaca (dalam minggu), dan tujuan membaca.

memanfaatkan fasilitas perpustakaan di Kaperpusipda Kabupaten Ciamis setiap harinya.

Oleh karenanya, minat baca anak kelompok usia sekolah perlu ditingkatkan, salah satunya dengan mendorong peningkatan jumlah kunjungan ke perpustakaan. Kondisi eksisting sampai dengan sebelum program ini digulirkan adalah bahwa jumlah pengunjung paling banyak di perpustakaan daerah Kabupaten Ciamis adalah pelajar SMA, mahasiswa dan pengunjung non-anggota yang biasanya belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena berusia kurang dari 17 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa minat baca anak kelompok usia sekolah di Kabupaten Ciamis cukup berpotensi untuk terus didorong dan dikembangkan serta dibiasakan sejak dini. Penanaman minat baca sejak dini ini perlu dilakukan sebab kebiasaan yang telah ditanamkan sejak kecil akan lebih mudah untuk diperaktekan, diteruskan dan sulit untuk ditinggalkan.

Sejauh ini, peningkatan budaya dan minat baca telah dituangkan dalam salah satu sasaran dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis tahun 2014-2019. Meski demikian, program dan indikator yang dibuat dalam dokumen tersebut masih terbatas pada peningkatan jumlah infrastruktur perpustakaan daerah dan perpustakaan keliling. Padahal program tersebut seharusnya didukung dengan program-program yang lebih partisipatif yang menyasar pada kelompok target yang jelas. Oleh karena itu, program inovasi *Wisata Buku Sahabat Anak* ini kemudian diinisiasi dengan maksud untuk meningkatkan minat baca anak sejak dini. Harapan jangka panjangnya, anak-anak akan merasa bahwa perpustakaan bukan tempat yang membosankan melainkan tempat yang dapat menjadi sumber pengetahuan yang menyenangkan. Sementara itu, output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kunjungan anak-anak ke perpustakaan yang kemudian diharapkan dapat mendorong terciptanya budaya membaca di kalangan anak usia sekolah.

D.2 Stakeholder dan Perannya dalam Implementasi Inovasi *Wisata Buku Sahabat Anak*

Beberapa stakeholder yang terlibat dalam proses implementasi program inovasi “Wisata Buku Sahabat Anak” adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Stakeholder dan Perannya Dalam Inovasi Wisata Buku Sahabat Anak

Stakeholder	Peran
Kapusipda Kabupaten Ciamis - Seksi Pengolahan dan Pelayanan Perpustakaan - Kepala Kantor	Kapusipda berperan sebagai sektor yang menginisiasi dan mengoordinasi pelaksanaan program. Sebagai <i>leading sector</i> , Kapusipda telah melaksanakan: - Alokasi anggaran pelaksanaan program, - Penyediaan infrastruktur pendukung di perpustakaan seperti buku, ruang baca, komputer, akses internet dan alat peraga edukatif. - Pembangunan kapasitas fasilitasi program seperti penyediaan fasilitator untuk memotivasi anak agar membiasakan membaca buku.
Sekolah	Dari sekolah yang ada, kelompok targetnya adalah murid di sekolah tersebut, selain itu juga melibatkan pula guru kelasnya. Peran dari guru kelas ini adalah untuk mendukung dalam memberikan arahan kepada murid dan menjaga ketertiban dalam pelaksanaan program.
Taman Bacaan Masyarakat (TBM) - Ibu Rosi	Perwakilan pengelola dari TBM dilibatkan untuk berperan sebagai sukarelawan fasilitator dan motivator minat baca anak dalam pelaksanaan program.
DPPKAD	Dinas ini berperan dalam penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan seperti buku, alat peraga edukatif dan sarana lainnya sebagaimana dianggarkan dalam APBD.
Swasta (PT. Coca Cola Tbk)	Peran swasta dalam hal ini adalah membantu penyediaan komputer di dalam ruang perpustakaan. Komputer tersebut merupakan wujud dari <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> PT. Coca Cola.

Sumber: Data diolah

Dikarenakan persoalan keterbatasan anggaran, pelaksanaan program inovasi ini baru dapat melibatkan 5 sekolah yakni SDN 1 Kertasari, SDN 1 Ciamis, SDN 4 Ciamis, PAUD Al Mustofa, dan TK Pertiwi. Adapun jumlah murid yang berpartisipasi adalah sebanyak 200 anak dengan jumlah guru yang berpartisipasi sebanyak 20 orang. Pada pelaksanaan kegiatan tersebut, terdapat satu pemandu yang berasal dari luar petugas perpustakaan yakni Ibu Rosi, seorang aktivis taman baca yang memiliki banyak instrumen untuk permainan dalam rangka meningkatkan minat baca anak. Dalam acara tersebut siswa SD juga didampingi oleh dua guru mereka yang membantu dalam menertibkan siswa di dalam ruangan perpustakaan.

D.3 Langkah-Langkah Implementasi Program Inovasi “Wisata Buku Sahabat Anak”

Dalam kerangka implementasi program, tahap pertama yang dilakukan adalah tahap persiapan. Pada tahap ini, hal pertama yang dilakukan adalah inisiatör, dalam hal ini Kepala Seksi Pengolahan dan Pelayanan Perpustakaan, melakukan koordinasi kegiatan dengan Kepala Kantor Perpusipda. Proses koordinasi ini dilakukan dalam rangka memperoleh dukungan baik dari segi anggaran maupun SDM dalam rangka pelaksanaan program. Tahap selanjutnya adalah menetapkan Tim atau Petugas yang akan mendampingi siswa, menetapkan sampel sekolah yang menjadi target serta membuat jadwal kegiatan “Wisata Buku” yang diadakan setiap minggu, kemudian mengirimkan Surat Undangan ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang ada di Kabupaten Ciamis.

Tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan kegiatan. Anak-anak sekolah berdatangan ke Perpustakaan didampingi oleh guru-guru mereka. Di sana, timpasilitor dari Kaperpusipda mulai mengenalkan pada anak tentang fungsi masing-masing ruangan yang ada di perpustakaan, dimulai dari papan pengumuman, loker (tempat penitipan barang), meja sirkulasi/front office, Ruang Baca Dewasa, Ruang Baca Anak, Ruang Pelayanan Internet, dan lain-lain. Selain itu, anak-anak juga diberikan penjelasan mengenai tata cara pembuatan Kartu Tanda Anggota Gratis. Dalam kegiatan tersebut, juga dilakukan kegiatan *game* edukatif, seperti Tebak Gambar Baca Cepat, Lomba Mendongeng (*Story Telling*). Dan dalam rangka menarik perhatian dan minat anak-anak, setiap *game* dilengkapi dengan pemberian *reward* atau *door prize*. Setelah program selesai dilakukan, diskusi evaluasi digelar dalam tim untuk memastikan apa yang kurang efektif dalam pelaksanaan program. Program inovasi ini baru dilakukan 1 kali yaitu pada Bulan Februari 2016. Lebih lanjut, langkah-langkah yang telah dilakukan tergambar dalam **Tabel 4.2**.

D.4 Sumber Daya Yang Diperlukan Dalam Rangka Implementasi Inovasi

Beberapa jenis sumber daya diperlukan dalam pelaksanaan program ini yakni sumber daya anggaran, sumber daya manusia dan sumber daya sarana dan prasarana adalah sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

D.4.1 Sumber Daya Anggaran

Total anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan ini adalah Rp. 8.150. 000,00. Jumlah tersebut dimanfaatkan untuk memberikan insentif kepada

fasilitator, pembuatan sertifikat, penyediaan konsumsi serta alat tulis sebagai hadiah permainan. Anggaran yang digunakan dalam kegiatan ini tidak secara khusus dianggarkan dari tahun sebelumnya, melainkan diambil dari pos anggaran rutin promosi perpustakaan. Sebenarnya, pada tahun 2016 ini, total anggaran yang dialokasikan untuk program-program di Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perpustakaan adalah sebesar Rp. 334.968.000,00. Ini berarti, anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sangat kecil, yaitu hanya sekitar 2,4 % dari total anggaran program-program pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perpustakaan.

D.4.2 Sumber Daya Manusia

Dari segi sumber daya manusia, program ini tidak banyak membutuhkan alokasi SDM. SDM yang diperlukan yakni pemandu aktivitas anak pada saat kegiatan dilakukan yang mana dalam kegiatan ini dilakukan oleh Bu Rosi yang adalah seorang sukarelawan dari Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Kabupaten Ciamis. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan seluruh staf di Seksi Pengolahan dan Pelayanan Perpustakaan terutama dalam hal memandu anak-anak untuk melakukan *tour* ke ruang-ruang di perpustakaan dan sekaligus memberikan penjelasan mengenai manfaat perpustakaan. Seksi Pengolahan dan Pelayanan Kepustakaan memiliki 10 orang pegawai dimana 6 orang diantaranya adalah pegawai honorer dan 4 orang lainnya adalah PNS yang mana 2 dari 4 orang dari PNS tersebut adalah pustakawan. Selain itu, kegiatan ini juga membutuhkan partisipasi guru dalam hal memotivasi minat baca anak serta membantu menjaga ketertiban kegiatan. Secara umum, prasyarat atau qualifikasi SDM yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah memiliki minat yang tinggi dalam menanamkan minat baca pada anak-anak; menguasai permainan edukatif anak; pernah membaca buku anak-anak; serta memiliki kemampuan komunikasi verbal dan non-verbal yang baik.

D.4.3 Sumberdaya Sarana dan Prasarana

Beberapa jenis sarana dan prasarana yang diperlukan dalam program inovasi "Wisata Buku Sahabat Anak" ini antara lain:

- Bangunan perpustakaan untuk ruang baca anak
- Buku-buku fiksi dan non fiksi bergambar untuk anak-anak
- Alat peraga edukatif
- Instrumen permainan
- Konsumsi
- Paket alat tulis untuk *doorprize*
- Sertifikat

Pada dasarnya, sarana dan prasarana tersebut sudah ada sebelum inovasi ini digulirkan dimana prosesnya dilakukan melalui pengajuan barang tahunan, sementara untuk konsumsi, paket alat tulis serta sertifikat berasal dari anggaran rutin promosi.

D.5 Dampak/Kemanfaatan Program Inovasi "Wisata Buku Sahabat Anak"

Ditinjau dari segi kemanfaatan, beberapa stakeholders memandang program inovasi ini sangat bermanfaat bagi upaya peningkatan minat baca dari kelompok target. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Eni Marliani, salah satu guru SDN

- 4 Ciamis yang ikut mendampingi program *Wisata Buku Sahabat Anak* ke perpustakaan, mengungkapkan beberapa bentuk kemanfaatan yang dirasakan antara lain yakni;
- a) Anak-anak terlihat lebih bersemangat membaca buku dan lebih sering mengunjungi perpustakaan baik di Kaperpusipda maupun mobil perpustakaan keliling yang beroperasi pada hari Minggu di Alun-Alun Kabupaten Ciamis;
 - b) Anak-anak menjadi lebih sering bertanya di kelas;
 - c) Untuk pelajaran Bahasa Indonesia, anak-anak terlihat lebih cepat dalam menentukan pokok pikiran dan alur cerita selain juga kemampuan verbal yang meningkat.
 - d) Kemampuan menulis juga terlihat meningkat. Hal ini dinilai oleh narasumber dari hasil penugasan menulis yang diberikannya setelah acara kunjungan ke perpustakaan di Kaperpusipda kepada anak-anak untuk membuat tulisan tentang apa yang mereka lakukan atau baca di perpustakaan.
 - e) Prestasi akademis yang bagus. Narasumber mengungkapkan bahwa anak-anak yang sering pergi ke perpustakaan adalah mereka yang memiliki prestasi akademik yang bagus. Hal tersebut terbukti dengan salah seorang siswa yang pernah mendapatkan penghargaan siswa SD paling rajin ke perpustakaan dari Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Ciamis dan hingga kini siswa tersebut sudah menyenam pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan mendapatkan prestasi akademik yang bagus.

Satu catatan penting yang disampaikan oleh narasumber terkait dengan program inovasi peningkatan minat baca anak ini adalah perlunya upaya pendampingan kepada anak-anak agar proses pencarian informasi yang dilakukan tetap terarah dan positif. Lebih lanjut, karena kemanfaatan yang diberikannya, banyak pihak, baik guru maupun siswa di SDN 4 Ciamis, yang berharap bahwa program *Wisata Buku Sahabat Anak* atau program-program sejenis terus dapat dilakukan. Program-program tersebut semestinya juga didukung dan ditindaklanjuti oleh para orang tua siswa. Hal ini penting mengingat pendidikan anak juga merupakan tanggung jawab orang tua. Lebih lanjut, narasumber menyampaikan bahwa sebenarnya banyak sekolah di Kabupaten Ciamis sudah memiliki fasilitas perpustakaan sendiri, demikian pula halnya dengan SDN 4 Ciamis. Narasumber menyampaikan bahwa perpustakaan SDN 4 Ciamis memiliki koleksi buku fiksi dan non-fiksi untuk anak-anak yang dilengkapi dengan gambar, namun jumlahnya masih kurang. Selain itu, kondisi perpustakaan juga kurang terawat padahal sebenarnya terdapat himbauan dari pemerintah bagi setiap sekolah untuk mengalokasikan dana BOS sebanyak 5% untuk pengembangan perpustakaan.

Tabel 4.2
Langkah-Langkah Implementasi Program *Wisata Buku Sahabat Anak*

N o.	Langkah Kegiatan	Output	Deskripsi Metode	Koordinator	Stakeholder	Bulan Ke-
Tahap Persiapan						
a.	Melakukan koordinasi dengan Kepala Perpustakaan terkait inisiasi program dan penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> - Terkoordinasi kannya kegiatan Wisata Buku Sahabat Anak kepada atasan; - Diperolehnya dukungan pelaksanaan program dari segi SDM dan penganggaran. 	Rapat	Kepala Seksi Pengolahan dan Pelayanan Perpustakaan	Kepala Kantor, Kasubag Perencanaan, pejabat fungsional umum dalam Seksi Pengolahan dan Pelayanan Perpustakaan	1
b.	Menetapkan Tim atau Petugas yang akan mendampingi siswa	Terbentuknya Tim Pelaksana Kegiatan Inovasi "Wisata Buku Sahabat Anak"	Diskusi	Kepala Seksi Pengolahan dan Pelayanan Perpustakaan	TBM, pejabat fungsional umum dalam Seksi Pengolahan dan Pelayanan Perpustakaan	1
c.	Menetapkan sampel sekolah yang menjadi target	Sampel sekolah yang akan menjadi target kegiatan	Rapat	Kepala Seksi Pengolahan dan Pelayanan Perpustakaan	Kepala Kantor, pejabat fungsional umum dalam Seksi Pengolahan dan Pelayanan Perpustakaan	1

N o.	Langkah Kegiatan	Output	Deskripsi Metode	Koordinator	Stakeholder	Bulan Ke-
d.	Membuat jadwal kegiatan, Wisata buku diadakan setiap minggu	Rancangan jadwal kegiatan	Rapat	Kepala Seksi Pengolahan dan Pelayanan Perpustakaan	Fasilitator TBM dan Pejabat Fungsional Umum dalam Seksi Pengolahan dan Pelayanan Perpustakaan	1
e.	Mengirimkan Surat Undangan ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang ada di Kabupaten Ciamis	Terkirimnya Surat Undangan ke sekolah-sekolah	Pengiriman Undangan	Kepala Seksi Pengolahan dan Pelayanan Perpustakaan	Sekolah dan Pejabat Fungsional Umum dalam Seksi Pengolahan dan Pelayanan Perpustakaan	1
Tahap Pelaksanaan						
a.	Melaksanakan program inovasi "Wisata Buku Sahabat Anak" di Kapusipda	Terlaksananya program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenalkan pada anak tentang fungsi ruangan-ruangan di perpustakaan dimulai dari papan pengumuman, Loker (tempat penitipan barang), Meja Sirkulasi/ Front Office, Ruang Baca Dewasa, Ruang Baca Anak, Ruang Pelayanan Internet, dll. 2. Pembuatan Kartu Tanda Anggota Gratis. 	Kepala Seksi Pengolahan dan Pelayanan Perpustakaan	Fasilitator TBM, sekolah dan Pejabat Fungsional Umum dalam Seksi Pengolahan dan Pelayanan Perpustakaan	2

N o.	Langkah Kegiatan	Output	Deskripsi Metode	Koordinator	Stakeholder	Bulan Ke-
			3. Mengadakan kegiatan Game Edukatif, seperti Tebak Gambar Baca Cepat, Lomba Mendongeng (<i>Story Telling</i>) 4. Memberikan Reward (<i>door prize</i>)			
Tahap Evaluasi						
a.	Evaluasi	Laporan Kegiatan	Rapat Evaluasi	Kepala Seksi Pengolahan dan Pelayanan Perpustakaan	Fasilitator TBM, Kepala Kantor, Kasubag Perencanaan dan Pejabat Fungsional Umum dalam Seksi Pengolahan dan Pelayanan Perpustakaan	3

Sumber: Kapusipda Kabupaten Ciamis

Narasumber lainnya yakni Bapak Rais Ikhsan Milki, guru pengajar dari SDN Kertasari Ciamis, mengungkapkan hal yang sedikit berbeda. Jumlah siswa yang mengikuti program *Wisata Buku Sahabat Anak* dari sekolah ini yakni sebanyak 70 siswa yang berasal dari kelas yang beragam. Narasumber sangat mengapresiasi program tersebut karena fasilitasi sarana dan prasarana yang disediakan oleh Kaperpusipda sudah lebih baik dibandingkan dengan yang ada di perpustakan sekolah. Selain itu, program tersebut juga dilengkapi dengan permainan serta penjelasan dan pengarahan tentang buku-buku dan fasilitas perpustakaan sehingga dapat menstimulasi anak untuk bertanya dan bercerita. Namun demikian, menurut narasumber kemanfaatan program tersebut belum terlihat “nyata” karena program baru berjalan satu kali di sekolah tersebut. Kemanfaatan program bagi peningkatan nilai akademis siswa juga belum bisa dilihat karena menurutnya, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi prestasi akademis siswa, dua diantaranya adalah dukungan dan dorongan orang tua serta IQ. Menurut beliau peran guru dalam memfasilitasi minat baca siswa adalah faktor ketiga yang mempengaruhi prestasi akademis siswa.

D.6 Prasyarat Implementasi Inovasi “Wisata Buku Sahabat Anak”

Beberapa prasyarat yang diperlukan dalam implementasi program inovasi “Wisata Buku Sahabat Anak” ini adalah sebagai berikut:

- Kesadaran dari seluruh stakeholder bahwa peningkatan minat baca ini adalah penting dilakukan dan didukung oleh pimpinan/Kepala Kantor Perpusipda Kabupaten Ciamis.
- Keselarasan design program inovasi dengan dokumen perencanaan daerah
- Dukungan penganggaran yang memadai
- Dukungan sarana dan prasarana seperti buku, alat peraga edukatif, instrumen permainan, konsumsi, alat tulis dan sertifikat.
- Dukungan dari seluruh stakeholder yang telah berkoordinasi secara periodik sebelum program dilaksanakan

D.7 Kelemahan/Kekurangan Inovasi “Wisata Buku Sahabat Anak”

Secara umum, kelemahan atau kekurangan program inovasi “Wisata Buku Sahabat Anak” ini adalah sebagaimana dijelaskan berikut:

- a) *Kurangnya dukungan sumber daya untuk implementasi program inovasi;*
Akibatnya implementasi inovasi masih terkendala dalam hal keterbatasan sumber daya baik anggaran, sarana prasarana maupun SDM.
- b) *Kurang optimal dan kurang jelasnya konsep pelibatan stakeholders.* Hal ini terlihat dari masih sedikitnya pihak sekolah, komunitas taman bacaan, dan perusahaan swasta yang terlibat dalam program inovasi ini. Selain itu, pelibatan SKPD lain juga belum banyak dilakukan, padahal program inovasi peningkatan minat baca anak ini merupakan program kegiatan yang terkait dengan sektor-sektor lainnya.
- c) *Program inovasi ini masih sekedar program kegiatan yang belum terlalu dipikirkan aspek keberlanjutan (sustainability)-nya.* Hal ini terlihat dari masih rendahnya komitmen atau dukungan pimpinan serta proses monitoring dan evaluasi program yang belum dilakukan secara menyeluruh. Selain itu, belum adanya payung hukum terbaru yang mengikat dan mampu menjamin terlaksananya program ini secara berkelanjutan (Misalnya: SK Bupati) juga

menyebabkan pelaksanaan program ini masih belum berkelanjutan. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang perpustakaan paling akhir disahkan pada tahun 2003 dan belum diperbaharui hingga sekarang, padahal Perda tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang dan Peraturan Provinsi terbaru tentang perpustakaan.

Meski dengan segala kendala yang ada, program ini patut diapresiasi sebagai sebuah inovasi karena program ini memiliki unsur kebaharuan selain juga memberi kemanfaatan meskipun bersifat subjektif kualitatif. Oleh karenanya, program ini selanjutnya dapat dikembangkan agar dapat memberikan kemanfaatan lebih besar bagi upaya peningkatan minat baca anak di Kabupaten Ciamis.

E. Rekomendasi Model Pengembangan Inovasi “Wisata Buku Sahabat Anak”

Bagian ini akan menjelaskan mengenai model pengembangan dari inovasi “Wisata Buku Sahabat Anak” yang dapat diterapkan kedepan, baik oleh Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Ciamis selaku motor penggerak dan inisiatör dari inovasi ini maupun bagi daerah-daerah lain yang bermaksud mereplikasi atau mengadopsi inovasi peningkatan minat baca anak ini.

E.1 Deskripsi Model Pengembangan Inovasi “Wisata Buku Sahabat Anak”

Pada dasarnya, model pengembangan inovasi yang dibahas dalam bagian ini merupakan model hasil pengembangan inovasi yang dibuat untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh model inovasi “Wisata Buku Sahabat Anak” yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Selain itu, model pengembangan ini dibuat dalam rangka memperluas jangkauan ketercapaian tujuan peningkatan minat baca anak di Kabupaten Ciamis. Model pengembangan ini juga dibuat agar dapat direplikasi oleh daerah-daerah lain di Indonesia yang menghadapi problematika serupa dalam hal rendahnya minat/budaya membaca di kalangan anak-anak usia sekolah.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, kelemahan atau kekurangan dari inovasi “Wisata Buku Sahabat Anak” meliputi: 1) *Kurangnya dukungan penganggaran untuk implementasi program inovasi*; 2) *Kurang optimal dan kurang jelasnya konsep pelibatan stakeholders*; 3) *Program inovasi ini masih sekedar program kegiatan yang belum terlalu dipikirkan aspek keberlanjutan (sustainability)-nya*. Akibatnya, desain program inovasi ini masih terlihat seperti sekedar sebuah program kerja atau kegiatan saja dan belum mampu menjelma menjadi sebuah gerakan sosial (*social movement*) di wilayah Kabupaten Ciamis yang mampu memberikan dampak dan kemanfaatan yang lebih besar. Dengan mengacu pada aspek-aspek kunci keberhasilan dan keoptimalan inovasi sebagaimana telah dijelaskan pada bagian 2, selanjutnya konsepsi design model inovasi pengembangan “Wisata Buku Sahabat Anak” dibuat.

E.2 Konsepsi Design Model Inovasi Pengembangan

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka selanjutnya kajian ini akan mencoba merumuskan konsep design inovasi pengembangan peningkatan minat baca anak di wilayah Kabupaten Ciamis yaitu sebagai berikut:

1. *Desain inovasi partisipatif yang melibatkan berbagai stakeholders (multi-stakeholders participation).* Pada prinsipnya, inovasi adalah tanggungjawab bersama baik pemerintah, swasta, masyarakat, termasuk didalamnya inovasi peningkatan minat baca anak. Seperti halnya diamanatkan dalam UU No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Bab XIII pasal 48 yang berbunyi: "Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat". Sebenarnya, pada model lama, beberapa stakeholders sudah dilibatkan namun belum banyak dan pengaturan atau pembagian perannya juga belum secara jelas dibuat. Pada model pengembangan ini, stakeholders yang dilibatkan lebih banyak dan sudah terdapat pembagian peran yang lebih jelas. Adapun tujuan perluasan keterlibatan stakeholders ini dimaksudkan untuk beberapa hal yaitu:
 - a) *Mengatasi keterbatasan sumber daya (resources) yang dimiliki oleh pemerintah daerah.* Berbagai keluhan terhadap persoalan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengimplementasikan program inovasi "Wisata Buku Sahabat Anak", dalam hal ini Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Ciamis, sebenarnya dapat diatasi dengan pelibatan berbagai stakeholders. Beberapa stakeholders selama ini memang sudah dilibatkan misalnya komunitas taman bacaan, sekolah-sekolah, perusahaan yaitu PT. Coca Cola Tbk, dan lain-lain. Namun demikian, proses pelibatan para stakeholders tersebut masih belum jelas desainnya, dalam arti peran masing-masing stakeholders belum jelas. Selain itu, jumlah stakeholders yang terlibat dalam program inovasi ini masih jauh dari potensi stakeholders yang dapat dilibatkan, sehingga kedepan dapat lebih ditingkatkan baik dari segi jumlah maupun bentuk kemitraan atau kolaborasinya serta kejelasan peran masing-masing pihak.
 - b) *Memperluas keterjangkauan atau keluasan dampak (impact) dan manfaat (benefits) inovasi dalam rangka peningkatan minat baca anak di Kabupaten Ciamis.* Konsep *multi-stakeholders participation* sendiri sebenarnya tidak hanya dimaksudkan untuk mengatasi persoalan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah, tetapi juga keterjangkauan atau keluasan dampak (*impact*) dan manfaat (*benefits*) inovasi. Hal ini karena pada model pengembangan ini stakeholders yang terlibat tidak hanya dari pihak sekolah saja tetapi juga pihak orang tua yang memiliki peran pembinaan anak di lingkungan rumah dan komunitas taman bacaan yang memiliki peran pembinaan minat baca anak di lingkungan komunitas. Selain itu, pada model yang lama, guru lebih banyak diperankan sebagai pendamping siswa saja, padahal guru-guru di sekolah memiliki peran pembinaan di lingkungan sekolah sehingga mereka dapat dijadikan sebagai "change agent" dalam rangka peningkatan minat baca di lingkungan sekolah.
 - c) *Kolaborasi atau kemitraan antar stakeholders dalam rangka mengatasi persoalan keberlanjutan (sustainability) program inovasi.* Selanjutnya, berawal dari poin pertama dan kedua tersebut di atas, maka persoalan keberlanjutan program inovasi dapat diatasi.

Selanjutnya *stakeholders* yang dapat dilibatkan dalam program inovasi ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. *Stakeholders* yang dapat dilibatkan dalam Model Inovasi Pengembangan

No.	Stakeholders	Potensi Jumlah	Paran/Role
1.	Murid	751 SD Swasta dan Negeri, 100.381 murid SD 158 Madrasah Ibtidaiyah, 22.424 murid	Anak usia sekolah baik dari SD Negeri maupun Swasta dan juga Madrasah Ibtidaiyah merupakan kelompok target (<i>target group</i>) dari inovasi ini.
2.	Pemerintah Daerah - SKPD	Bupati	Kepala Daerah sebagai jajaran tertinggi eksekutif diharapkan dapat mendorong dan mendukung program inovasi ini dan membantu proses advokasi kesadaran seluruh stakeholders.
		Kantor Perpusipda	Sebagai <i>leading sektor</i> dalam implementasi program inovasi "Wisata Buku Sahabat Anak" dana tau program inovasi peningkatan minat baca anak lainnya.
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan guru dan murid dari Sekolah Dasar di wilayah Kabupaten Ciamis - Mendorong sekolah-sekolah untuk mengembangkan perpustakaan sekolah dari alokasi dana BOS sebesar 5%
		Kanwil Kementerian Agama	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan guru dan murid dari Madrasah Ibtidaiyah di Wilayah Kabupaten Ciamis - Mendorong Madrasah Ibtidaiyah untuk mengembangkan perpustakaan sekolahnya.
		Kecamatan	Mendukung proses sosialisasi program inovasi peningkatan minat baca dan memo tivasi

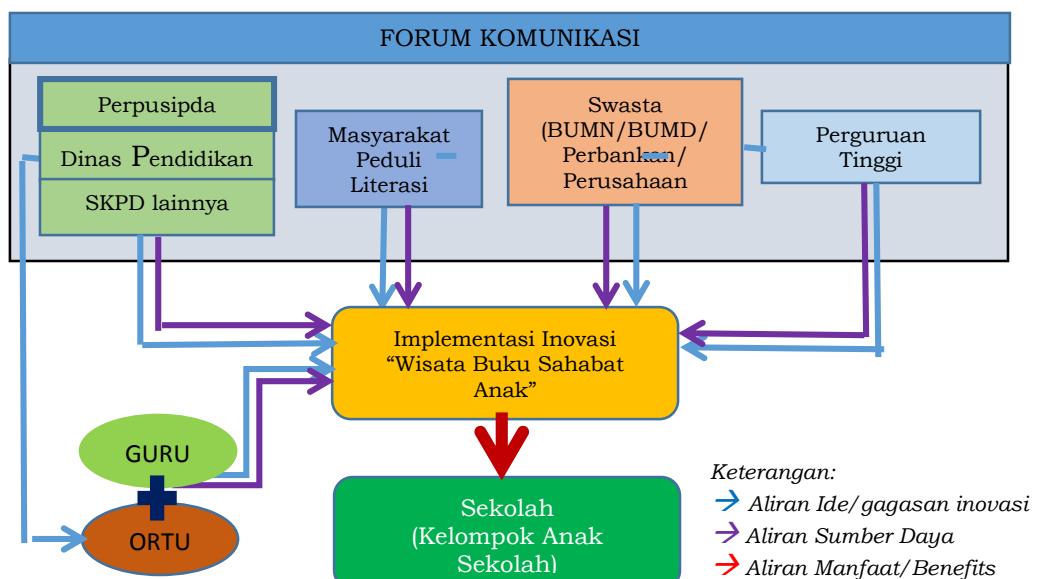
No.	Stakeholders	Potensi Jumlah	Paran/Role
			masyarakat (orang tua) untuk meningkatkan minat baca anak-anak.
3.	Orang Tua	Diwakili oleh Komite Sekolah (menurut PP 17/2010)	Motor penggerak "change agent" untuk implementasi inovasi peningkatan minat baca anak di lingkungan rumah.
4.	Guru	Guru-guru di setiap sekolah negeri & swasta & MI	Motor penggerak "change agent" untuk implementasi inovasi peningkatan minat baca anak di lingkungan sekolah-sekolah.
5.	Perusahaan/BUMN/Perbankan/BUMD/Swasta		Memberikan dukungan anggaran melalui alokasi dana CSR yang dapat disalurkan melalui penyediaan buku-buku bermutu, sarana dan prasarana perpustakaan dan lain-lain.
6.	Komunitas Taman Bacaan & Peduli Literasi		Motor penggerak "change agent" untuk implementasi inovasi peningkatan minat baca anak di lingkungannya.
7.	Perguruan Tinggi		Mendorong dan mendukung untuk menyumbangkan ide-gagasan inovasi peningkatan minat baca anak, juga mahasiswa dapat berperan sebagai <i>volunteer</i> dari gerakan peningkatan minat baca.

Sumber: *Hasil Analisis, 2016*

2. *Membangun sebuah FORUM yang melibatkan berbagai stakeholders tersebut. Selanjutnya, dalam rangka menjadikan program inovasi peningkatan minat baca sebagai gerakan sosial yang menjadi tanggung jawab bersama seluruh pihak, maka perlu dibuat sebuah FORUM yang melibatkan berbagai stakeholders tersebut. Forum ini menjadi wadah untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan pengembangan inovasi "Wisata Buku Sahabat Anak" atau inovasi peningkatan minat baca anak lainnya di antara para pemangku kepentingan tersebut. Sehingga intinya, forum ini memiliki tugas pokok sebagai wadah untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan program inovasi "Wisata Buku Sahabat Anak" dan program-program peningkatan minat baca lainnya.*

Pada intinya, melalui forum ini dibuka peluang bagi para *stakeholders* untuk terlibat atau berpartisipasi secara aktif dalam program inovasi "Wisata Buku Sahabat Anak" atau inovasi peningkatan minat baca anak lainnya. Bentuk partisipasi dapat berupa sumbangan ide/gagasan inovasi, sarana prasarana, dana, maupun tenaga sebagai sukarelawan. Model semacam ini dapat disebut sebagai Model "*Collaborative Innovation*". Di sini, kontribusi *stakeholders* dapat berupa ide/gagasan, anggaran, sarana. Oleh karenanya, proses mengadvokasi para *stakeholders* menjadi sangat penting dalam kerangka membangun kesadaran bersama. Konsep ini mendukung hasil temuan Juniawan Hidayanto (2013) yang menyatakan bahwa upaya peningkatan minat baca masyarakat sangat tergantung pada tingkat partisipasi, kemitraan dan kinerja pengelola. Lebih lanjut mengenai Model "*Collaborative Innovation*" ini adalah sebagaimana dijelaskan pada **Gambar 1** berikut:

Gambar 1. Model *Collaborative Innovation* Peningkatan Minat Baca Anak



3. *Aspek Dukungan Regulasi (supportive regulation).*

Sebenarnya, kebijakan pemerintah tentang Perpustakaan sudah ada sejak Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 yang kemudian diturunkan kedalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014 yang menjelaskan mengenai Standar Nasional Perpustakaan yaitu kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Pasal 19 ayat (3) disebutkan bahwa Standar Nasional Perpustakaan terdiri atas:

- Standar koleksi perpustakaan;* memuat kriteria paling sedikit mengenai: jenis koleksi, jumlah koleksi, pengembangan koleksi, pengolahan koleksi, perawatan koleksi dan pelestarian koleksi.

- b. *Standar sarana dan prasarana;* memuat kriteria paling sedikit mengenai: lahan, gedung, ruang, perabot dan peralatan
- c. *Standar pelayanan perpustakaan;* memuat kriteria paling sedikit mengenai system dan jenis pelayanan
- d. *Standar tenaga perpustakaan;* memuat kriteria minimal mengenai kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi
- e. *Standar penyelenggaraan;* memuat kriteria paling sedikit mengenai penyelenggaraan perpusatakan di berbagai jenis perpustakaan
- f. *Standar pengelolaan,* memuat paling sedikit mengenai: perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Sampai dengan saat ini, kondisi eksisting masih sebatas pada mewujudkan standar koleksi perpustakaan dengan melakukan pengadaan buku yang penganggarannya dilakukan melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAP) kepada Dewan. Belum ada upaya lain yang dilakukan untuk memenuhi standar pengelolaan perpustakaan. Oleh karenanya, hal ini harus menjadi perhatian (*concern*) bersama dari setiap pihak untuk kemudian didiskusikan dan diselesaikan bersama. Hal ini penting mengingat persoalan budaya membaca cukup krusial dalam menentukan kemajuan bersama dari suatu bangsa. Selain itu, sampai dengan saat ini, kebijakan tentang inovasi di Kabupaten Ciamis juga belum dibuat. Padahal kebijakan ini penting dalam rangka memayungi atau mendukung terjadinya percepatan pencapaian tujuan RPJMD secara umum maupun tujuan peningkatan minat baca secara khusus. Oleh karenanya, dukungan regulasi ini harus dapat segera diwujudkan.

Selanjutnya berkaitan dengan *open innovation* perlu dibuat kebijakan yang mengatur mengenai mekanisme pelibatan *stakeholders* lain di luar pemerintah baik masyarakat maupun swasta untuk dapat terlibat secara aktif dalam program-program inovasi daerah, salah satunya dalam inovasi peningkatan minat baca masyarakat. Kebijakan dimaksud dapat berupa kebijakan yang mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). Perda tentang CSR ini penting agar pengelolaan dana sumbangan ini memiliki mekanisme yang jelas, sehingga pengelolaannya transparan, akuntabel dan tidak melanggaran hukum. Di sini, kewajiban pemerintah daerah hanya memonitoring dan memfasilitasi saja terkait program-program yang diprioritaskan agar terjadi sinkronisasi antara bantuan perusahaan dengan program pemerintah Kabupaten Ciamis. CSR sendiri merupakan kewajiban perusahaan yang diperintahkan langsung oleh Undang-Undang sebagai komitmen menyejahterakan masyarakat. Karena hal itu sudah diatur secara hukum, maka jika tidak dijalankan akan berpotensi menjadi masalah hukum. Persoalannya, sering kali perusahaan kebingungan mengeluarkan program yang cocok dengan pemerintah daerah sehingga seringkali tidak nyambung. Harapannya agar tidak ada lagi bantuan yang tumpang tindih. Dan penyaluran dana CSR perusahaan di Kab Ciamis diharapkan tepat sasaran dan sinergi dengan program pemerintah Kabupaten Ciamis.

4. *Aspek Pemasaran Sosial (social marketing).*

Dalam rangka mendeseminasikan program inovasi, proses pemasaran sosial perlu secara gencar dilakukan, misalnya melalui social media. Hal ini penting sebagai bagian dari upaya untuk menginternalisasi program inovasi ini kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga program inovasi ini bukan hanya sekedar menjadi program kegiatan semata mata tetapi lebih dari itu bisa menjadi semacam gerakan sosial kemasayarakatan (*social movement*) yang mampu memberikan dampak atau kemanfaatan yang besar bagi masyarakat.

E.3 Sumber Daya Yang Diperlukan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa dalam sebuah model *Collaborative Innovation*, sumber daya dapat berasal dari stakeholders manapun yang terlibat didalamnya. Adapun sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan program inovasi ini yang meliputi sumber daya anggaran, sumber daya manusia dan sumber daya sarana dan prasarana, adalah sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 3. Sumber Daya Yang Diperlukan Dalam Inovasi Pengembangan

No.	Jenis Sumber Daya	Asal/Sumber Perolehan
1.	Dana	APBD, CSR, BOS, Sumbangan lain-lain
2.	Sarana Prasarana	Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Sekolah SD/MI, Taman Bacaan Masyarakat, dll
3.	Sumber Daya Manusia	PNS SKPD, Guru, Orang Tua, Volunteer dari Komunitas Peduli Literasi, Perguruan Tinggi, masyarakat, dll

Berbagai program inovasi yang dirancang, termasuk inovasi peningkatan minat baca, tidak semuanya dapat dibiayai dengan APBD sehingga diperlukan terobosan-terobosan pendanaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dana pertama diluar APBD yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan perpustakaan sekolah adalah dana BOS atau Bantuan Operasional Sekolah. Dana BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Tujuan khususnya adalah untuk membebaskan pungutan sehingga dapat meringankan beban siswa. Semua sekolah yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen) menerima dana BOS.

Dana Bos yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan besar satuan biaya untuk tingkat SD sebesar Rp 800.000,-/siswa/tahun dan Tingkat SMP sebesar Rp 1.000.000,-/siswa/tahun. Dana BOS disalurkan setiap 3 bulan (periode triwulan), yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. Salah satu komponen yang bisa dibiayai dari dana BOS adalah pengembangan perpustakaan. Biaya untuk pengembangan perpustakaan minimal 5% dari anggaran operasi sekolah. Prioritas utama adalah membeli buku teks pelajaran sesuai kurikulum yang digunakan sekolah, baik pembelian buku yang baru, mengganti yang rusak, dan membeli kekurangan agar tercukupi rasio satu

siswa satu buku. Buku teks yang dibeli adalah yang telah dinilai dan ditetapkan HET-nya oleh Kemdikbud.

Komponen ini juga bisa untuk membeli buku pengayaan dan referensi untuk memenuhi SPM. Selain itu, untuk langganan koran, majalah/publikasi berkala yang terkait pendidikan (*offline/online*), pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan, peningkatan kompetensi pustakawan, pengembangan database perpustakaan, pemeliharaan perabot perpustakaan, pemeliharaan & pembelian AC perpustakaan. Jadi pada intinya, terdapat porsi 5% dari total alokasi dana BOS yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan perpustakaan sekolah. Ini berarti bahwa program inovasi “Wisata Buku Sahabat Anak” dapat dikembangkan tidak hanya untuk perpustakaan Kaperpusipda saja tapi juga perpustakaan sekolah dan perpustakaan komunitas Taman Bacaan Masyarakat.

Dalam hal ini Kaperpusipda dapat menginisiasi untuk memperbanyak pendirian atau pembentukan taman-taman bacaan di wilayah pelosok yang mungkin tidak terjangkau oleh pelayanan perpustakaan daerah. Selain dana BOS, alternatif lain yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pendanaan program inovasi peningkatan minat baca anak ini adalah dana CSR. Terkait dengan hal ini, perlu didorong agar pihak Swasta, Perbankan, BUMN, dan BUMD melalui dana alokasi CSR yang dimilikinya sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan agar dapat berpartisipasi dan berkontribusi sebagai upaya pemberian dan pembangunan Kabupaten Ciamis. Harapannya, peran dan kontribusi CSR dari pihak Swasta, Perbankan, BUMN, dan BUMD dapat memicu dan memacu upaya percepatan pemberian dan peningkatan minat baca di Kabupaten Ciamis. Agar lebih menarik minat pihak swasta untuk memberikan kontribusi sumber daya dan untuk membuat mereka memiliki kebanggaan terhadap apa yang mereka lakukan, maka kontribusi mereka dapat diapresiasi dalam bentuk prasasti atau penyebutan nama perusahaan yang dipampang pada bangunan/sarana prasarana/buku/lain-lain yang mereka sumbangkan.

Sumbangan dari masyarakat juga dapat dijadikan sebagai sumber alternatif pendanaan inovasi dalam rangka peningkatan minat baca anak. Di sini, masyarakat perlu terus didorong dan dimotivasi untuk terlibat dalam proses inovasi baik melalui sumbangan dana, sumbangan buku maupun inisiatif untuk menjadi *volunteer* gerakan peningkatan minat baca anak di lingkungannya. Terkait dengan hal ini, masyarakat dapat diberikan apresiasi misalnya berupa piagam penghargaan “masyarakat peduli literasi” atau “masyarakat peduli pendidikan”, dan lain-lain.

Sementara itu, selain SDM dari Kaperpusipda, SDM lain yang dapat dilibatkan dalam rangka implementasi program inovasi peningkatan minat baca ini dapat meliputi: guru, orang tua, maupun para *volunteer* yang berasal dari Komunitas Peduli Literasi, Perguruan Tinggi, ataupun masyarakat secara umum. Pelibatan para stakeholders ini dimaksudkan agar gerakan peningkatan minat baca anak ini menjadi suatu gerakan yang massif dan terstruktur sehingga dapat memberikan dampak yang lebih besar. Sementara itu, pelibatan orang tua dalam gerakan peningkatan minat baca ini penting mengingat upaya pembinaan minat baca pada usia dini akan lebih efektif bila orang tua berperan serta secara aktif dalam mendorong, membimbing anaknya untuk gemar membaca.

E.5 Potensi Kendala Yang Mungkin Timbul dan Langkah Antisipasi

Dalam rangka mengimplementasikan model inovasi ini, salah satu hambatan atau kendala yang paling mungkin muncul kedepan adalah terkait dengan keaktifan para stakeholders untuk berpartisipasi dalam inovasi ini. Untuk itu, upaya untuk terus melakukan advokasi kepada stakeholders dalam rangka membangun kesadaran (*awareness*) bersama mengenai pentingnya gerakan peningkatan minat baca anak menjadi sangat krusial untuk dilakukan. Oleh karenanya keberadaan FORUM Komunikasi antar para stakeholders sebagaimana dijelaskan di atas harus dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Selain itu, upaya lain yang dapat dilakukan sebagai bagian dari langkah antisipasi adalah dengan memperkuat dukungan dari pihak berwenang baik jajaran Eksekutif maupun Legislatif untuk menjadikan program inovasi ini sebagai gerakan sosial bersama (*social movement*) yang harus didukung oleh semua pihak. Juga dukungan kebijakan (*legal framework*) yang mengatur tentang berbagai hal terkait dengan inovasi, forum komunikasi antar stakeholders, pengelolaan dana CSR dan lain-lain sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya harus terus diupayakan dan direalisasikan.

F. Kesimpulan

Bagian ini menjelaskan mengenai kesimpulan hasil kajian yang meliputi penjelasan mengenai alur perubahan model inovasi "Wisata Buku Sahabat Anak" dari hasil inisiasi awal, sampai model pengembangan yang direkomendasikan oleh peneliti. Selain itu, bab ini juga menjelaskan mengenai potensi replikasi model pengembangan inovasi peningkatan minat baca anak untuk penerapan di daerah lain.

F.1 Alur Perubahan Model Inovasi Wisata Buku Sahabat Anak

Pada awalnya model Wisata Buku Sahabat Anak lahir dengan dilatarbelakangi oleh persoalan rendahnya minat baca anak di Indonesia secara umum dan Kabupaten Ciamis secara khusus. Dengan segala keterbatasan yang dimilikinya, Kantor Perpusipda Kabupaten Ciamis mencoba menginisiasi inovasi "Wisata Buku Sahabat Anak" ini. Keterbatasan dimaksud mencakup stakeholders yang terlibat serta sumber daya (*resources*) yang digunakan. Dengan segala kendala yang ada, program ini patut diapresiasi sebagai sebuah inovasi karena program ini memiliki unsur kebaharuan dan juga kemanfaatan meskipun penilaianya dilakukan secara persepsi kualitatif. Adapun beberapa kelemahan atau kekurangan setelah proses implementasi program Wisata Buku Sahabat Anak antara lain adalah: *a) Kurangnya dukungan penganggaran untuk implementasi program inovasi; b) Kurang optimal dan kurang jelasnya konsep pelibatan stakeholders; c) Belum adanya aspek keberlanjutan (sustainability) dari program inovasi ini.*

Dengan mempertimbangkan kemanfaatan-kemanfaatan yang diperoleh dari program inovasi Wisata Buku Sahabat Anak ini maka program inovasi ini harus diteruskan dalam rangka meningkatkan minat baca anak di lingkungan Kabupaten Ciamis. Dan dengan mempertimbangkan segala kekurangan atau kelemahan program sebagaimana dijelaskan sebelumnya maka diperlukan penyempurnaan-penyempurnaan terhadap model sebelumnya. Harapannya, model pengembangan inovasi "Wisata Buku Sahabat Anak" ini dapat berkontribusi pada pencapaian

output atau tujuan peningakatan minat baca anak di Kabupaten Ciamis. Untuk lebih jelas mengenai alur perubahan model inovasi “Wisata Buku Sahabat Anak” dijelaskan pada **Tabel 4**.

Dari tabel tersebut dapat diambil pembelajaran bahwa inovasi adalah proses yang tidak pernah terputus karena tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan dan pencapaian kebutuhan dasar pendidikan terus berkembang. Maka itu, inovasi haruslah menjadi proses yang didukung dan dipikirkan bersama sebagai akselerasi kinerja tidak hanya perseorangan, namun juga instansi.

F.2 Potensi Replikasi Model Pengembangan Inovasi Peningkatan Minat Baca Anak Untuk Penerapan di Daerah Lain.

Dalam konteks manajemen inovasi, replikasi merupakan salah satu metode untuk memperluas, memperbanyak dan mempercepat terjadinya praktik inovasi. Hal ini penting mengingat proses replikasi dapat menghemat waktu, tenaga, biaya dan kemungkinan gagal dari sebuah ide atau gagasan inovasi. Dengan replikasi, kita tidak perlu melakukan sesuatu dari nol. Oleh karenanya, wajar bila kemudian muncul pemikiran bahwa inovasi yang baik adalah yang dapat direplikasi.

Demikian pula halnya dengan Inovasi “Wisata Buku Sahabat Anak” ini. Mengingat ide atau gagasan inovasi ini muncul dari problematika umum yang dialami oleh banyak daerah di Indonesia, maka replikasi inovasi “Wisata Buku Sahabat Anak” ini sangat mungkin untuk dilakukan oleh daerah-daerah lain baik yang berada di kawasan perkotaan maupun perdesaan tanpa memandang kekhususan karakteristik daerah tersebut. Sebagaimana dijelaskan di awal bahwa secara umum Indonesia menghadapi persoalan rendahnya budaya membaca masyarakatnya. Oleh karenanya inovasi “Wisata Buku Sahabat Anak” ini sangat mungkin untuk diadopsi atau direplikasi oleh daerah lain. Bahkan setiap daerah yang bermaksud mereplikasi inovasi ini dapat melakukan pengembangan atau modifikasi ide originalnya disesuaikan dengan konteks, kondisi eksisting, kebutuhan dan tujuan masing-masing daerah.

Tabel 4. Alur Perubahan Model Inovasi Wisata Buku Sahabat Anak

Aspek	Pra-Inovasi	Pasca Inovasi "WBSA"	Pasca Model Pengembangan Inovasi*)
Stakeholder yang terlibat dalam upaya peningkatan minat baca anak di Kabupaten Ciamis	Kapusipda, Komunitas Peduli literasi/Taman Bacaan Masyarakat, dll namun program kegiatan dilakukan secara terpisah, belum terintegrasi.	<ul style="list-style-type: none"> - Program kegiatan diinisiasi oleh Kaperpusipda dengan mengundang murid-murid Sekolah (4 SD dan 1 TK) yang masing-masing didampingi oleh beberapa guru. - Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Tim dari Kaperpusipda dan beberapa volunteer dari Taman Bacaan Masyarakat - DPPKAD berperan dalam proses penganggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan seperti buku, alat peraga edukatif dan sarana lainnya - Swasta (PT. Coca Cola. Tbk) berperan dalam menyediakan computer di ruang perpustakaan melalui dana CSR. 	Menjadikan Program Inovasi Wisata Buku Sahabat Anak bukan sekedar sebagai sebuah program kegiatan tetapi sebagai sebuah gerakan social (social movement) dalam rangka peningkatan minat baca anak yang didukung oleh seluruh lapisan masyarakat mulai dari Bupati, Kapusipda, Kanwil Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Kecamatan, Sekolah, Swasta, Orang Tua, TBM, Komite Sekolah, Perguruan tinggi, dll.
Sumber daya (<i>resources</i>) yang digunakan	-	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran APBD di Kaperpusipda - SDM (Staf perpustakaan Kaperpusipda, guru dan relawan dari TBM) - Sarana prasarana di Kaperpusipda (Buku-buku, Ruang perpustakaan, alat peraga edukatif) 	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran APBD, CSR, BOS, dll. - SDM (PNS SKPD, Guru, Orang tua, sukarelawan, komunitas peduli literasi, perguruan tinggi, masyarakat) - Sarana : Perpustakaan daerah, TBM, perpustakaan sekolah

Aspek	Pra-Inovasi	Pasca Inovasi "WBSA"	Pasca Model Pengembangan Inovasi*)
Tahapan/Proses Kegiatan	-	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk tim (terdiri dari SDM di Kaperpusipda dan Volunteer TBM) - Menyediakan sumber daya - Melaksanakan kegiatan - Evaluasi singkat 	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun forum yang melibatkan semua stakeholder (perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan manajemen sumber daya program) - Menyusun regulasi yang mendukung (Pengesahan gerakan dan pembentukan forum tanggung jawab sosial perusahaan) - Diseminasi program melalui media sosial - Pelaksanaan program secara serentak dan berkesinambungan di berbagai titik baik Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Sekolah, TBM, maupun lingkungan rumah. - Evaluasi menyeluruh dan dilanjutkan dengan implementasi tiada henti yang melibatkan seluruh stakeholders
Kendala/ Permasalahan yang dihadapi atau potensi kendala	Adanya anggapan anak-anak yang mempersepsikan bahwa perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya dukungan penganggaran untuk implementasi program inovasi; - Kurang optimal dan kurang jelasnya konsep pelibatan stakeholders; 	<ul style="list-style-type: none"> - Salah satu potensi kendala yang paling mungkin muncul kedepan adalah terkait dengan keaktifan para stakeholders untuk berpartisipasi dalam inovasi ini. Untuk itu perlu terus melakukan

Aspek	Pra-Inovasi	Pasca Inovasi "WBSA"	Pasca Model Pengembangan Inovasi*)
	adalah tempat yang membosankan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya aspek keberkelanjutan (<i>sustainability</i>) dari program inovasi sebelumnya. 	<ul style="list-style-type: none"> advokasi kepada stakeholders dalam rangka membangun kesadaran (<i>awareness</i>) bersama. - Tingkat kesadaran orang tua yang masih kurang terhadap pentingnya minat baca
Dampak/ Kemanfaatan bagi kelompok target (<i>target group</i>) yang diharapkan	-	<ul style="list-style-type: none"> - Kegemaran anak membaca buku meningkat dilihat dari peningkatan angka kunjungan keperpustakaan, - Kemampuan akademis anak meningkat, dll 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kesadaran banyak stakeholder bahwa peningkatan minat baca anak adalah tanggung jawab bersama seluruh pihak - Meningkatnya minat baca anak.

Sumber : Hasil Analisis

**) Masih berupa keluaran yang diharapkan (expected output)*

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. (2013). *Laporan Hasil Pemetaan Budaya Baca Masyarakat Jawa Barat di 4 Wilayah 20 Kabupaten/Kota*.
- Bender, K. W., Cedeno, J. E., Cirone, J. F., Klaus, K. P., Leahey, L. C., & Menyhert, T. D. (2000). Process Innovation: Case studies of critical success factors. *Engineering Management Journal*, 12(4), 17-24.
- Borins, Sanford. (2000). *Loose Cannons and Rule Breakers, or Enterprising Leaders? Some Evidence about Innovative Public managers*. In *Public Administration Review*, November/ December 2000, Vol 60, No. 6, 498-507.
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S. and Tinkler, J. (2008). *Digital Era Governance: IT Corporations, the State, and e-Government*, Oxford University Press, New York.
- Frediyanto, D. (2012). Pengaruh Fasilitas Perpustakaan dan Pelayanan Pustakawan Terhadap Minat Baca Masyarakat di Perpustakaan Daerah Kabupaten Boyolali.
- Grydehøj, A. (2013). *Challenges to local government innovation: legal and institutional impediments to the exercise of innovative economic development policy by subnational jurisdictions*. *European Journal of Spatial Development*, 50, 1-22.
- Homburg, V. (2008). *Understanding E-Government: Information Systems in Public Administration*, Routledge, New York.
- Howard, J. H. (2012) *Innovation, Ingenuity and Initiative: The adoption and application of new Ideas in Australian local government*, Canberra, ANSZOG Institute for Governance, Australian Centre of Excellence for Local Government.
- Juniawan Hidayanto (2013) *Upaya Meningkatkan Minat Baca Masyarakat Melalui Taman Bacaan Masyarakat Area Publik Di Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang*; Skripsi, Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Prof. Dr. Tri Joko Raharjo, M.Pd; Pembimbing II: Dr. Daman M.Pd. Skripsi tidak dipublikasikan.
- Kamarck. (2003). *Government Innovation Arround the World*. Boston: Ash Institute for Democratic Governance and Innovation, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, 5-6.
- Ni M. Yudasmini, A.A.I.N. Marhaeni, Nyoman Jampel (2015). *Pengaruh Model Pembelajaran Circ (Cooperative Integrated Reading And Composition) Terhadap Minat Baca Dan Kemampuan Memahami Bacaan Pada Siswa Kelas VI Di Sekolah Dasar Gugus Buruan*. E-Jurnal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (Volume 5, No 1 Tahun 2015). Hlm. 1-9.
- Nixon, Geoff (2014). *Benefits of Reading*. http://www.gemmlearning.com/blog/reading_and_dyslexia/benefits-reading diakses pada tanggal 6 Agustus 2016.
- Nurita (2010) *Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Peningkatan Keaktifan dan Minat Baca di Kelas V SDN Kalirejo 02 Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Dengan Model Pembelajaran Inkuiri Kontekstual*. Skripsi. Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jurusan Kependidikan Sekolah Dasar Dan PraSekolah.

- Universitas Negeri Malang (UM). Pembimbing : (I) Dr. Sa'dun Akbar, M.Pd, (II) Drs. I WayanSutama, M.Pd. Skripsi tidak dipublikasikan.
- Panduwati & Yudan Hermawan (2012) *PKM GT- Book Corner at Hospital sebagai Inovasi Model Perpustakaan Ruang Publik Menuju Masyarakat Cinta Baca*, PLS UNY: Yogyakarta. Karya tulis tidak dipublikasikan.
- Sandjaja, S. (2001). *Pengaruh keterlibatan orang tua terhadap minat membaca anak ditinjau dari pendekatan stress lingkungan*. *Psikodimensia kajian ilmiah psikologi*, 2(1), 17-25.
- Santoso, H., & Sos, S. (2008). *Membangun Minat Baca Anak Usia Dini Melalui Penyediaan Buku Bergambar*.
- Seadatee-Shamir, A. and Siavoshi, Z. (2014) *Reading Performance and Academic Achievement in Early Childhood Bilingual and Monolinguals*. Open Journal of Applied Sciences, 4, 347-353. doi: 10.4236/ojapps.2014.46031; Owusu-Acheaw, Micheal, "Reading Habits Among Students and its Effect on Academic Performance: A Study of Students of Koforidua Polytechnic" (2014). Library Philosophy and Practice (e-journal). Paper 1130. <http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1130>; Asika&Akabuike (2012) *Reading Habits of Undergraduates and their Academic Performances: Issues and Perspectives*. African Research Review Vol 6 (2) doi: <http://dx.doi.org/10.4314/afrrev.v6i2.22>.
- Pattakos, Alex.,Dundon, Elaine. (2003). *Cultivating Innovation in Government; Oxymoron or Core Competency?* In Canadian Government Executive, Issue 3, 14-16.

MODEL INOVASI SISTEM INFORMASI PENILAIAN DI PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Oleh :
Susy Ella & Indra Risni Utami

A. PENDAHULUAN

Semenjak era reformasi birokrasi, pemerintah dan masyarakat telah mengalami perubahan cara pandang dalam melihat pelayanan publik. Pelayanan publik bukan lagi sekedar pelayanan seadanya yang diberikan kepada masyarakat. Namun pelayanan publik yang diberikan haruslah memperhatikan kualitas dan juga standar pelayanan. Sebagaimana yang di atur oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pada Pasal 15 bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan melaksanakan layanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah disusun. Selain itu, masyarakat pada era keterbukaan informasi ini sudah semakin kritis dalam menilai kinerja pemerintah. Bukan hal yang tabu lagi bagi masyarakat untuk mengkritik pemerintah jika layanan yang mereka terima tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memenuhi tuntutan kebijakan dan juga masyarakat tersebut, maka pemerintah baik di pusat maupun di daerah terus berupaya melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan publik. Sehingga berbagai inovasi pun terus bermunculan terkait dengan pelayanan publik.

Salah satu daerah yang tengah disorot sebagai daerah yang kaya akan inovasi adalah Kota Bandung. Di bawah kepemimpinan walikota baru yaitu Ridwan Kamil, semangat inovasi sangat terasa di kota kembang ini. Semenjak dilantik sebagai walikota Bandung pada akhir tahun 2013, Ridwan Kamil telah banyak meluncurkan inovasi pelayan publik. Berdasarkan buku Inovasi Pelayanan Publik Kota Bandung Tahun 2014, pemerintah Kota Bandung mempunyai 24 terobosan pada pelayanan publik diantaranya yaitu e-kelurahan, Musrenbang RKPD Online, Unit Reaksi Cepat Perbaikan Infrastruktur Kota, Bansos Online, Taman Tematik, dan lain-lain. Kemudian pada tahun 2015, pemerintah kota Bandung juga kembali meluncurkan beberapa terobosan baru dimana salah satunya adalah inovasi Sistem Informasi Penilaian (SIP) Bandung Juara. Aplikasi yang dapat di akses melalui alamat sip.bandung.go.id ini merupakan sebuah sistem informasi yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menilai kinerja layanan di kecamatan dan kelurahan Kota Bandung. Hasil penilaian masyarakat pada website ini menjadi salah satu indikator walikota dalam menilai kinerja Lurah dan Camat. Melalui website SIP Bdg Juara ini, manfaat yang diharapkan oleh pemerintah kota Bandung adalah meningkatnya kinerja pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan. Selain itu juga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk mau berpatisipasi dalam pembangunan kota Bandung.

Melihat besarnya potensi manfaat yang dapat diperoleh oleh pemerintah daerah melalui inovasi sistem informasi penilaian ini, maka Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara (PKP2A I LAN) melalui unit Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara (KKIAN) memandang perlu untuk menelaah lebih jauh mengenai inovasi ini.

Adapun rumusan masalah tersebut dapat diturunkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana desain inovasi SIP Bdg Juara?
2. Bagaimana implementasi inovasi SIP Bdg Juara?
3. Apa saja kelebihan dan kekurangan inovasi SIP Bdg Juara?
4. Apa saja prasyarat operasional untuk mengembangkan inovasi SIP Bdg Juara?
5. Bagaimana potensi manfaat dan manfaat yang diperoleh dari inovasi tersebut?
6. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam implementasi inovasi SIP Bdg Juara?
7. Apa rekomendasi untuk pengembangan inovasi SIP Bdg Juara kedepannya?

B. HASIL PENELITIAN

Sejak kepemimpinan Ridwan Kamil sebagai Walikota, pemerintah Kota Bandung banyak melahirkan inovasi yang berkaitan dengan teknologi. Hal ini terjadi karena Ridwan Kamil ingin menjadikan Bandung sebagai *smart city* (kota pintar). Pemerintah Kota Bandung yang menjadi bagian dari sistem kota karena menjalankan roda pemerintahan, tentunya juga tak luput jadi sasaran pemanfaatan teknologi agar dapat menjadi *smart government*. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung cenderung berorientasi pada Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung program kerjanya. Salah satu inovasi pemerintah Kota Bandung yang berorientasi pada TIK adalah Sistem Informasi Penilaian Bandung Juara (SIP Bdg Juara).

Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah penjelasan mengenai model inovasi SIP Bdg Juara yang dikembangkan dan diterapkan oleh pemerintah Kota Bandung.

B.I. Desain Inovasi SIP Bdg Juara

SIP Bdg Juara merupakan sistem informasi yang dibangun untuk menilai kinerja kecamatan dan kelurahan. Sistem informasi ini membantu pemerintah Kota Bandung untuk mendigitalisasi laporan kegiatan dari kewilayahan (kecamatan dan kelurahan). Selain itu, SIP bdg Juara juga menjadi media bagi masyarakat kota Bandung untuk memberi penilaian terhadap kinerja layanan yang diberikan oleh kecamatan dan kelurahan. Kemudian, laporan kegiatan dari kecamatan dan kelurahan serta penilaian dari masyarakat yang diunggah melalui SIP Bdg Juara menjadi indikator dalam menyusun rapor setiap Camat dan Lurah di Kota Bandung. Jika Camat dan Lurah mendapat hasil penilaian yang baik maka akan diberikan *reward* sebagai ganjaran dari kinerja mereka.

B.I.1. Tahapan Pengembangan Inovasi SIP Bdg Juara

Pengembangan inovasi SIP Bdg Juara ini berasal dari keinginan Walikota Ridwan Kamil pada awal kepemimpinannya di akhir tahun 2013 agar pemerintah Kota bandung memiliki sistem penilaian khusus terkait dengan kinerja Camat dan Lurah (Rapor Camat dan Lurah). Maka pada tahun 2014, Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah mengembangkan SIP Bdg Juara. Pada

awal sistem ini dikembangkan, kinerja kecamatan dan kelurahan hanya dinilai oleh warga (sesuai dengan keinginan Ridwan Kamil). Namun berdasarkan hasil evaluasi pada pertengahan tahun 2014, hasil penilaian dari warga tidak dapat menggambarkan sesuatu. Hal ini karena pada sistem ini belum bisa menyarung apakah warga yang memberi penilaian merupakan warga kecamatan dan kelurahan tersebut. Selain itu karena kurangnya sosialisasi, maka data penilaian yang masuk dari warga masih minim. Oleh karena itu, untuk dapat gambaran mengenai kinerja dari kewilayahan maka Bagian Pemerintahan Umum meminta laporan kegiatan dari kecamatan dan kelurahan secara manual. Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja dan laporan manual dari kecamatan kelurahan, maka diperoleh sepuluh besar Kecamatan dan juga Kelurahan yang memiliki kinerja yang baik. *Reward* atau penghargaan yang diberikan kepada Camat dan Lurah yang berhasil membawa daerahnya berkinerja baik adalah berupa studi banding ke Korea Selatan.

Berdasarkan evaluasi pada tahun pertama (2014) pengembangan sistem ini, diperoleh kenyataan bahwa ternyata masih banyak kecamatan dan kelurahan yang tidak mengisi laporan kegiatan secara manual. Oleh karena itu, pada tahun 2015 sistem pelaporan online mulai dijalankan. Tampilan dari website SIP Bdg Juara dirancang untuk *mobile friendly*. Target yang ingin diraih pada tahun ini adalah semua indikator untuk laporan kegiatan terisi. Selain digitalisasi laporan kegiatan dari kewilayahan, Bagian Pemerintahan Umum juga mulai menyiapkan sistem penilaian dari warga walaupun belum optimal. Adapun *reward* yang diperoleh oleh Camat dan Lurah yang berprestasi pada tahun 2015 adalah *short course* (kursus singkat) ke Singapura.

Selanjutnya pada tahun 2016, sistem penilaian dari warga melalui website SIP Bdg Juara mulai diujicobakan. Warga yang mengisi penilaian diidentifikasi melalui akun sosial medianya (Facebook atau Twitter). Filter melalui Nomor Induk Kependudukan juga mulai dilakukan, namun untuk verifikasi data NIK belum dapat dilakukan karena menurut hasil wawancara terbentuk masalah perlindungan data pribadi. Penilaian laporan kegiatan pada tahun ini tidak hanya dilihat dari terisinya semua indikator penilaian tapi juga kualitas laporan. Misalnya kesesuaian photo kegiatan dengan tanggal kegiatan. Selain itu, pada akhir tahun 2016, diharapkan aplikasi SIP Bdg Juara sudah bisa di unduh di *playstore* sehingga dapat diakses oleh stakeholders melalui *smartphone*.

Secara ringkas, tahapan pengembangan (*milestones*) inovasi SIP Bdg Juara adalah sebagai berikut :

Gambar 1. Milestones Pengembangan Inovasi SIP Bdg Juara



Sumber Data : Hasil wawancara dengan narasumber di bagian pemerintahan

B.I.2. Kebijakan

Inovasi SIP Bdg Juara ini memiliki kedudukan yang jelas karena telah mempunyai dasar hukum berupa Peraturan Walikota Bandung Nomor 1354 Tahun 2014 Tentang Penilaian Kinerja Camat dan Lurah Se-kota Bandung. Sebagaimana yang disampaikan pada Perwal tersebut bahwa penilaian kinerja Camat dan Lurah dilakukan dalam rangka pembinaan aparatur pemerintahan. Dengan melaksanakan penilaian kinerja melalui SIP Bdg Juara ini maka diharapkan dapat mendorong kinerja Kecamatan dan Kelurahan dalam memberikan pelayanan publik. Selain itu juga akan membantu percepatan reformasi birokrasi di Kewilayahannya. Pada kebijakan ini, diatur tentang tim penilai, mekanisme penilaian, dan instrumen penilaian.

Selain itu, pemerintah Kota Bandung juga menerbitkan kebijakan yang menjadi dasar hukum untuk tim penilai dan sekretariat evaluasi kinerja Camat dan Lurah. Kebijakan mengenai hal ini di atur melalui Keputusan Walikota Bandung. Untuk penilaian tahun 2015 adalah Keputusan Walikota Bandung Nomor 100/Kep.521-Ass I/2015 Tentang Tim Penilai dan Sekretariat Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015. Kebijakan ini menetapkan susunan keanggotan tim dan kesekretariatan serta tugas pokoknya.

B.I.3. Stakeholders

Dalam pengembangan inovasi SIP Bdg Juara, terdapat beberapa stakeholders yang terlibat yaitu Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Tim Penilai dan Sekretariat, dan warga Kota Bandung.

1) Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah

Bagian Pemerintahan Umum di Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bandung merupakan leading sector dalam pengembangan inovasi SIP bdg Juara. Sebagai pembina kecamatan dan kelurahan maka Bagian Pemerintahan Umum bertanggung jawab dalam perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan inovasi SIP Bdg Juara.

Inovasi ini selain selaras dengan visi misi yang ingin diraih, juga merupakan bagian tugas pokok dan fungsi Bagian Pemerintahan Umum. Adapun visi dari Bagian Pemerintahan Umum adalah “Terwujudnya profesionalisme aparatur, serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang unggul dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada perangkat daerah”. Untuk mencapai visi tersebut, Bagian Pemerintahan Umum menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan mendayagunakan aparatur kewilayahan;
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
4. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
5. Menata sistem dan prosedur penyelenggaraan pemerintahan;
6. Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Walikota bandung Nomor 298 Tahun 2013, Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten Pemerintahan lingkup pemerintahan umum.

Disamping itu, berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 100/Kep.521-Ass I/2015, Bagian Pemerintahan Umum juga ditetapkan sebagai anggota Tim Penilai dan Sekretariat Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah untuk tahun anggaran 2015.

2) Kecamatan dan Kelurahan

Kecamatan dan Kelurahan merupakan pihak yang dinilai kinerjanya. Merujuk dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2017, Kota Bandung memiliki 30 kecamatan dan 151 kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 250 Tahun 2008, kecamatan memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Sedangkan kelurahan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan Walikota. Adapun urusan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada kewilayahan di atur melalui Peraturan Walikota Nomor 185 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung kepada Camat dan Lurah. Urusan Walikota yang dilimpahkan mencakup 24 Bidang Urusan. Pelimpahan sebagian kewenangan kepada level terkecil pemerintah kota merupakan strategi desentralisasi dari Ridwan Kamil dalam membangun kota Bandung yang akan disinergikan dengan dua aspek lainnya yaitu inovasi dan kolaborasi.

3) Tim Penilai dan Sekretariat

Sebagaimana di atur oleh Keputusan Walikota Nomor 100/Kep.521-Ass I/2015 bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan evaluasi maka dibentuk Tim Penilai dan Sekretariat. Tim Penilai terdiri dari berbagai unsur di lingkungan pemerintah Kota Bandung yaitu sebagai berikut :

- Pembina : Walikota dan Wakil Walikota Bandung
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung
- Ketua : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung
- Anggota :
 1. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
 2. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
 3. Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
 4. Kepala Bidang Pengembangan Karier pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;
 5. Kepala Bidang Pertamanan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
 6. Kepala Sub Bagian Sistem Informasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 7. Kepala Sub Bidang Rehabilitasi Air dan Tanah pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
 8. Kepala Sub Bidang Bina Infrastruktur Lingkungan Masyarakat Miskin pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
 9. Kepala Sub Bagian Bina Kecamatan pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 10. Kepala Sub Bagian Bina Kelurahan pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung;

11. Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
12. Unsur pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Sedangkan tugas pokok dari Tim Penilai adalah : 1) Melakukan verifikasi data yang disampaikan oleh Camat dan Lurah terkait dengan instrumen penilaian pada kegiatan evaluasi kinerja Camat dan Lurah; 2) Melakukan peninjauan lapangan terhadap data-data yang disampaikan oleh Camat dan Lurah terkait dengan instrumen penilaian pada kegiatan evaluasi kinerja Camat dan Lurah; 3) Memberi penilaian dan membuat rekapitulasi hasil penilaian serta menandatangani Berita Acara Penilaian; dan 4) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Selain membentuk Tim Penilai, pemerintah kota Bandung juga membentuk Kesekretariatan yang terdiri dari :

- Sekretaris I : Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris II : Kepala Sub Bagian Bina Kecamatan pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris III : Kepala Sub Bagian Bina Kelurahan pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota :
 1. Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung.
 2. Unsur pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung.
 3. Unsur pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung.
 4. Kelompok Pembantu Pimpinan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
 5. Unsur di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Pada kebijakan tersebut juga dijabarkan bahwa tugas pokok dari Sekretaris I adalah : 1) Mengkoordinir pelaksanaan evaluasi kinerja Camat dan Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 2) Menyiapkan raport Lurah dan prosesi penyampaiannya. Selanjutnya tugas pokok dari Sekretaris II adalah : 1) Memfasilitasi pelaksanaan kesekretariatan Evaluasi Kinerja Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 2) Melaporan pelaksanaan kesekretariatan kegiatan Evaluasi Kinerja Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung kepada Sekretaris; dan 3) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Sekretaris II berkaitan dengan kegiatan Evaluasi Kinerja Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Kemudian untuk Sekretaris III diberikan tugas pokok sebagai berikut : 1) Memfasilitasi pelaksanaan kesekretariatan Evaluasi Kinerja Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 2) Melaporan pelaksanaan kesekretariatan kegiatan Evaluasi Kinerja Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung kepada Sekretaris; dan 3) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan

Sekretaris III berkaitan dengan kegiatan Evaluasi Kinerja Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Sedangkan Anggota memiliki tugas pokok : 1) Memfasilitasi kebutuhan administrasi kegiatan evaluasi kinerja Camat dan Lurah dan kesekretariatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 2) Menyiapkan raport Camat dan Lurah serta prosesi penyampaiannya; dan 3) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

4) Warga

Warga Kota Bandung juga menjadi stakeholders dalam pelaksanaan inovasi SIP Bdg Juara. Warga Kota Bandung diharapkan berpartisipasi dalam proses penilaian terhadap kinerja layanan di kecamatan dan kelurahan tempat mereka tinggal. Sebagai pihak yang merasakan langsung bagaimana kualitas layanan yang diberikan oleh kecamatan dan kelurahan maka keterlibatan warga dalam inovasi SIP Bdg Juara menjadi penting.

Menurut Badan Pusat Statistik Kota Bandung pada Kota Bandung Dalam Angka 2015, penduduk Kota Bandung tahun 2014 adalah 2.470.802 orang dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 1.248.478 orang dan penduduk perempuan sebanyak 1.222.324 orang. Rata-rata kepadatan penduduk kota ini 15.713 jiwa/km2.

B.I.4. Anggaran

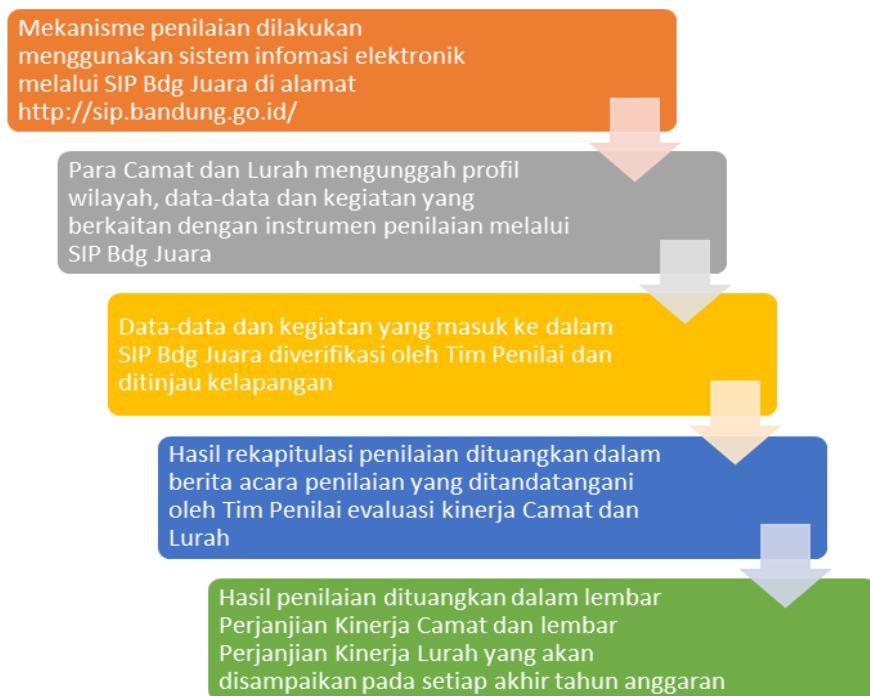
Pada tahun 2015 adalah masa transisi dimana program pelaporan kinerja yang awalnya bersifat manual menggunakan dokumen dialihkan menjadi menggunakan sistem digital. Adapun anggaran yang dikeluarkan untuk program SIP ini menurut hasil wawancara adalah sebesar Rp.150.000.000,-. Anggaran sejumlah itu dipergunakan khusus untuk pengembangan sistem yang dibagi menjadi tiga paket, yaitu :

1. Perencanaan
2. Pengembangan aplikasi dan
3. Evaluasi

Pada tahun 2015 memang belum ada penambahan program kegiatan dan baru sebatas pembangunan sistem aplikasi. Jika ditahun berikutnya ada penambahan indikator kegiatan nantinya akan ada penambahan anggaran yang sifatnya fleksibel dan dinamis.

B.I.5. Mekanisme Penilaian

Mekanisme penilaian kinerja Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung secara umum juga di atur oleh Perwal No. 1354/2014, yaitu sebagai berikut :



Gambar 2. Mekanisme Penilaian Kinerja Camat dan Lurah Melalui SIP Bdg Juara

Untuk lebih rincinya, berikut ini adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan evaluasi kinerja kecamatan dan kelurahan yang menjadi bagian dari SOP di Bagian Pemerintahan Umum :

- a. Kepala Sub Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan membentuk Tim Sekretariat Evaluasi Kinerja camat dan lurah;
- b. Fungsional Umum membentuk Tim Penilai Evaluasi Kinerja camat dan lurah;
- c. Tim Penilai menyusun indikator evaluasi Kinerja camat dan lurah;
- d. Tim Penilai menyusun Peraturan Walikota Bandung tentang Sistem Penilaian Evaluasi Kinerja Bagi camat dan lurah;
- e. Fungsional Umum melakukan sosialisasi indikator dan pengisian Evaluasi Kinerja camat dan lurah;
- f. Fungsional Umum melakukan Bimbingan Teknis pengisian evaluasi kinerja camat dan lurah melalui aplikasi SIP;
- g. Fungsional Umum memverifikasi data pengisian evaluasi kinerja camat dan lurah melalui aplikasi SIP;

- h. Fungsional Umum melakukan monitoring dan evaluasi pengisian evaluasi kinerja camat dan lurah melalui aplikasi SIP;
- i. Tim Penilai presentasi hasil monitoring dan evaluasi pengisian evaluasi kinerja camat dan lurah melalui aplikasi SIP kepada tim penilai;
- j. Tim Penilai melakukan rechecking terhadap 15 besar camat dan lurah hasil evaluasi kinerja;
- k. Tim Penilai presentasi hasil rechecking kepada pimpinan
- l. Fungsional Umum menyusun sertifikat dan daftar nilai evaluasi kinerja camat dan lurah;
- m. Kepala Bagian Pemerintahan Umum menyerahkan hasil evaluasi kinerja camat dan lurah;

B.I.6. Instrumen Penilaian Kinerja Camat dan Lurah

Untuk menilai kinerja Camat dan Lurah, tentunya harus ada instrumen penilaiannya. Terdapat dua kategori penilaian pada SIP Bdg Juara yaitu penilaian dari internal pemerintah Kota Bandung dan penilaian dari eksternal (warga). Instrumen penilaian yang ditetapkan bersama selaras dengan Perjanjian Kinerja Camat dan Lurah setiap tahunnya.

1) Penilaian Internal

Penilaian internal dilakukan oleh Tim Penilai yang telah ditetapkan berdasarkan data-data yang masuk di aplikasi SIP Bdg Juara. Terdapat empat aspek yang akan dinilai dalam penilaian internal yaitu 1) Kualitas pelayanan publik; 2) Kinerja Penyelenggara Tugas Umum Pemerintahan; 3) Ketertiban, kebersihan, keindahan, dan lingkungan hidup; dan 4) Inovasi, kreativitas, dan peningkatan indeks kebahagiaan.

Aspek-aspek di atas dinilai berdasarkan laporan atau data yang diunggah oleh kecamatan dan kelurahan pada aplikasi SIP Bdg Juara. Laporan yang diberikan dibedakan kedalam tiga jenis laporan. Pertama adalah laporan insidental yaitu laporan yang tidak disampaikan secara rutin. Laporan insidental baru disusun dan disampaikan bila ada permintaan dari Walikota, Bagian Pemerintahan Umum, dan pihak lainnya sehubungan dengan adanya masalah tertentu. Kedua adalah laporan bulanan yang harus rutin disampaikan setiap tanggal tertentu di akhir bulan. Ketiga adalah laporan tahunan yang disampaikan rutin setiap akhir tahun.

Aplikasi SIP Bdg Juara juga bisa digunakan untuk penilaian lainnya terkait dengan kecamatan dan kelurahan. Misalnya penilaian Adipura dimana aplikasi SIP Bdg Juara menjadi media untuk mengunggah, memverifikasi, dan menilai data-data yang terkait penilaian Adipura. Aplikasi ini memang dirancang dinamis, sehingga Bagian Pemerintahan Umum suatu saat bisa menambahkan instrumen penilaian dan menambahkan menu aplikasi jika sesuai kebutuhan.

2) Penilaian Eksternal

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa warga Kota Bandung dapat memberi penilaian terhadap kinerja layanan kecamatan dan kelurahan. Untuk dapat memberi penilaian tersebut maka warga dapat mengakses website SIP Bdg Juara di <http://sip.bandung.go.id/>. Tampilan awal atau *homepage* website SIP Bdg Juara ketika diakses adalah seperti ini :



Gambar 3. Laman Website SIP Bdg Juara

Setelah informasi singkat mengenai kecamatan atau kelurahan yang akan dinilai, warga disuguh menu penilaian yang terdiri dari beberapa aspek yaitu ketertiban, keindahan, kebersihan, index kebahagiaan, *ngabandungan* (berinteraksi atau perhatian dengan warga), dan pelayanan publik. Untuk lebih jelasnya mengenai rincian instrumen penilaian dari warga ini dapat dilihat pada dua tabel berikut :

Tabel 1. Instrumen Penilaian Eksternal untuk Evaluasi Kinerja Camat di Pemerintah Kota Bandung

Aspek Penilaian	Instrumen Penilaian
Ketertiban	Bagaimana tingkat ketertiban di "nama kecamatan"?
Keindahan	Bagaimana tingkat keindahan di "nama kecamatan"?
Kebersihan	Bagaimana tingkat kebersihan di kecamatan "nama kecamatan"?
Index Kebahagiaan	Seberapa sering Camat mengadakan acara untuk meningkatkan index kebahagiaan di kecamatan "nama kecamatan"?
NgaBandungan	Seberapa sering Anda melihat Camat menemui warga di kecamatan "nama kecamatan"?
Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none">1. Surat pengantar pengurusan KTP ke Dinas Kependudukan dan pengambilan foto2. Surat pengantar pengurusan KK ke Dinas Kependudukan3. Surat pengantar pengurusan surat keterangan kelahiran ke Dinas Kependudukan4. Persetujuan surat keterangan atas tanah untuk pengurusan sertifikat tanah5. Persetujuan ijin domisili perusahaan6. Persetujuan surat keterangan pindah

	7. Persetujuan surat keterangan tidak mampu 8. Surat keterangan pensiun 9. Persetujuan surat keterangan pengakuan anak
--	--

Sumber : Website SIP Bdg Juara, 2016

Tabel 2. Instrumen Penilaian Eksternal untuk Evaluasi Kinerja Lurah di Pemerintah Kota Bandung

Aspek Penilaian	Instrumen Penilaian
Ketertiban	Bagaimana tingkat ketertiban di "nama kelurahan"?
Keindahan	Bagaimana tingkat keindahan di "nama kelurahan"?
Kebersihan	Bagaimana tingkat kebersihan di kecamatan "nama kelurahan"?
Index Kebahagiaan	Seberapa sering Lurah mengadakan acara untuk meningkatkan index kebahagiaan di kelurahan "nama kelurahan"?
NgaBandungan	Seberapa sering Anda melihat Lurah menemui warga di kelurahan "nama kelurahan"?
Pelayanan Publik	1. Surat pengantar pembuatan KTP ke kecamatan 2. Surat pengantar pembuatan KK ke kecamatan 3. Surat pengantar pembuatan surat keterangan lahir ke kecamatan 4. Surat keterangan kematian 5. Pengurusan kelengkapan warkah surat tanah 6. Surat keterangan serbaguna (untuk ijin domisili, imb, dll) 7. Surat pengantar pindah keluar daerah 8. Surat keterangan datang 9. Surat keterangan tidak mampu 10. Tanda tangan Lurah untuk surat keterangan pensiun dari taspen/kantor pos 11. Surat pengantar pembuatan keterangan perkawinan ke kecamatan 12. Surat pengantar pembuatan keterangan pengakuan anak ke kecamatan

Sumber : Website SIP Bdg Juara, 2016

Setelah warga mengirim penilaianannya, selanjutnya warga diminta untuk koneksi dengan akun sosial medianya (Facebook atau Twitter) agar penilaianannya dapat dihitung. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi warga yang tidak sesuai domisili dengan kecamatan dan kelurahan yang dinilai. Selain itu juga untuk menghindari penilaian dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga diharapkan nilai yang masuk merupakan data yang valid.

Jika warga sudah *login* ke salah satu akun sosial media, maka warga akan diminta untuk melengkapi data diri pada form yang telah disediakan. Data nama dan kelurahan domisili otomatis akan tampil sesuai dengan data pada sosial media

dan wilayah yang dipilih sebelumnya. Sedangkan data yang harus dilengkapi adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor telepon seluler.

Setelah warga menyelesaikan kelengkapan data diri pada form tersebut, maka penilaian dari warga akan masuk perhitungan dan diverifikasi oleh para verifikator di Bagian Pemerintahan Umum.

C. PROGRESS IMPLEMENTASI INOVASI SIP BDG JUARA

Sejauh ini, implementasi inovasi SIP Bdg Juara berjalan dengan baik jika dilihat dari pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh pihak internal. Sejak dilaksanakan dari tahun 2014, pemerintah Kota Bandung telah berhasil dilaksanakan penilaian kinerja kecamatan dan kelurahan selama dua kali yaitu 2014 dan 2015. Sedangkan pada tahun ini masih dalam proses pengumpulan data sesuai dengan instrumen penilaian. Pada tahun 2014, sepuluh Camat dan Lurah yang terbaik kinerjanya pada tahun 2014 mendapatkan *reward* untuk studi banding ke Korea Selatan.

Sedangkan pada tahun 2015, *reward* yang diberikan oleh pemerintah Kota Bandung berupa *short course* ke Singapura. Adapun kecamatan dan kelurahan yang berhasil meraih gelar "10 Terbaik Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah" adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Sepuluh Terbaik Evaluasi Kinerja Camat Tahun 2015

Peringkat	Nama Kecamatan	Nilai
1	Panyileukan	92.8275
2	Buahbatu	91.9295
3	Cinambo	87.9445
4	Cibiru	86.6175
5	Arcamanik	85.676
6	Lengkong	83.2865
7	Bandung Wetan	82.3005
8	Sukajadi	81.4805
9	Antapani	80.6415
10	Rancasari	80.4665

Sumber : Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Kota Bandung, 2016

Tabel 4. Sepuluh Terbaik Evaluasi Kinerja Lurah Tahun 2015

Peringkat	Nama Kelurahan	Nama Kecamatan	Nilai
1	Neglasari	Cibeunying Kaler	90.2675
2	Sukagalih	Sukajadi	90.2595
3	Rancanumpang	Gedebage	90.0685
4	Maleber	Andir	89.8585
5	Palasari	Cibiru	89.689
6	Cipadung	Cibiru	89.525
7	Nyengseret	Astana Anyar	88.901
8	Pasirwangi	Ujungberung	88.8035

Peringkat	Nama Kelurahan	Nama Kecamatan	Nilai
9	Cimincrang	Gedebage	88.676
10	Mekarjaya	Rancasari	88.625

Sumber : Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Kota Bandung, 2016

Kemudian jika dilihat dari implementasi penilaian dari pihak eksternal atau warga, ternyata tidak berjalan sukses seperti penilaian internal. Karena berdasarkan data per tanggal 4 Agustus 2016, jumlah warga yang berpartisipasi menilai kinerja kecamatan dan kelurahan masih sangat sedikit yaitu 12.329 partisipan untuk kecamatan dan 17.392 partisipan untuk kelurahan. Berikut kami sajikan jumlah partisipasi masyarakat yang menilai kecamatan dan kelurahan :

Tabel 5. Sepuluh Kecamatan Teratas
Berdasarkan Jumlah Partisipasi Masyarakat Tahun 2016

Peringkat	Nama Kecamatan	Rata-rata Penilaian Warga	Rata-rata Pelayanan	Rata-rata Waktu Pelayanan	Jumlah Partisipan
1	Cibiru	2.36	1.55	117.50	1813
2	Ujungberung	3.30	3.90	7.18	1211
3	Babakan Ciparay	2.04	2.17	29.29	875
4	Batununggal	2.12	1.70	45.53	861
5	Arcamanik	2.58	3.50	16.70	599
6	Buahbatu	2.35	2.18	31.79	516
7	Andir	3.36	3.16	2.75	484
8	Bojongloa Kidul	2.35	2.30	38.40	484
9	Regol	2.44	3.53	35.38	445
10	Kiaracondong	1.87	2.35	10.42	423

Sumber : Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Kota Bandung, di olah (2016)

Tabel di atas menyajikan sepuluh kecamatan yang paling banyak di nilai oleh warganya. Atau dengan kata lain jumlah partisipasi masyarakat dalam implementasi inovasi ini lebih baik daripada kecamatan lainnya. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Cibiru paling banyak dinilai warga yaitu berjumlah 1813 warga yang menilai; kemudian di ikuti oleh Kecamatan Ujungberung sebanyak 1211 warga; dan Babakan Ciparay pada peringkat ketiga dengan 875 warga yang berpartisipasi.

Tabel 6. Sepuluh Kelurahan Teratas Berdasarkan Jumlah Partisipasi Masyarakat Tahun 2016

Peringkat	Nama Kelurahan	Rata-rata Penilaian Warga	Rata-rata Pelayanan	Rata-rata Waktu Pelayanan	Jumlah Partisipan
1	Balonggede	3.11	4.20	41.52	1668
2	Sukabunglah	4.21	4.97	1.04	804
3	Pasirendah	3.40	3.82	1.27	618
4	Margahayu Utara	4.39	4.51	1.21	491
5	Rancabolang	4.33	4.52	1.35	460
6	Cisaranten Kulon	1.97	2.66	19.29	446
7	Cibangkong	2.00	2.81	24.54	445
8	Pasirjati	4.52	4.90	0.82	425
9	Mekarjaya	2.85	3.84	11.10	402
10	Pasir Kaliki	3.92	4.64	1.00	396

Sumber : Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Kota Bandung, di olah (2016)

Untuk kelurahan, yang paling banyak jumlah partisipan dalam menilai pelaksanaan inovasi SIP Bdg Juara adalah Kelurahan Balonggede dengan 1668 partisipan, diikuti oleh Kelurahan Sukabunglah dengan 804 partisipan, dan kemudian Kelurahan Pasirendah sebanyak 618 partisipan.

Dari sekian banyak nilai yang masuk dari warga melalui website SIP Bdg Juara, sampai saat ini nilai tersebut belum mutlak dijadikan indikator untuk mengukur kinerja Camat dan Lurah di pemerintah Kota Bandung. Bagian Pemerintahan Umum masih sedang mengupayakan cara agar dapat memastikan bahwa data yang masuk melalui aplikasi ini memang merupakan data yang valid dari warga. Data warga baru bisa dicek melalui dua pilihan akun sosial media yaitu Facebook dan Twitter. Sedangkan untuk NIK yang dimasukkan belum bisa digunakan untuk mengecek data warga. Disamping itu, jumlah penilaian dari warga masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Bandung. Bahkan ada kelurahan yang tidak memperoleh penilaian sama sekali dari warga. Sehingga data penilaian warga yang masuk sejauh ini belum bisa menggambarkan data sesungguhnya yang terjadi dilapangan atau belum bisa mewakili suara dari seluruh warga. Oleh karena itu, hasil penilaian yang masuk hanya digunakan untuk informasi tambahan atau jadi data pembanding bagi tim penilai.

D. KELEBIHAN DAN KELEMAHAN INOVASI SIP BDG JUARA

Setelah dijabarkan di atas mengenai desain inovasi dan progress implementasi inovasi SIP Bdg Juara, selanjutnya akan diidentifikasi mengenai kelebihan dan kekurangannya. Agar bisa menjadi referensi untuk pengembangkan inovasi kedepannya.

1. Kelebihan Inovasi SIP Bdg Juara

Adapun kelebihan yang dimiliki oleh inovasi yang dikembangkan oleh Bagian Pemerintah Umum ini adalah sebagai berikut :

- Dukungan Pimpinan
Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa inovasi ini diinisiasi oleh Ridwan Kamil. Sosok walikota yang menjadi motor penggerak untuk mengembangkan inovasi ini menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi SIP Bdg Juara. Karena selain memberikan ide, beliau juga memantau langsung bagaimana pelaksanaannya. Komitmen dan dukungan beliau mampu mendorong pihak-pihak yang terkait dengan inovasi ini seperti Bagian Pemerintahan Umum, kecamatan, dan kelurahan untuk serius mengembangkan dan melaksanakan inovasi ini.
- Mempunyai dasar hukum
Inovasi SIP Bdg Juara memiliki dasar hukum yang kuat yaitu berupa Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota. Ini merupakan kekuatan bagi pelaksana inovasi untuk bisa dengan leluasa mengembangkan dan melaksanakan SIP Bdg Juara.
- Koordinasi yang baik
Inovasi SIP Bdg Juara melibatkan banyak pihak baik dalam pengembangan maupun pelaksanaannya. Sehingga masalah koordinasi antara stakeholders juga menjadi faktor kunci dalam implementasi inovasi ini. Koordinasi yang dilakukan oleh stakeholders yang terlibat pada inovasi ini tidak hanya dilakukan melalui pertemuan langsung tapi juga menggunakan media komunikasi WhatsApp. Selain itu, pada aplikasi SIP Bdg Juara juga disediakan media untuk menghubungi pihak Admin jika ada yang perlu dikomunikasi. Jenis media komunikasi yang dipilih dan disediakan tersebut membuat jalur komunikasi menjadi efektif dan efisien.
- Instrumen Penilaian yang jelas
Karena inti dari inovasi ini adalah menilai kinerja kecamatan dan kelurahan, maka tentunya instrumen penilaian merupakan inti dari SIP Bdg Juara. Kelebihan dari SIP Bdg Juara adalah instrumen penilaian yang ada merupakan hasil kesepakatan bersama antara pimpinan, Bagian Pemerintahan Umum, dan kewilayahan. Instrumen penilaian juga disusun berdasarkan perjanjian kinerja para Camat dan Lurah di Kota Bandung. Sehingga hasil penilaian dapat memberikan gambaran kinerja mereka. Selain itu, data yang diberikan oleh kecamatan dan kelurahan untuk dinilai tidak hanya berupa laporan tapi juga berupa bukti photo. Sehingga data pendukung yang ada lebih lengkap.
- Aplikasi SIP Bdg Juara yang dinamis dan *user friendly*
Kelebihan dari aplikasi ini adalah sifatnya yang dinamis. Maksudnya walaupun aplikasi ini dibangun oleh pihak ketiga atau *software developer*, namun pihak Bagian Pemerintahan Pemerintahan Umum bisa menambahkan, mengurangi, dan mengedit menu-menu aplikasi serta instrumen penilaian. Keleluasaan dalam mengelola konten dari aplikasi ini mengurangi ketergantungan terhadap pihak ketiga sehingga jadi lebih efektif. Selain itu, tampilan dari website SIP Bdg Juara juga *user friendly*.

Desain yang sederhana membantu pengguna untuk mudah mengerti cara menggunakan dan juga lancar mengaksesnya karena tidak terlalu berat. Selain itu, aplikasi ini juga mampu mendeteksi informasi mengenai photo yang diunggah sehingga diketahui tanggal pembuatannya sehingga dapat mengantisipasi kecamatan atau kelurahan yang ingin memberikan data palsu.

- *Reward* yang menggiurkan

Penghargaan atau *reward* merupakan hal yang tak kalah penting dalam mendorong terlaksananya sebuah inovasi. Karena untuk mendorong seseorang atau unit kerja untuk berubah harus ada sesuatu yang ditawarkan sebagai *reward*. Penghargaan yang menggiurkan tentunya akan memotivasi pihak terkait untuk mendapatkannya. Dengan pemerintah Kota Bandung memberikan *reward* berupa piagam penghargaan dan kesempatan untuk keluar negeri juga kelebihan yang dimiliki oleh inovasi ini. Dan sejauh ini pemberian *reward* tersebut berjalan dengan lancar.

2. Kekurangan Inovasi SIP Bdg Juara

Berikut ini hasil identifikasi kekurangan dalam inovasi SIP Bdg Juara yang nantinya diharapkan dapat menjadi catatan penting untuk pengembangan SIP Bdg Juara ke depannya :

- Rencana induk pengembangan SIP Bdg Juara tidak ada

Inovasi ini dikembangkan dan dilaksanakan tanpa adanya dokumen *masterplan*. Sehingga tahap-tahap pengembangan (*milestone*) SIP Bdg Juara tidak tertuang dengan jelas. Padahal perencanaan dalam inovasi akan memperjelas mengenai apa saja yang dibutuhkan. Jika kemudian hari akan ada perbaikan, penambahan, dan pengurangan maka akan tetap sejalan dengan rencana induk awal. Tanpa adanya rencana induk SIP Bdg Juara maka tidak tergambaran dengan jelas dan terdokumentasikan mengenai latar belakang, tujuan, tahap-tahap pengembangan, dan hal lainnya terkait pengembangan SIP Bdg Juara. Sehingga proses pengembangan kedepannya akan berjalan gamang karena tidak adanya acuan yang ditetapkan dari hasil perencanaan yang matang.

- Sosialisasi ke warga kurang optimal

Jika kita lihat dari data di atas mengenai jumlah masyarakat yang ikut berpartisipasi untuk menilai kinerja kecamatan dan kelurahan maka dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi pada inovasi SIP Bdg Juara masih kurang. Karena dari total penduduk Bandung yang berusia 15 tahun ke atas pada tahun 2014 (BPS Kota Bandung) yaitu sebanyak 1.890.621 orang, ternyata yang berpartisipasi hanya 29.721 orang. Atau dapat dikatakan bahwa hanya 1,57 persen dari jumlah penduduk dewasa di kota Bandung yang berpartisipasi. Penyebab utama rendahnya partisipasi masyarakat dalam hal ini adalah karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung. Belum ada program sosialisasi yang ditetapkan untuk memberikan informasi mengenai SIP Bdg Juara kepada warga Bandung. Selain itu, strategi yang disusun untuk mendorong masyarakat terlibat dalam inovasi ini juga belum tersedia. Jika dilihat dari hasil tinjauan

ke salah satu kecamatan (Bandung Wetan) dan kelurahan (Cihapit), belum ada informasi yang terkait dengan SIP Bdg Juara disajikan oleh pihak kewilayahan.

- Penilaian warga belum dijadikan indikator kinerja
Setelah SIP Bdg Juara berjalan selama hampir tiga tahun, penilaian dari warga belum juga ditetapkan sebagai indikator untuk mengukur kinerja kecamatan dan kelurahan. Padahal tujuan awal dari inovasi ini adalah melihat kinerja kewilayahan dari penilaian warga. Selain itu dengan tidak dijadikannya sebagai indikator maka dorongan untuk kecamatan dan kelurahan melakukan sosialisasi SIP Bdg Juara kepada masyarakat menjadi kurang. Karena pihak kewilayahan belum menganggap penilaian dari warga itu penting.
- Tidak ada penjelasan singkat mengenai SIP Bdg Juara pada website
Adapun kekurangan yang ditemukan pada website SIP Bdg Juara adalah minimnya informasi mengenai inovasi ini. Pada halaman utama hanya disajikan penjelasan sangat singkat tentang SIP Bdg Juara. namun keterangan lebih lanjut mengenai latar belakang, tujuan, serta mekanisme penilaian tidak ada. Sehingga warga tidak mendapatkan gambaran yang jelas tentang SIP Bdg Juara. Minimnya informasi tentunya membuat warga menjadi bingung. Dengan tidak pahamnya warga tentang urgensi dari inovasi ini tentunya tidak akan mendorong mereka untuk terlibat langsung dalam pelaksanaan SIP Bdg Juara.
- Tidak ada petunjuk penggunaan website SIP Bdg Juara
Selain minimnya informasi mengenai sosok SIP Bdg Juara, petunjuk penggunaan website ini juga tidak tersedia. Walaupun website dirancang sesederhana mungkin agar *user friendly* namun petunjuk penggunaan tetap penting untuk mengantisipasi kebingungan dan kesalahan pengisian dari pengguna. Selain itu, keterangan mengenai diperlukannya akun sosial media untuk bisa menilai di SIP Bdg Juara juga tidak disajikan di awal. Warga baru mengetahui hal tersebut ketika sudah melakukan penilaian. Hal ini tentunya memberikan rasa tidak nyaman bagi pengguna. Karena tidak semua orang mempunyai akun sosial media.
- Warga dibatasi login hanya dari dua sosial media (Facebook dan Twitter)
Data yang masuk dari warga baru di anggap valid jika sudah login melalui salah satu dari dua pilihan akun sosial media tersebut. Hal ini tentunya membatasi warga untuk mau berpartisipasi. Karena tidak semua warga menggunakan sosial media tersebut, dan tidak semua warga juga berkenan untuk aplikasi SIP Bdg Juara koneksi ke akun sosial media miliknya.

E. PRASYARAT OPERASIONAL

Untuk mempermudah daerah lain mereplikasi inovasi SIP Bdg Juara, maka berikut ini hasil identifikasi kami mengenai prasyarat operasional yang dibutuhkan dalam mengembangkan inovasi ini :

1. Dukungan pemimpin
Seperti yang telah dijelaskan pada kelebihan inovasi SIP Bdg Juara bahwa dukungan pemimpin menjadi faktor kunci keberhasilan inovasi ini. Oleh

karena itu perlu adanya *political will* dari pemimpin daerah agar mau mengembangkan inovasi sistem penilaian ini.

2. Dasar hukum

Dasar hukum juga menjadi prasyarat untuk mengembangkan inovasi ini. sehingga dalam proses pengembangan dan pelaksanaannya terlindungi. Apalagi pada sistem informasi penilaian ini melibatkan banyak pihak dan menjadi dasar dalam mengukur kinerja kewilayahan, sehingga penting adanya dasar hukum untuk menjadi landasan dalam segala tindakan pelaksananya.

3. Komitmen stakeholders

Berhasil tidaknya sebuah program pemerintah tidak terlepas dari komitmen pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu perlu adanya penyamaan visi misi bersama sehingga inovasi berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama. Setiap pihak yang terlibat harus jelas tugas dan tanggung jawabnya. Dan stakeholders harus menyadari bahwa semua unsur yang terlibat merupakan penentu keberhasilan inovasi ini.

4. Aplikasi Sistem Informasi Penilaian

Aplikasi juga harus ada dalam inovasi ini. Karena data yang masuk dari kecamatan dan kelurahan serta penilaian dari warga diunggah melalui aplikasi ini. Sistem yang dinamis serta *user friendly* perlu jadi pertimbangan dalam membangun aplikasi ini.

5. Anggaran

Anggaran dibutuhkan dalam mengembangkan aplikasi sistem informasi penilaian dan juga untuk menunjang pelaksanaan kegiatan seperti proses penilaian, penyediaan sarana prasarana, dan *reward*. Khusus untuk aplikasi, jika ada daerah lain yang ingin mereplikasi inovasi ini sebenarnya pemerintah kota Bandung telah bersedia untuk daerah lain memakai aplikasi yang telah mereka kembangkan. Hal ini tentunya akan menjadi lebih efektif dan efisien bagi pemerintah daerah lain untuk mereplikasi inovasi SIP Bdg Juara.

6. Instrumen penilaian kinerja

Instrumen dalam menilai kinerja hendaknya disusun dan disepakati bersama. Dan instrumen penilaian kinerja ini harus jelas dan mampu mengukur kinerja pihak yang akan di nilai. Perjanjian kinerja bisa menjadi acuan dalam menyusun instrumen penilaian sesuai dengan pengalaman pemerintah Kota Bandung.

7. Mekanisme atau SOP yang jelas

Agar inovasi berjalan dengan lancar maka harus disusun SOP atau mekanisme pelaksanaannya. Sehingga dapat menjadi acuan bagi pelaksananya. Adanya standar yang jelas dan ditetapkan bersama alur kegiatannya maka akan meminimalisir terjadinya kesalahan ketika diimplementasikan. Selain itu dokumen SOP juga dapat melindungi pelaksana dari segi hukum.

8. Sarana dan prasarana

Adapun sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mereplikasi inovasi ini adalah 1) komputer atau laptop, namun tidak perlu komputer yang memiliki spesifikasi tertentu; 2) Jaringan internet yang stabil karena aplikasinya

- berbasis online; 3) Kamera untuk mendokumentasikan kegiatan di kecamatan dan kelurahan atau bisa juga menggunakan *smartphone* karena selain bisa akses aplikasi bisa juga mendokumentasikan kegiatan.
9. Sumber daya manusia
Sumber daya yang dibutuhkan adalah yang nantinya jadi tim penilai, tim sekretariat (termasuk di dalamnya verifikator), dan juga operator aplikasi di kecamatan dan kelurahan.

F. MANFAAT DAN POTENSI MANFAAT

Dengan adanya program SIP Bdg Juara maka pihak kecamatan dan kelurahan mengetahui target-target pekerjaan yang harus dilaksanakan. Para Camat dan Lurah merasa terpacu kinerjanya dikarenakan adanya monitoring langsung dari pimpinan dan jajarannya. Namun pada intinya, pelaksanaan tugas-tugas dilaksanakan bukan karena menjalankan program SIP Bdg Juara saja tapi karena memang kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun sesuai dengan hasil wawancara mengenai manfaat dari SIP Bdg Juara ini diantaranya:

- a) Mempermudah pembinaan dan pengawasan
- b) Mempermudah pelaporan
- c) Komunikasi dan rentang kendali lebih mudah
- d) Evaluasi lebih terarah

Sedangkan potensi manfaat yaitu manfaat yang seharusnya dapat dirasakan oleh pemerintah Kota Bandung adalah meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat. Semestinya jika pemerintah mampu mendifusikan inovasi ini kepada masyarakat maka dapat mendorong mereka untuk terlibat dalam penilaian kinerja kecamatan dan kelurahan di Kota Bandung. Keterlibatan masyarakat dalam menilai akan mendapatkan hasil penilaian yang lebih komprehensif. Penilaian kinerja tidak hanya dilihat dari laporan dan bukti dukung kegiatan dari kewilayahan namun juga didapat dari perspektif warganya. Hal ini tentunya akan lebih mendorong para aparatur untuk berkinerja lebih baik. Selain itu, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi akan membuat mereka lebih *aware* terhadap perkembangan lingkungan sendiri dan merasa bertanggung jawab untuk ikut membangun bersama-sama.

G. HAMBATAN

Berdasarkan hasil wawancara dan tinjauan kelapangan, hambatan yang dihadapi pemerintah Kota Bandung dalam pengimplementasian SIP Bdg Juara ini adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya Sumberdaya manusia pengelola
- b. Jaringan Internet yang kurang memadai
- c. Sulitnya Koordinasi dengan SKPD DISDUKCAPIL terkait NIK warga
- d. Sarana prasarana yang belum memadai

H. PENUTUP

H.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dan analisa tim peneliti, maka berikut ini kesimpulan dari penelitian mengenai SIP Bdg Juara ini:

1. Desain inovasi SIP Bdg Juara sudah cukup jelas baik segi dasar hukum, stakeholders yang terlibat, anggaran, mekanisme atau SOP penilaian, dan instrumen penilaian. Namun untuk tahap pengembangan karena dokumen rencana induk belum disusun hingga saat ini maka belum jelas pengembangannya secara komprehensif. Bagian Pemerintahan Umum baru sebatas merencanakan setiap tahun, tapi *milestones* pengembangan yang menggambarkan rencana dalam beberapa tahun kedepan belum ditentukan.
2. Sejak diimplementasikan dari tahun 2014, proses pelaksanaan inovasi SIP Bdg Juara cukup berjalan lancar. Walaupun masih ada hambatan seperti partisipasi masyarakat yang masih rendah, namun Pemerintah Kota Bandung mampu menghasilkan raport Camat dan Lurah dimana hasil penilaian dari penilaian pihak internal. Sejauh ini telah diberikan *reward* kepada sepuluh Camat dan Lurah yang berkinerja baik pada tahun 2014 dan 2015. Dan untuk tahun 2016, proses pengumpulan data kegiatan dari kewilayahan masih terus dilakukan.
3. Kelebihan dari inovasi SIP Bdg Juara adalah dukungan penuh dari pimpinan, memiliki dasar hukum yang jelas; koordinasi antara stakeholders berjalan baik; instrumen penilaian cukup detail, jelas, dan hasil kesepakatan bersama; aplikasi SIP Bdg Juara bersifat dinamis dan *user friendly*; dan *reward* yang ditawarkan menggiurkan. Sedangkan kekurangan yang dimiliki oleh inovasi ini adalah *masterplan* pengembangan SIP Bdg Juara yang belum disusun; sosialisasi ke warga belum optimal; penilaian dari warga belum dijadikan indikator untuk mengukur kinerja kecamatan dan kelurahan; website SIP Bdg Juara tidak menjelaskan dengan baik mengenai inovasi ini; tidak ada petunjuk penggunaan website SIP Bdg Juara; dan warga dibatasi login hanya dari dua sosial media (Facebook dan Twitter) untuk melakukan penilaian.
4. Adapun prasyarat operasional untuk mengembangkan inovasi SIP Bdg Juara adalah diperlukan *political will* dari pimpinan; komitmen dari stakeholders; aplikasi Sistem Informasi Penilaian; anggaran untuk aplikasi, *reward*, sarana prasarana; dan pelaksanaan kegiatan; instrumen penilaian kinerja; mekanisme dan SOP yang jelas; sarana prasarana seperti komputer dan jaringan internet; dan sumber daya manusia untuk tim penilai, tim sekretariat dan . Jika ada daerah lain yang ingin mereplikasi inovasi sistem informasi penilaian untuk kecamatan dan kelurahan maka sebenarnya tidak ada karakteristik khusus daerahnya dan sarana prasarana yang dibutuhkan pun tidak memerlukan spesifikasi tertentu.
5. Manfaat yang dirasakan oleh pemerintah Kota Bandung semenjak adanya inovasi SIP Bdg Juara adalah dapat mempermudah pembinaan dan pengawasan; mempermudah pelaporan; komunikasi dan rentang kendali lebih mudah; dan evaluasi lebih terarah. Sedangkan potensi manfaat yang bisa dirasakan adalah meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat.

6. Hambatan yang dihadapi pemerintah Kota Bandung dalam pengembangan dan pelaksanaan SIP Bdg Juara sejauh ini adalah masih kurangnya sumber daya manusia terutama untuk verifikator data dan operator di kecamatan dan kelurahan; jaringan internet yang masih tergolong lambat; koordinasi dengan Disdukcapil terkait NIK warga masih terhambat; serta penyediaan sarana prasarana pendukung seperti *smartphone*, layar sentuh masih dibutuhkan.

H.2. Rekomendasi

Selanjutnya kami memberikan beberapa masukan dengan mempertimbangkan berbagai kekurangan yang ada pada inovasi yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Bandung ini. Harapannya, rekomendasi untuk inovasi SIP Bdg Juara dapat membantu pemerintah Kota Bandung dan daerah lainnya yang ingin mereplikasi untuk mengembangkan inovasi ini menjadi lebih optimal. Sesuai yang telah kami kaji sebelumnya, Adapun aspek kelemahan dari inovasi ini diantaranya yaitu ; Perencanaan, Sosialisasi, Instrumen Penilaian dan Aplikasi. Dan untuk model pengembangan inovasi ini kedepan kami merekomendasikan hal-hal berikut ini yang dikaitkan pada aspek-aspek kelemahan yang ada :

1. Perencanaan

Walaupun inovasi ini telah berjalan namun demi keberlanjutan inovasi ini maka perlu disusun masterplan pengembangan SIP Bdg Juara. Rencana induk disusun berdasarkan hasil studi dan mampu menggambarkan tahap-tahap pengembangan untuk beberapa tahun kedepan. Sehingga inovasi ini memiliki acuan yang jelas dalam perencanaan

2. Sosialisasi

- a) Menggunakan metode yang efektif untuk dapat mengkomunikasikan SIP Bdg Juara kepada warga Bandung dan mendorong mereka untuk berpartisipasi menilai. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat hendaknya bukan hanya gambaran singkat mengenai SIP Bdg Juara, tapi juga urgensi dari inovasi ini. Selain itu, informasi terbaru serta bagaimana hasil penilaian kinerja kecamatan dan kelurahan juga disampaikan ke masyarakat. Sehingga mereka aware dengan setiap perkembangan SIP Bdg Juara.
- b) Metode sosialisasi agar dapat mendifusikan inovasi ini kepada masyarakat adalah menggunakan saluran media massa dan saluran perseorangan (interpersonal channel). Media massa digunakan untuk meraih sasaran masyarakat yang lebih luas. Sedangkan saluran perseorangan atau peer to peer untuk meraih sasaran dengan lingkup lebih kecil.
- c) Saluran media massa yang dapat menjadi alternatif pilihan untuk sosialisasi adalah stasiun tv lokal, radio, dan media cetak lokal. Jadi tidak hanya mengandalkan media cetak saja. Sehingga jangkauan sosialisasi mencakup berbagai kalangan masyarakat.
- d) Selain itu, optimalkan penggunaan akun sosial media (Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube) pemerintah Kota Bandung. Karena setiap SKPD

di Kota Bandung sudah memiliki beberapa akun sosial media maka sebaiknya lebih intens posting terkait SIP Bdg Juara. Dan karena diantara semua akun resmi atas nama pemerintah Kota Bandung, yang paling popular atau menarik minat masyarakat adalah milik Walikota Ridwan Kamil. Banyak masyarakat bahkan dengan rela membagikan kembali (sharing) informasi yang disampaikan Ridwan Kamil. Setiap beliau posting sesuatu di akun sosial medianya, rata-rata ada ribuan orang yang membagikan kembali. Oleh karena itu akun Ridwan Kamil dapat menjadi saluran prioritas untuk sosialisasi SIP Bdg Juara. Selain itu gunakan juga akun sosial media milik Bagian Pemerintahan Umum, kecamatan, dan kelurahan.

- e) Sedangkan media sosialisasi melalui saluran yang lebih pribadi dapat dilakukan dengan cara berikut ini :
- Kerjasama dengan komunitas. Berhubung Bandung memiliki banyak komunitas yaitu lebih dari 3.000 komunitas, maka pemerintah bisa memanfaatkan komunitas untuk menjadi media sosialisasi. Komunitas dapat menjadi perantara atau penyambung mulut pemerintah kepada warga Bandung.
 - Mengoptimalkan peran kecamatan dan kelurahan beserta jajarannya. Level organisasi yang paling dekat dengan masyarakat adalah kecamatan dan kelurahan yang dibantu oleh RT dan RW. Oleh karena itu perlu mendorong mereka untuk bersedia sosialisasi SIP Bdg Juara kepada warganya. Sosialisasi dapat dilakukan melalui papan pengumuman di kantor kecamatan dan kelurahan, surat himbauan, sosialisasi pada saat pertemuan dengan warga, dan lain-lain.
- f) Strategi lain agar masyarakat mau memberi penilaian adalah dengan cara mengarahkan masyarakat untuk mengisi SIP Bdg Juara ketika mereka datang ke kantor kecamatan dan kelurahan atau ketika ada pertemuan dengan warga. Bagi warga yang tidak melek teknologi, maka bisa dilakukan usaha jemput bola. Jadi pihak kecamatan dan kelurahan mendatangi warga dan menuntun mereka untuk mengisi SIP Bdg Juara melalui aplikasi layar sentuh yang dibuat sesederhana mungkin.

3. Instrumen Penilaian

- a) Hendaknya penilaian dari warga dijadikan indikator dalam mengukur kinerja kecamatan dan kelurahan. Sehingga penilaian terhadap kinerja kecamatan dan kelurahan menjadi lebih komprehensif. Karena penilaian tidak hanya dilihat dari kaca mata internal yang dilihat dari bukti laporan dan dokumentasi, namun juga dari sisi eksternal yaitu masyarakat yang merasakan langsung bagaimana pelayanan yang mereka terima.
- b) Dijadikannya penilaian masyarakat sebagai tolak ukur dalam melihat kinerja kewilayahan tentunya akan mendorong mereka untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Selain itu juga dapat mendorong pihak kecamatan dan kelurahan untuk sosialisasi kepada warga karena sudah menjadi bagian instrumen penilaian.

- c) Selain itu, jika penilaian warga dijadikan indikator penilaian, maka warga akan merasa benar-benar menjadi bagian dalam memajuan daerah. Sehingga berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat.

4. Aplikasi

- a) Pada website, perlu ditambah informasi mengenai apa itu SIP Bdg Juara. Sehingga warga paham mengenai inovasi ini dan tertarik untuk berpartisipasi. Karena ketidakpahaman serta minimnya informasi dapat menurunkan minat masyarakat untuk berpartisipasi. Selain itu, dapat disertakan juga beberapa dokumen pendukung seperti kebijakan mengenai SIP Bdg Juara, SOP, dan dokumen yang terkait sehingga masyarakat memiliki gambaran yang jelas dan komprehensif.
- b) Perlu juga dibuat petunjuk penggunaan website SIP Bdg Juara. Dapat ditambahkan menu Frequently Asked Question (FAQ) agar website menjadi lebih user friendly.
- c) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Disdukcapil terkait dengan penggunaan NIK untuk verifikasi penilaian dari warga. Sehingga verifikasi data penduduk tidak hanya mengandalkan akun Facebook dan Twitter, namun bisa juga dari data kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

Akib, Haedar. 2010, *Implementasi kebijakan: apa, mengapa dan bagaimana*. Jurnal administrasi public. Volume 1 no.1 tahun.

Bungin MB. 2009. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta (ID): Kencana Prenada Media Group.

Castells M. 2009. *Communication Power*. New York: Oxford University Press Inc.

CORYANATA, ISMA. 2007. *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Pengawasan Keuangan Daerah (Apbd)*. Bahan simposium nasional akuntansi X di unhas 26-28 Juli 2007 Universitas Bengkulu. diakses dari <http://multiparadigma.lecture.ub.ac.id/files/2014/10/SNA-10-ASPP-06.pdf>

Desain inovasi diakses dari <http://forumlab.lan.go.id/index.php/2015-03-11-16-14-57/2015-03-11-16-18-15/2015>

Dwidjowijoto RN. 2004. *Komunikasi Pemerintahan: Sebuah Agenda Bagi Pemimpin Pemerintahan Indonesia*. Jakarta (ID): PT. Elex Media Komputindo.

Edward III, George C (edited), 1984, *Public Policy Implementing*, JaiPress Inc, London-England.

Furqoni, Muhammad. *Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo*. ejournal.unesa.ac.id/article/12192/42/article.pdf

- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princeton University Press, New Jersey.
- Hadiyati, Ernani. 2012. *Kreativitas Dan Inovasi Pengaruhnya Terhadap Pemasaran Kewirausahaan Pada Usaha Kecil*. *jurnal inovasi dan kewirausahaan* volume 1 No. 3 September 2012 diakses dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=7970&val=562>
- Hetifah, Sumarto, Sj. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia
- Julijanti. 2015, *Formulasi Strategi Komunikasi Kebijakan Kehutanan: Kasus Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan*. Bogor. Institut Pertanian Bogor.
- Mardikanto, 1993 diakses dari <http://e-jurnal.uajy.ac.id/4774/3/2MM01745.pdf>
- Niken Septihandini Puspaningtyas, Hardi Warsono, Aufarul Marom. *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Pedurungan*. Diakses dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=142945&val=4925>
- Nikmatullah, Dewangga. 1991. *Partisipasi Pemimpin Desa dalam Pembinaan Kelompok Tani di Rawa Srigi. Lampungan Selatan*: Penerbit Badan Penelitian Universitas Gajah Mada
- Parsons, Wayne. 1995. *Public Policy, an introduction to the theory and practice of policy analysis*,
- Permata Sari, Maria Agustini. 2014. *Inovasi pelayanan publik di badan penanaman modal dan pelayanan terpadu (BPMPT) Kabupaten Kubu Raya*. *Jurnal borneo administrator/* volume 10/ no.2/2014
- Quade, E.S. 1984. *Analysis For Public Decisions*, Elsevier Science Publishers, New York.
- Rohman, Ainur. 2009. *Partisipasi Warga dalam Pembangunan dan Demokrasi*. Malang : Averroes Press.
- Subarsono AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, Bandung; Alfabeta
- Supriatna, Tjahya. S.U. 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta
- Wibawa, Samodra. 1994. *KebijakanPublik*, Intermedia Jakarta.
- Yuwono, Teguh. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru*. Semarang: Ciyapps Diponegoro Universiti Penerbit SUN.

Model Inovasi Hibah dan Bansos Online Kota Bandung

Oleh:

Candra Setya Nugroho & Wawan Dharma Setiawan

1. Latar Belakang

Dalam rangka mencapai salah satu tujuan negara yaitu mensejahterakan masyarakat Indonesia maka pemerintah menyelenggarakan berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan tersebut adalah program hibah dan bantuan sosial (bansos). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyatakan bahwa hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Dana hibah dan bansos Pemerintah Kota Bandung relative cukup besar sehingga perlu pengelolaan yang baik agar dapat mendukung pembangunan Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung mengalokasikan dana hibah dan bantuan sosial dalam periode waktu 2009 – 2014 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Periode 2009 – 2014

Tahun	Anggaran			Realisasi Anggaran			%
	Hibah	Bansos	Jumlah Total	Hibah		Bansos	
2009	184.447.726.500	77.940.900.000	226.319.941.000	179.256.645.174	97,2	77.705.144.222	99,6
2010	265.459.489.100	80.218.272.441	345.677.761.541	263.490.455.297	99,3	79.607.119.939	99,2
2011	343.734.080.000	55.108.227.559	398.842.307.559	328.978.667.923	95,7	54.911.523.750	99,6
2012	428.630.606.304	468.585.880	429.099.192.184	411.234.958.796	95,9	383.850.600	81,9
2013	280.517.006.291	21.075.000.000	301.592.006.291	207.644.276.589	74,0	19.951.732.000	94,7
2014	180.020.565.000	100.546.000.000	280.566.565.000	164.426.915.411	91,3	72.791.138.800	72,4

Sumber : APBD Kota Bandung 2009 – 2014

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa anggaran hibah dan bansos yang dikelola Kota Bandung relatif besar. Dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa pada Tahun 2012-2014 terjadi pengurangan jumlah anggaran yang digelontorkan oleh Pemerintah Kota Bandung karena adanya kebijakan bahwa anggaran dana hibah dan bansos dikelola dan digunakan untuk mendanai kegiatan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Dana yang digunakan oleh SKPD tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pembangunan Kota Bandung. Hal ini merupakan kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam memaksimalkan penggunaan anggaran Kota Bandung dalam rangka Pembangunan di Kota Bandung.

Tabel 1.2
Jumlah dan Realisasi Penerima Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Periode 2009 – 2014

Tahun	Jumlah Penerima		Realisasi Penerima		% Penerima	
	Hibah	Bansos	Hibah	Bansos	Hibah	Bansos
2009	Belum Diketahui	Belum Diketahui	2016	2302	-	-
2010	Belum Diketahui	Belum Diketahui	951	3220	-	-
2011	Belum Diketahui	Belum Diketahui	-	2816	-	-
2012	4058	14	2016	11	50,1	79
2013	1244	156	593	155	48	99
2014	439	156	285	154	64,92	98,72

Sumber :Penjabaran APBD Kota Bandung 2012 – 2014

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada 2 tahun, yaitu pada Tahun 2013 dan Tahun 2014 terjadi penurunan jumlah penerima hibah dan bansos. Hal ini sebagai salah satu dampak dari pengurangan dana hibah dan bansos yang dianggarkan Pemerintah Kota Bandung.

Pengelolaan dana hibah dan bansos Kota Bandung dengan anggaran yang cukup besar tersebut tidak lepas dari permasalahan. Salah satu yang dapat kita ketahui bahwa pada pengelolaan dana hibah dan bansos Kota Bandung Tahun 2012 telah terjadi penyelewengan dana hibah dan bansos yang merugikan uang negara kurang lebih sebesar 3 Milyar. Kasus tersebut menyeret beberapa pejabat pemerintah Kota Bandung, diantaranya adalah mantan Walikota Bandung Dada Rosada, mantan Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi dan mantan Bendahara Dinas Pengelolaan dan Aset Keuangan Daerah Kota Bandung Dindin (sumber: tempo.co tanggal 03 Februari 2015 judul Pejabat Bandung Tersangkut Korupsi Bansos Rp. 3M).

Permasalahan lain terkait pengelolaan dana hibah dan bansos Kota Bandung adalah terkait aspek regulasi dan tata laksana. Berikut adalah

permasalahan terkait aspek regulasi dan tata laksana dalam penyaluran dana hibah dan bansos Kota Bandung pada Tahun 2009-2011:

Tabel 1.3
Rangkuman Permasalahan Penyaluran Dana Hibah dan Bansos Kota Bandung
Tahun 2009-2011

Tahun	Permasalahan	
	Aspek Regulasi	Aspek Tata Laksana
1	Tidak adanya pedoman penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang pengelolaan bantuan sosial	Tidak ada kriteria yang jelas dalam menetapkan besaran pagu anggaran bansos dalam APBD
2	-	Tidak semua objek belanja Bansos dalam Peraturan Kepala Daerah tentang APBD, dilengkapi dengan rincian objek penerima belanja Bansos
3	-	Adanya belanja Bantuan Sosial yang disalurkan melebihi batas yang ditetapkan dalam Permendagri no. 25/2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2010 dan Permendagri no. 37/2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2011
4	-	Terdapat Bantuan Sosial yang disalurkan lebih dari satu kali kepada satu objek penerima pada satu tahun anggaran
5	-	Tidak semua penerima Bantuan Sosial memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial
6	-	Tidak ada standar dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja bantuan sosial.
7	-	Tidak ada unit kerja di pemerintah daerah yang bertanggung jawab melakukan verifikasi dan evaluasi laporan pertanggungjawaban penggunaan Bansos

Sumber :Direktur Dikyanmas KPK 21-22 November 2011

Selain permasalahan di atas, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI ada tahun anggaran 2012 terdapat pula kelemahan dari sisi penganggaran, penyaluran dan pertanggungjawaban belanja hibah pada pemerintah Kota Bandung, yaitu:

1. Belum ada transparansi dalam penyaluran dana hibah dan bantuan sosial. Banyak nama organisasi yang tidak disurvei SKPD Terkait tetapi masuk ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan nilai uang hasil survei berbeda (lebih rendah) dibanding DPA;
2. Banyak nama ketua dari suatu organisasi yang tidak menyampaikan proposal tetapi tercantum dalam DPA;
3. Penerima hibah dan bansos yang tidak melaksanakan kegiatan setelah menerima dana hibah;
4. Penerima Hibah dan Bansos tidak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan bansos;

Pengelolaan dan hibah dan bansos secara bersifat tertutup tersebut mengakibatkan masyarakat sulit menemukan dan mendapat informasi apakah proposal disetujui atau tidak disetujui, kepada siapa dana hibah dan bansos disalurkan, berapa dana yang disalurkan, apa bentuk kegiatannya dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya.

Permasalahan-permasalahan di atas adalah permasalahan yang ditemui pada pengelolaan dana hibah dan bansos di Kota Bandung sampai Tahun 2012. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut maka pemerintah Kota Bandung membutuhkan inovasi untuk memperbaiki pengelolaan dana hibah dan bansos tersebut. Pemerintah Kota Bandung di Era Kepemimpinan yang baru berusaha mewujudkan transparansi dan keterbukaan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya diwujudkan dengan launching www.sabilulungan.bandung.go.id pada tanggal 23 Desember 2013 oleh Walikota Bandung periode 2013 – 2018, Bapak Mochamad Ridwan Kamil.

Website sabilulungan atau lebih dikenal dengan hibah bansos online adalah aplikasi yang menayangkan secara online proses penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dana hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat. Masyarakat kota Bandung dapat mengetahui organisasi dan ketua organisasi yang menerima hibah dan bansos, besaran dana yang diterima, peruntukan dana hibah dan bansos, nomor rekening penerima hibah dan bansos, tanggal diterima uang / dana dan bentuk kegiatannya.

Hibah Bansos Online telah memberikan dampak atas penyelesaian masalah penyaluran dana hibah dan bantuan sosial periode waktu 2009 – 2012 di Kota Bandung. Hal ini dapat dilihat dalam pernyataan serta dukungan masyarakat melalui media masa lokal, media sosial (akun facebook Ridwan Kamil) dan tidak adanya temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2014.

Sebagai suatu inovasi, hibah bansos online dapat memberikan solusi model penganggaran, penatausahaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi dana hibah dan bantuan sosial untuk masyarakat bagi pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota lain di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana pelaksanaan inovasi tersebut sehingga dapat memberikan gambaran secara jelas kepada daerah lain yang akan mereplikasikannya. Selain itu, dalam prakteknya juga ditemukan beberapa permasalahan pelaksanaan inovasi ini

sehingga perlu dikaji bagaimana penyelesaiannya untuk memperbaiki model inovasi ini.

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah "*Bagaimana Model Inovasi Hibah dan Bansos Online dalam rangka mewujudkan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana hibah dan bansos di Kota Bandung*". Selanjutnya rumusan permasalahan tersebut dirinci menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana desain/model inovasi Hibah dan Bansos Online di Kota Bandung?
2. Bagaimana penerapan dan apa saja manfaat inovasi Hibah dan Bansos Online?
3. Apa saja aspek yang perlu diperhatikan oleh daerah lain dalam mereplikasi inovasi Hibah dan Bansos Online ini?
4. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan inovasi Hibah dan Bansos Online dan bagaimana bentuk model perbaikan inovasi ini?

2. Desain Inovasi

Pada penelitian ini yang akan dikaji adalah salah satu inovasi yang bernama Hibah dan Bansos Online, yang dikenal dengan nama website Sabilulungan. Sabilulungan memiliki arti 'Gotong Royong' digagas oleh Pemerintah Kota Bandung untuk memfasilitasi keterbukaan dalam perwujudan program bansos dan hibah melalui media online. Untuk mengakses website ini, masyarakat dapat mengunjungi situs sabilulungan.bandung.go.id. Pengelola website ini adalah Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Bandung.

Inovasi Hibah dan Bansos Online ini dilatarbelakangi adanya permasalahan pengelolaan dana hibah dan bansos di Kota Bandung. Seperti yang dijelaskan pada bab 1 bahwa permasalahan tersebut terdapat pada aspek regulasi dan ketatalaksanaan pengelolaan dana hibah dan bansos. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Direktur Dikyanmas KPK tanggal 21-22 November 20111 yaitu:

1. Aspek Regulasi
 - Tidak adanya pedoman penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang pengelolaan bantuan social
2. Aspek Tata Laksana
 - Tidak ada kriteria yang jelas dalam menetapkan besaran pagu anggaran bansos dalam APBD;
 - Tidak semua objek belanja Bansos dalam Peraturan Kepala Daerah tentang APBD, dilengkapi dengan rincian objek penerima belanja Bansos;
 - Adanya belanja Bantuan Sosial yang disalurkan melebihi batas yang ditetapkan dalam Permendagri no. 25/2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2010 dan Permendagri no. 37/2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2011;

- dari satu kali kepada satu objek penerima pada satu tahun anggaran;
- Tidak semua penerima Bantuan Sosial memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial;
- Tidak ada standar dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja bantuan sosial; dan
- Tidak ada unit kerja di pemerintah daerah yang bertanggung jawab melakukan verifikasi dan evaluasi laporan pertanggungjawaban penggunaan Bansos.

Selain permasalahan tersebut, BPK RI melalui Laporan Hasil Pemeriksaan pada Tahun 2012 juga menjelaskan ada kelemahan pada sisi penganggaran, penyaluran dan pertanggung jawaban belanja hibah di Kota Bandung. Permasalahan tersebut antara lain:

- Belum ada transparansi dalam penyaluran dana hibah dan bantuan sosial. Banyak nama organisasi yang tidak disurvei SKPD Terkait tetapi masuk ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan nilai uang hasil survei berbeda (lebih rendah) dibanding DPA;
- Banyak nama ketua dari suatu organisasi yang tidak menyampaikan proposal tetapi tercantum dalam DPA;
- Penerima hibah dan bansos yang tidak melaksanakan kegiatan setelah menerima dana hibah;
- Penerima Hibah dan Bansos tidak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan bansos;

Puncak permasalahan pengelolaan dana hibah dan bansos Kota Bandung pada Tahun 2012 adalah terjadinya penyelewengan dana hibah dan bansos yang merugikan uang negara kurang lebih sebesar 3 Milyar. Kasus tersebut menyeret beberapa pejabat pemerintah Kota Bandung, diantaranya adalah mantan Walikota Bandung Dada Rosada, mantan Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi dan mantan Bendahara Dinas Pengelolaan dan Aset Keuangan Daerah Kota Bandung Dindin.

Pengelolaan dan hibah dan bansos pada awalnya dilakukan secara tertutup sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui pengelolaan dana hibah dan bansos. Masyarakat tidak dapat mengetahui berapa anggaran hibah dan bansos, kepada siapa dana hibah dan bansos disalurkan, berapa dana yang disalurkan, apa bentuk kegiatannya dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya.

Permasalahan-permasalahan di atas adalah permasalahan yang ditemui pada pengelolaan dana hibah dan bansos di Kota Bandung sampai Tahun 2012. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut maka pemerintah Kota Bandung membutuhkan inovasi untuk memperbaiki pengelolaan dana hibah dan bansos tersebut.

Tujuan dibentuknya inovasi Hibah dan Bansos Online ini adalah terciptanya transparansi dan akuntabilitas serta terwujudnya efektifitas pengelolaan hibah dan bansos melalui peran dan partisipasi masyarakat Kota Bandung.

Manfaat yang hendak diperoleh dari inovasi Hibah dan Bansos Online adalah

1. Mewujudkan transparansi pengelolaan dan hibah dan bansos;
2. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Bandung;
3. Mewujudkan keefektifan kinerja dalam pengelolaan dana hibah dan bansos ;
4. Mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dan hibah dan banos; dan
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Bandung dalam pengelolaan hibah dan bansos

Untuk membuat inovasi ini ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung, yaitu:

NO	Langkah kegiatan	Deskripsi/ Metode	Output yang diharapkan	Koordinator	Stakeholder
1	Pembuatan Komitmen	Mengumpulkan instansi terkait untuk membuat komitmen	Terciptanya komitmen seluruh instansi	Walikota	Seluruh Instansi terkait
2	Pembuatan Peraturan Walikota	Membuat peraturan pengelolaan hibah dan bansos	Dokumen Peraturan Walikota	BPKAD	Bagian Organisasi Setda dan Inspektorat
3	Pembuatan Website	Membuat website hibah dan bansos	Website Hibah dan Bansos	Diskominfo	Pihak penyedia jasa (tenaga ahli), BPKAD, Setda dan Inspektorat
4	Sosialisasi Peraturan Walikota dan Website Hibah dan bansos	Melakukan Peraturan Walikota dan Website Hibah dan bansos kepada seluruh stakeholder termsuk masyarakat	Tersosialisasikan ya Peraturan Walikota dan Website Hibah dan bansos kepada seluruh stakeholder termsuk masyarakat	BPKAD	Seluruh SKPD di Kota Bandung termasuk Kecamatan dan Kelurahan, Media, Masyarakat, TNI dan Polri
5	Pelaksanaan	Menyampaikan berbagai informasi	Terinformasikan ya berbagai informasi terkait	BPKAD	Seluruh SKPD terkait di Kota Bandung, Pengusul

NO	Langkah kegiatan	Deskripsi/ Metode	Output yang diharapkan	Koordinator	Stakeholder
		pengelolaan hibah dan bansos melalui website sabilulungan	pengelolaan hibah dan bansos		dan Penerima hibah dan banos serta Masyarakat
6 .	Monitoring dan Evaluasi	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan website sabilulungan	Terciptanya website sabilulungan yang lebih baik	BPKAD	Seluruh SKPD terkait di Kota Bandung, Pengusul dan Penerima hibah dan bansos serta Masyarakat

Dalam penyusunan awal website sabilulungan, Pemerintah Kota Bandung meminta jasa tenaga ahli. Tenaga Ahli membuat website sesuai dengan arahan dan petunjuk Pemerintah Kota Bandung khususnya terkait isi website tersebut. Setelah website terbentuk maka Pemkot Bandung membuat tim pengelola website dengan kualifikasi tertentu. Pengelola website harus dapat mengoperasikan komputer dan website. Tim tersebut mempelajari pengoperasian website dengan pendampingan tenaga ahli tersebut secara bertahap hingga Tim dapat mengoperasikannya sendiri.

Pembuatan website ini menggunakan anggaran APBD Kota Bandung yang dikelola oleh Diskominfo Kota Bandung. Anggaran pembuatan website sabilulungan oleh Diskominfo sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Untuk perawatan dan pengelolaan website oleh BPKAD pada Tahun 2015 dibutuhkan anggaran Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Untuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan antara lain:

1. Komputer dengan spesifikasi (*hard disk* dan *RAM*) sesuai dengan kebutuhan website;
2. Jaringan internet; dan
3. Mesin *scanner* untuk menscan data hibah dan bansos yang akan diupload di website.

Seperti disebutkan di atas bahwa salah satu manfaat yang diharapkan dalam inovasi ini adalah adanya keefektifan kinerja pengelolaan hibah dan bansos. Melalui inovasi website sabilulungan, BPKD sebagai koordinator pengelolaan hibah dan bansos berupaya untuk memperbaiki pengelolaan hibah dan bansos. Khususnya untuk perbaikan di dalam internal organisasinya, secara bertahap dilakukan pembagian tugas yang lebih jelas dalam pengelolaan hibah dan bansos, termasuk pengelolaan website sabilulungan. Selain itu sedang diupayakan untuk membangun sistem internal terpadu di BPKAD untuk lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan hibah dan bansos. Instansi lain yang terkait juga melakukan peningkatan kinerjanya berdasarkan SOP Pengelolaan Hibah dan Bansos. Selain itu BPKAD selalu berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait untuk membuat sistem integrasi dalam pengelolaan website sabilulungan. Jadi dampak adanya inovasi ini adalah adanya peningkatan kinerja dalam pengelolaan hibah dan bansos.

Website sabilulungan ini selaras dengan peraturan pengelolaan dana hibah dan bansos. Selain itu, inovasi ini selaras dengan peraturan lain yang terkait khususnya peraturan tentang pelayanan publik dan peraturan tentang keterbukaan informasi publik.. Selain selaras dengan peraturan terkait, inovasi ini selaras dengan visi dan misi Kota Bandung Jura yaitu Smart City. Inovasi ini merupakan salah satu inovasi Kota Bandung yang menggunakan media online untuk mencapai Bandung Smart City.

Inovasi ini disosialisasikan oleh Pemerintah Kota Bandung pada akhir tahun 2013. Pada awal diluncurkannya website sabilulungan ini masih sederhana, hanya menampilkan informasi dan data penerima dana hibah dan bansos pada Tahun 2014. Setelah itu, website sabilulungan diperbaiki secara bertahap, baik dari segi tampilan maupun menunya. Perbaikan dilakukan berdasarkan masukan masyarakat, masukan KPK, masukan BPK dan inisiatif dari pengelola website

yaitu BPKAD. Sampai saat ini selalu dilakukan perbaikan website yang berkelanjutan.

Salah satu manfaat website sabilulungan yang sudah disebutkan di atas yaitu mewujudkan keefektifan kinerja dalam pengelolaan dana hibah dan bansos. Keefektifan ini dapat dilihat pada SOP Pengelolaan Hibah dan Bansos yang sudah ditetapkan. Website sabilulungan ini mendorong seluruh instansi pemerintah yang terkait dan tim pengelola hibah dan bansos untuk bekerja seefektif mungkin berdasarkan SOP tersebut.

Inovasi ini bisa dan sangat mungkin untuk direplikasi oleh daerah lain. Hal ini dikarenakan semua daerah mempunyai permasalahan yang sama dalam pengelolaan hibah dan bansos. Oleh karena itu semua daerah dapat mereplikasi inovasi ini dengan menyesuaikan kebutuhan tiap daerah tersebut. Selain itu inovasi ini sangat sederhana dan murah sehingga semua daerah dapat mereplikasinya.

3. Penerapan dan Manfaat Inovasi

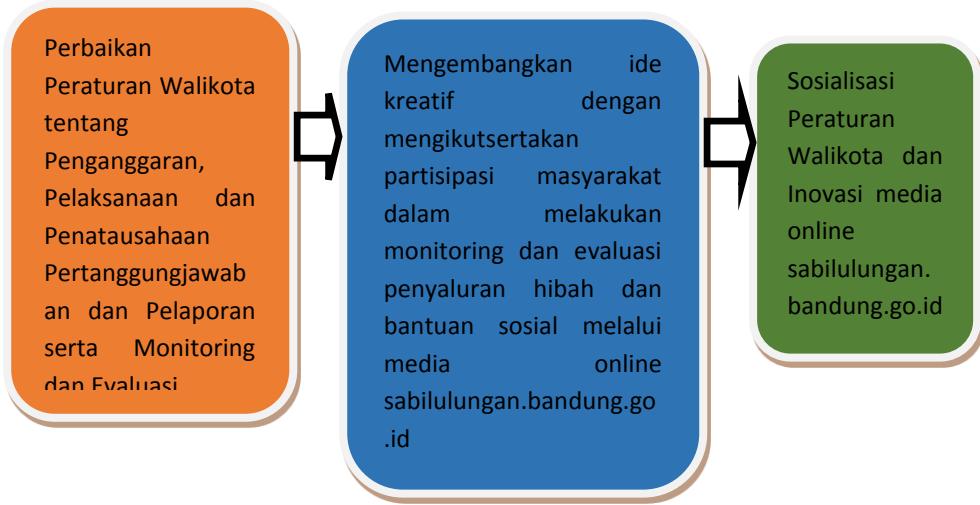
Ide Inovasi Hibah dan Bansos Online pada awalnya digagas oleh Walikota Bandung, Bapak Ridwan Kamil. Setelah beliau dilantik menjadi Walikota Bandung pada tanggal 16 September 2013, ada beberapa inovasi yang dicanangkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintah Kota Bandung. Salah satu inovasi yang dicanangkan adalah Hibah dan Bansos Online. Inovasi ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola dana hibah dan bansos Kota Bandung.

Sebelum mengembangkan ide inovatif ini, Pemerintah Kota Bandung melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatusahaan dan Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi. Peraturan ini perlu untuk dibuat agar mendukung ide inovatif dalam pengelolaan hibah dan bansos Kota Bandung. Melalui peraturan ini diatur terkait tugas setiap SKPD, tatakelola dan pertanggungjawaban hibah dan bansos.

Setelah dibuat peraturan, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung adalah merancang dan membuat inovasi pengelolaan dana hibah dan bansos. Inovasi yang dihasilkan adalah berupa website pengelolaan hibah dan bansos, yang diberi nama Sabilulungan. Untuk dapat mengetahui pengelolaan dana hibah dan bansos, masyarakat dapat mengunjungi website ini dengan alamat: sabilulungan.bandung.go.id.

Setelah website sabilulungan siap maka langkah selanjutnya yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung adalah melakukan sosialisasi peraturan walikota dan diikuti dengan website sabilulungan tersebut. Dalam sosialisasi peraturan tersebut, Pemerintah Kota Bandung menjelaskan perubahan dari pengelolaan model lama menjadi pengelolaan baru yang bersifat terbuka. Selain dijelaskan terkait peraturan yang baru dalam pengelolaan dana hibah dan bansos, selanjutnya dilakukan sosialisasi terkait ide inovatif pengelolaan hibah dan bansos. Baik peraturan dan ide inovatif ini harus sejalan dan saling mendukung agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal.

Langkah Perbaikan Pengelolaan dana Hibah dan Bansos Pemerintah Kota Bandung



Menurut Awal Haryanto selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) BPKAD Kota Bandung menyatakan bahwa ide inovasi hibah dan bansos online dari Walikota Bandung, Ridwan Kami pada awalnya terinspirasi salah satu ide inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta. Ide tersebut kemudian direplikasi dan diadopsi untuk mrancang inovasi website sabilulungan ini untuk memperbaiki tata kelola dana hibah dan bansos di Kota Bandung.

Pada awal penyusunan website ini, Pemerintah Kota Bandung menggandeng tenaga ahli. Tenaga Ahli ini merancang website berdasarkan masukan dan arahan dari Pemerintah Kota Bandung. Instansi awal yang mengelola website adalah Diskominfo, tetapi karena koordinator pengelola dana hibah dan bansos adalah DPKAD maka saat ini pengelola website ini adalah DPKAD.

Secara bertahap, pengelolaan website sabilulungan yang sebelumnya dilakukan dengan bantuan oleh pihak ketiga selanjutnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung sendiri, dalam hal ini oleh BPKAD sebagai koordinator pengelolaan dana hibah dan bansos. Pada awalnya Tim Pengelola website sabilulungan Pemerintah Kota Bandung melakukan pendampingan dan belajar secara bertahap kepada pihak ketiga atau tenaga ahli dalam pengoperasian website sabilulungan. Setelah Tim Pengelola website Pemerintah Kota Bandung dapat mengoperasikan sendiri website sabilulungan maka saat ini website sabilulungan sudah dioperasikan sendiri oleh Pihak Pemda Kota Bandung. Apabila terjadi kesulitan maupun ada permasalahan terkait website tersebut, Pemda Kota Bandung melakukan konsultasi kepada tenaga ahli.

Ide inovasi website sabilulungan ini mempunyai beberapa tujuan yang diharapkan oleh Pemda Kota Bandung. Tujuan dibuatnya inovasi ini disampaikan Bapak Ridwan Kamil pada acara launching Inovasi Hibah dan Bansos Online pada taggal 23 Desember 2013 di Kantor Balai Kota Bandung yang dihadiri pejabat pemerintah di lingkungan Kota Bandung, perwakilan TNI, Perwakilan Polri, LSM , Perwakilan Masyarakat dan Wartawan. Bapak Ridwan Kamil menegaskan bahwa tujuan dari dibentuknya inovasi ini yaitu:

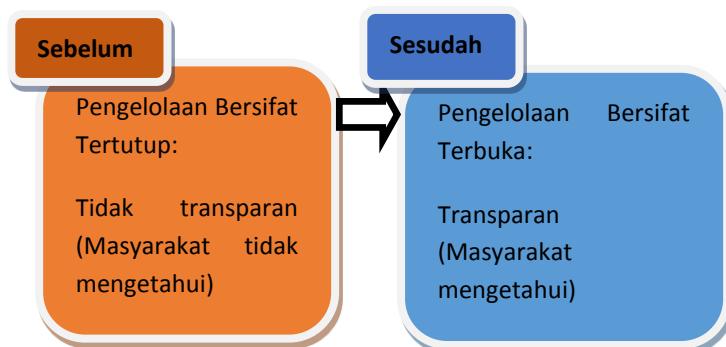
1. Terciptanya transparansi pengelolaan dan hibah dan bansos;
2. Terwujudnya peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Bandung;
3. Terwujudnya keefektifan kinerja dalam pengelolaan dana hibah dan bansos ;
4. Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dan hibah dan bansos; dan
5. Terwujudnya peningkatan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Bandung dalam pengelolaan hibah dan bansos.

Tujuan inovasi ini selanjutnya menjadi manfaat yang diperoleh dari inovasi Hibah dan Bansos Online. Berikut manfaat yang diperoleh dari adanya inovasi Hibah dan Bansos Online, yaitu:

a. Menciptakan transparansi pengelolaan dan hibah dan bansos.

Semangat pertama yang diusung dalam inovasi website sabilulungan ini adalah menciptakan transparansi pengelolaan dana hibah dan bansos. Inovasi ini membuat pengelolaan dana bantuan dari yang semula bersifat tertutup atau tidak transparan menjadi menjadi bersifat terbuka atau transparan. Transparansi ini diharapkan dapat mencegah dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan sebelumnya.

Pengelolaan Dana Hibah dan Bansos
sebelum dan sesudah adanya inovasi website Sabilulungan



Transparansi ini sesuai amanah Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah Kota Bandung menyadari bahwa dana hibah dan bansos ini merupakan salah satu informasi public yang berhak diketahui oleh masyarakat. Berdasarkan Ketentuan Umum pasal 1dijelaskan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Informasi yang disajikan dalam website sabilulungan yaitu:

- 1) Penjelasan tentang Sabilulungan;
 - 2) Peraturan terkait hibah dan bansos;
 - 3) Proposal hibah dan bansos;
 - 4) Penerima hibah dan bansos;
 - 5) Mekanisme pengelolaan hibah dan bansos;
 - 6) Proses pengelolaan hibah dan bansos;
 - 7) Informasi lainnya.
- b. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Bandung;**
- Tujuan adanya inovasi website sabilulungan ini selain menciptakan transparansi, yaitu untuk meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Bandung. Pada acara launching website sabilulungan ini, Walikota Bandung menekankan harapannya agar inovasi ini dapat meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota bandung.
- Berdasarkan tingkatan partisipasi masyarakat tersebut, maka dalam inovasi website sabilulungan, partisipasi masyarakat yang diharapkan adalah tingkat ke empat yaitu partisipasi dalam evaluasi yang diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan masyarakat dalam menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya. Melalui website sabilulungan masyarakat Kota Bandung dapat menilai serta mengawasi pengelolaan dana hibah dan bansos agar peruntukannya sesuai dan bermanfaat dalam pembangunan Kota Bandung.
- Pada salah satu menu di website sabilulungan tersebut dapat ditemui adanya menu lapor, menu ini digunakan untuk menampung laporan dari masyarakat terkait adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana hibah dan bansos yang ditemui masyarakat.

Tabel 4
Data Pengaduan Masyarakat Terkait Hibah Bansos Online Sabilulungan

Tahun	Tanggal	Uraian Pengaduan	Kategori	Keterangan
2014	11 Maret	Ditujukan kepada Tim Pertimbangan	Kesejahteraan Rakyat	Ditindaklanjuti
	11 Januari	Penambahan menu pada website sabilulungan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Ditindaklanjuti
	21 Mei	Proses pencairan dana hibah	Topik Lainnya	Ditindaklanjuti
	20 Februari	Persyaratan Organisasi Penerima Hibah	Penyerapan Anggaran	Ditindaklanjuti

Tahun	Tanggal	Uraian Pengaduan	Kategori	Keterangan
	1 September	Tata cara penggunaan hibah bansos online	Topik Lainnya	Ditindaklanjuti
	2 September	Kasus Hukum Hibah dan Bansos 2012	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Ditindaklanjuti
	21 Februari	Usulan Kriteria Penerima Hibah	Kesejahteraan Rakyat	Ditindaklanjuti
	20 Februari	Mekanisme pencairan dana Hibah dan Bansos	Kesejahteraan Rakyat	Ditindaklanjuti
	31 Januari	Penerima Beasiswa ibah dan Bantuan Sosial	Pendidikan	Ditindaklanjuti
2015	3 Agustus	Program Rumah Tidak Layak Huni melalui dana Hibah	Penyerapan Anggaran	Ditindaklanjuti

Sumber :www.lapor.go.id (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)

Bukti lain telah adanya pengawasan adalah adanya salah satu berita pada Tempo Hari Senin, tanggal 30 Desember 2013 menyebutkan bahwa ada beberapa kejanggalan dalam perolehan dana hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) Kota Bandung tahun 2014. Hal itu ditunjukkan Koordinator sebuah komunitas masyarakat sipil pemerhati keterbukaan informasi publik bernama Wakca Balaka, Arip Yogiawan. Salah satu kejanggalan itu, yakni adanya pemberian dana yang tidak sesuai peruntukannya. "Setelah kami cek situs *sabilulungan.bandung.go.id*, kami menemukan penggunaan dana hibah untuk tunjangan guru honorer," ujarnya, 29 Desember 2013. Menurutnya, hal tersebut bertentangan dengan Permendagri No. 32/2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, di mana pemberian hibah tidak boleh diberikan secara berkala pada pihak atau penerima yang sama. Sementara, guru honorer sudah menerima bantuan tersebut tahun lalu, katanya.

c. Meningkatkan keefektifan kinerja pemerintah dalam pengelolaan dana hibah dan bansos

Seperti diketahui sebelumnya bahwa sebelum adanya inovasi website *sabilulungan*, Pemerintah Kota Bandung melakukan perbaikan pertaturan terkait pengelolaan dana hibah dan bansos. Dalam peraturan

tersebut dijelaskan peran dan tugas masing-masing jabatan dan SKPD dalam pengelolaan dana dan hibah dan bansos. Dengan adanya pembagian peran dan tugas tersebut maka masing-masing jabatan dan SKPD menjalankan fungsinya dengan lebih jelas dan professional.

Selain adanya SOP, dengan adanya transparansi dan pengawasan oleh masyarakat melalui website sabilulungan maka Pemerintah Kota Bandung dituntut untuk meningkatkan kinerjanya secara efektif dan efisien dalam pengelolaan dan hibah dan bansos. Melalui website ini para pengusul proposal dan masyarakat dapat memantau sejauh mana pengelolaan dana hibah dan bansos ini. Oleh karena itu, apabila dalam pengelolaan dana hibah dan bansos terjadi ketidak sesuaian jadwal maupun prosesnya maka masyarakat dan pengusul proposal akan melakukan pelaporan. Hal ini yang menjadi pemacu Pemerintah Kota Bandung dalam pengelolaan dana hibah dan bansos agar sesuai dengan jadwal, prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga pekerjaan berlaku efektif. Melalui penataan peraturan dan pelaksanaan website sabilulungan tersebut maka Pemerintah Kota Bandung berupaya meningkatkan efektifitas kinerjanya.

d. Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Hibah dan Bansos

Tujuan selanjutnya yang diharapkan melalui inovasi ini adalah meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana hibah dan bansos. Inovasi website sabilulungan ini menyajikan salah satu menu yang berisi tentang persetujuan proposal dengan jumlah dana yang disetujui. Hal ini merupakan salah satu tujuan dalam inovasi sabilulungan ini dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana hibah dan bansos.

Melalui website sabilulungan ini, masyarakat maupun pengusul proposal hibah dan bansos dapat melihat jumlah dana yang diusulkan dan jumlah dana yang disetujui. Khususnya untuk penerima dana hibah dan bansos dapat melihat apakah semua dana yang diusulkan ditesetujui atau tidak. Sehingga mereka dapat melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatannya.

Penerima dana hibah dan bansos dapat memantau jumlah dana yang disetujui pada website sabilulungan dengan jumlah dana yang diterima. Sebelum adanya website sabilulungan, penerima dana hibah dan bansos tidak dapat mengetahui jumlah dana yang disetujui sehingga tidak dapat mengecek apakah sesuai dengan jumlah dana yang diterima atau tidak. Tetapi saat ini mereka dapat melakukan pengecekan atas dana hibah dan bansos yang mereka terima.

Apabila terjadi ketidak sesuaian antara jumlah dana yang disetujui pada website sabilulungan dengan jumlah dana yang diterima, penerima dana hibah dan bansos dapat melaporkan hal tersebut. Pelaporan tersebut dapat diajukan melalui website sabilulungan atau langsung datang ke kantor BPKAD Kota Bandung. Berdasarkan laporan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Tim untuk mengetahui penyebab terjadinya ketidaksesuaian tersebut dan untuk ditindaklanjuti.

Menurut Bapak Awal, selaku PPK BPKAD menyatakan bahwa saat ini penyerahan dana hibah dan bansos tidak dilakukan secara langsung atau tunai kepada penerimanya tetapi diserahkan melalui transfer ke rekening penerima tersebut. Hal ini merupakan upaya untuk menghindari bertemuannya panitia dan penerima dalam penyerahan dana hibah dan bansos. Selain itu untuk mempermudah penyusunan laporan pengelolaan dana hibah dan bansos, dengan adanya bukti transfer dari Bank ke penerima maka laporan penyaluran dana hibah dan bansos tersebut lebih akuntabel.

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana hibah dan bansos juga dapat dilihat dari jumlah laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan oleh penerima dana hibah dan bansos. Laporan pertanggungjawaban menjadi indikator tingkat kedisiplinan penerima dana hibah dan bansos dalam pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah dan bansos. Perbandingan jumlah laporan pertanggung jawaban yang diterima Pemerintah Kota Bandung pada Tahun 2012-2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5
Perbandingan Jumlah Laporan Penggunaan Dana Hibah dan Bansos

Tahun	Jumlah Penerima	Jumlah Laporan	%	Ket
2012	2027	1253	57%	Dalam 2 Tahun
2013	748	594	79,4%	Dalam Tahun Berjalan
2014	439	363	82,6%	Dalam Tahun Berjalan

Sumber: DPKAD Kota Bandung

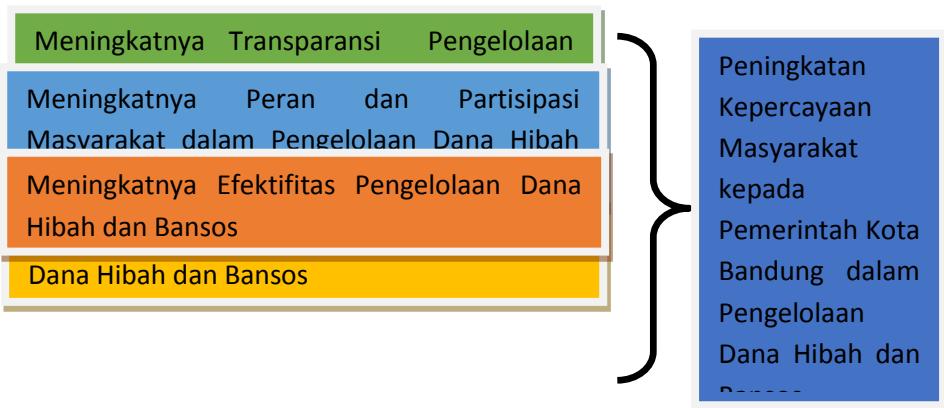
Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa mulai Tahun 2012 sampai dengan 2014 tingkat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan bansos yang diterima Pemkot Bandung mengalami peningkatan. Pada Tahun 2012 – 2013 terjadi peningkatan pelaporan sebesar 22,4%, dari 57% pada Tahun 2012 menjadi 79,4% pada Tahun 2013. Sedangkan pada Tahun 2013-2014 terjadi peningkatan pelaporan sebesar 3,2%, dari 79,4% pada Tahun 2013 menjadi 82,6% pada Tahun 2014. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan akuntabilitas penggunaan dana hibah dan bansos tersebut.

e. **Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat kepada Pemerintah Kota Bandung dalam Pengelolaan Dana Hibah dan Bansos**

Tujuan akhir dalam inovasi website sabilulungan ini adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Bandung. Seperti diketahui bahwa adanya kasus pengelolaan dana hibah dan bansos menyebabkan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Bandung. Melalui inovasi website sabilulungan ini diharapkan kepercayaan masyarakat dapat meningkat kembali.

Seperti diketahui bahwa inovasi website sabilulungan mempunyai beberapa tujuan yaitu menciptakan transparansi, efektifitas dan akuntabilitas serta meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan hibah dan bansos Kota Bandung. Berdasarkan tujuan-tujuan tersebutlah Pemerintah Kota Bandung berharap melalui inovasi website sabilulungan ini selanjutnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Kota Bandung.

Peningkatan Kepercayaan Masyarakat kepada Pemerintah Kota Bandung dalam Pengelolaan Dana Hibah dan Bansos



Inovasi website sabilulungan terkait dengan berbagai stakeholder. Stakeholder yang terkait ini dibagi sesuai tahapan pelaksanaan inovasi ini. Pembagian stakeholder dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Stakeholder pada tahap persiapan inovasi; dan
 1. Walikota Bandung, M. Ridwan Kamil, sebagai penggagas pertama Hibah Bansos Online Sabilulungan;
 2. Sekretariat Daerah sebagai pembuat draft kebijakan pengelolaan dana hibah dan bansos serta sistem Online Sabilulungan;
 3. Diskominfo sebagai pengelola website sabilulungan;
 4. BPKAD sebagai pembuat SOP pengelolaan dana hibah dan bansos; dan
 5. Tenaga Ahli di bidang IT sebagai pembuat website sabilulungan.

- b. Stakeholder pada pelaksanaan inovasi.
1. Walikota Bandung pemberi persetujuan terhadap proposal dan penerima hibah dan bantuan sosial;
 2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
 3. Tim Pertimbangan adalah tim yang bertugas membantu TAPD dalam melakukan pembahasan dengan SKPD Terkait, Camat dan Lurah serta memberikan pertimbangan atas permohonan belanja hibah dan bantuan sosial;
 4. 22 SKPD Terkait pemberi rekomendasi;
 5. Organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Kelompok Masyarakat sebagai pengusul proposal dan penerima hibah dan bantuan sosial; dan
 6. Masyarakat Kota Bandung sebagai pengontrol dan pengawas pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial.

Khusus untuk instansi yang melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan sesuai dalam pasal 51 ayat 1a Peraturan Walikota Nomor 1205 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota bandung Nomor Nomor 891 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dinyatakan :

1. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Selaku SKPKD melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan proses administrasi pencairan dana hibah sampai dengan dana tersebut diterima di rekening penerima hibah dan bantuan sosial
2. SKPD Terkait melakukan monitoring dan evaluasi lapangan untuk meyakini bahwa kegiatan telah dilaksanakan oleh penerima hibah baik kegiatan fisik maupun non fisik
3. Inspektorat Kota Bandung melakukan pengendalian atas monitoring dan evaluasi yang dilakukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD dan SKPD Terkait dan melaporkan kepada Walikota.

Selain itu, ada juga peran masyarakat Kota Bandung yang ikut membantu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dari penerima hibah dan bantuan sosial yang datanya diperoleh dari www.sabilulungan.bandung.go.id

Sebagai inovasi yang dapat dirasakan manfaatnya, website sabilulungan ini merupakan inovasi yang dapat direplikasikan di daerah lainnya. Hal ini terbukti beberapa daerah sudah mengadakan studi banding di Kota Bandung untuk mempelajari terkait inovasi ini. Beberapa daerah yang telah mengadakan kunjungan atau studi banding yaitu Kabupaten Sleman, Kota Malang, Kota Menado dan Kota Surabaya.

Untuk dapat mereplikasikan inovasi ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan disiapkan oleh daerah lain yaitu:

i. Komitmen;

Seperti diketahui bahwa inti dari inovasi adalah transparansi pengelolaan dana hibah dan bansos melalui media website. Oleh karena itu perlu adanya komitmen antara pimpinan daerah dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana hibah dan bansos.

Sesuai penjelasan sebelumnya, bahwa inovasi website sabilulungan di Kota Bandung diinisiasi oleh Walikota, Ridwan Kamil. Hal ini dapat dilihat bahwa adanya komitmen pemimpin daerah dalam melakukan inovasi ini. Komitmen untuk melakukan pengelolaan dana hibah dan bansos yang sebelumnya dilakukan dengan sistem tertutup menjadi dilakukan dengan sistem terbuka atau transparan.

Komitmen dari pemimpin daerah saja tidak cukup, harus ada komitmen dari pihak-pihak lainnya terutama adalah SKPD yang terkait dalam pengelolaan dana hibah dan bansos. Pada penjelasan sebelumnya dapat diketahui bahwa Walikota Bandung mengkomunikasikan ide inovasi yang diinginkan kepada SKPD terkait dan meminta kerjasama kepada SKPD tersebut untuk mendukung dan mewujudkannya. Dalam mewujudkan inovasi ini, SKPD juga harus berkomitmen untuk mendukung inovasi dengan melakukan tugasnya masing-masing dalam melakukan pengelolaan dana hibah dan bansos sesuai mekanisme yang ditetapkan agar inovasi ini berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan.

ii. Peraturan;

Seperti diketahui bahwa langkah selanjutnya setelah membangun komitmen, yang dilakukan Pemkot Bandung dalam mewujudkan inovasi website sabilulungan adalah menyiapkan dan menerbitkan peraturan walikota. Peraturan walikota ini untuk mendukung dan menjadi dasar pengelolaan dan hibah dan bansos agar lebih efektif dan efisien serta dilakukan dengan transparan.

Peraturan walikota yang dibuat dan diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bandung pada intinya adalah untuk menjalankan peraturan terkait pengelolaan dan hibah dan bansos yang ada di atasnya. Hal khusus yang diatur dalam peraturan walikota ini adalah adanya pengaturan terkait sistem terbuka dalam pengelolaan dana hibah dan bansos Kota Bandung. Hal inilah yang diperlukan untuk mendukung munculnya inovasi website sabilulungan ini

iii. Sistem atau website.

Setelah adanya komitmen oleh semua pihak dalam perbaikan pengelolaan dana hibah dan bansos serta pembuatan peraturan tentang pengelolaan dan hibah dan bansos maka dibuatlah inovasi website sabilulungan ini.

Sistem ini merupakan media dalam mewujudkan adanya transparansi pengelolaan dana hibah dan bansos di Kota Bandung. Website sabilulungan bisa diakses oleh semua stakeholder terkait dan seluruh masyarakat Kota Bandung di manapun dan kapanpun.

Website yang sudah dibuat selanjutnya harus disosialisasikan kepada seluruh stakeholder terkait, khususnya kepada masyarakat. Hal ini diharapkan menjadi langkah awal untuk meminta dukungan dan peran partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana hibah dan bansos yang dilakukan secara transparan. Sosialisasi ini juga bertujuan untuk meminta saran dan masukan pada sistem yang sudah dibuat.

Proses Replikasikan Inovasi Website Pengelolaan Dana Hibah dan Bansos



Sumber: hasil olahan

3. Hambatan dan Kelemahan Pelaksanaan Inovasi

Pelaksanaan inovasi website sabilulungan sebagai suatu program baru yang dilaksanakan Pemerintah Kota Bandung dalam pengelolaan dan hibah dan bansos tidak lepas dari beberapa hambatan. Menurut Awal, selaku PPK BPKAD Kota Bandung menyatakan bahwa hambatan yang dihadapai dalam pengelolaan website sabilulungan antara lain:

- Kurangnya koordinasi antar SKPD terkait pengelolaan dana hibah dan bansos;

Permasalahan koordinasi antar SKPD dalam pengelolaan dana hibah dan bansos masih dirasakan oleh pengelola website sabilulungan. Saat ini data antar SKPD terkait masing terpisah-pisah dan belum bisa diakses dengan mudah oleh pengelola website. Hal ini mengakibatkan proses verifikasi data pengusul dana hibah dan bansos tidak bisa berjalan efektif dan efisien. Saat ini pengelola melakukan pengecekan secara manual kepada masing-masing instansi terkait yang mana hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup banyak.

Salah satu data yang seharusnya dapat diketahui dengan mudah oleh pengelola website adalah data kependudukan. Data kependudukan dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Apabila data kependudukan masyarakat Kota Bandung sudah tersistem dan dapat dicek oleh pengelola website melalui sistem tersebut maka mempermudah proses verifikasi data usulan proposal hibah dan bansos.

b. Kurangnya komitmen pengelola website.

Pengelolaan website sabilulungan juga tidak lepas dari kendala dan hambatan dari tim pengelola website itu sendiri. Tim pengelola website sabilulungan yang ada di BPKAD Kota Bandung belum semua mempunyai komitmen yang sama dalam pengelolaan website ini. Hal ini menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan website sabilulungan.

Seperti diketahui bahwa mayoritas proses pengelolaan dana hibah dan bansos dilakukan di BPKAD. Pengelolaan dana tersebut terdiri dari proses verifikasi sampai pencairan dilakukan oleh BPKAD. Hal ini membutuhkan kerja tim yang kompak dalam melaksanakan setiap prosesnya. Akan tetapi masih ditemukan ketidak solidan dalam tim sehingga mengganggu proses pengelolaan tersebut. Hal ini juga berakibat pada terhambat dan terganggunya proses pengelolaan website sabilulungan.

c. Kurang lengkapnya menu di website sabilulungan

Hambatan lain yang ditemukan dalam inovasi website sabilulungan adalah masih belum lengkapnya menu yang disajikan di website tersebut. Saat ini, menu yang disajikan di website sabilulungan sudah cukup baik untuk mencapai tujuan transparansi dan akuntabilitas. Tetapi masih perlu dilengkapi dan ditambah dengan menu-manu lain yang dapat mendukung tercapainya tujuan tersebut.

4. Model Pengembangan Inovasi

a. Pengintegrasian dengan website atau sistem terkait

i. Website Pemkot Bandung

Untuk mempermudah masyarakat Kota Bandung dalam melihat website sabilulungan ini seharusnya diintegrasikan dengan website Pemerintah Kota Bandung yang dikelola Sekretariat Daerah. Seharusnya BPKAD sebagai koordinator pengelola website sabilulungan berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah untuk melakukan integrasi ini. Dengan adanya integrasi ini maka semakin mudah masyarakat menemukan website sabilulungan dan sebagai sarana sosialisasi agar website iri semakin banyak yang memanfaatkan.

Seperti diketahui bahwa masyarakat Kota Bandung secara umum lebih sering mengunjungi website Pemkot Kota Bandung, oleh karena itu sangat tepat apabila website sabilulungan ini diintegrasikan dengan website ini.

ii. Sistem kependudukan di Disdukcapil

Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan pengelolaan hibah dan bansos maka perlu ada integrasi sistem website sabilulungan dengan sistem kependudukan di Disdukcapil Kota Bandung. Seharusnya

BPKAD sebagai koordinator pengelola website sabilulungan berkoordinasi dengan Disdukcapil untuk melakukan integrasi ini. Ini diperlukan untuk mempermudah dan mempercepat proses verifikasi proposal yang diajukan.

Seperti diketahui bahwa proposal pengajuan dana hibah dan bansos harus dilengkapi dengan data diri pengusulnya. Oleh karena itu, apabila website sabilulungan sudah terintegrasi dengan sistem kependudukan maka Tim Pengelola Hibah dan Bansos cukup melakukan verifikasi kebenaran data diri pengusul dengan data kependudukan yang ada di Disdukcapil. Apabila data diri yang ada di proposal pengajuan hibah dna bansos tidak sama dengan data kependudukan yang ada di Disdukcapil maka Tim dapat menolak proposal tersebut. Hal ini tentunya sangat membantu proses verifikasi proposal pengajuan hibah dan bansos.

iii. Sistem status organisasi di Kesbangpolinmas

Untuk lebih mengefektifkan pengelolaan hibah dan bansos maka perlu dilakukan pengintegrasian website sabilulungan dengan sistem yang ada di Kesbangpolinmas Kota Bandung. Ini perlu dilakukan untuk mempermudah dan mempercepat proses verifikasi proposal yang diajukan. Seperti diketahui pengusul hibah haruslah organisasi yang berbadan hukum, sedangkan data oraganisasi yang berbadan hukum terdapat di Kesbangpolinmas. Oleh karena itu apabila website sabilulungan ini terintegrasi dengan sistem yang ada di Kesbangpolinmas maka mempermudah Tim Pengelola Hibah dan Bansos untuk melakukan verifikasi data organisasi pengusul apakah sudah berbadan hukum atau belum.

iv. Email Kecamatan/ Kelurahan

Untuk lebih mengefektifkan pengawasan penggunaan dana hibah dan bansos seharusnya dilakukan integrasi antara website sabilulungan dengan website atau email di Kecamatan atau Kelurahan di Kota Bandung. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pengiriman data penerima hibah dan bansos kepada Kecamatan atau Kelurahan di Kota Bandung. Hal ini untuk memudahkan pengawasan dalam penggunaan hibah dan bansos oleh penerimanya. Pihak kecamatan dan kelurahan setelah mendapat informasi terkait penerima hibah dan bansos kemudian melakukan pengawasan kepada penerima hibah dan bansos. Apabila terdapat temuan terhadap penggunaan hibah dan bansos tersebut, pihak kecamatan dan kelurahan bisa langsung berkoordinasi dengan SKPD terkait.

b. Penyempurnaan Menu

i. Laporan

Saat ini belum ada menu laporan yang berisi penggunaan dana hibah dan bansos oleh setiap penerimanya di website sabilulungan. Hal ini sangat penting dilengkapi di website sabilulungan untuk bentuk akuntabilitas penggunaan dana hibah dan bansos kepada masyarakat.

Masyarakat dapat melihat hasil penggunaan hibah dan bansos dengan melihat laporan tersebut. Selain itu, masyarakat dapat melakukan pengawasan apakah laporan tersebut sesuai dengan yang ada di lapangan. Sehingga apabila ada ketidak sesuaian antara laporan dengan yang sebenarnya, masyarakat dapat melaporkan hal tersebut. Ini menunjukkan sangat penting penambahan menu laporan ini di website sabilulungan.

ii. Rekap daftar penerima

Menu lain yang perlu ada di website sabilulungan adalah menu rekap total penerima hibah dan bansos setiap tahunnya. Hal ini sangat penting untuk ada di website sabilulungan sebagai informasi yang membantu masyarakat atau pihak terkait untuk melihat daftar penerima setiap tahunnya. Sebagai diketahui bahwa berdasarkan peraturan, tidak boleh ada penerima hibah dan bansos selama dua tahun berturut-turut. Oleh karena itulah, daftar penerima hibah dan bansos ini membantu masyarakat dalam melakukan pengawasan apakah ada penerima hibah dan bansos selama dua tahun berturut-turut. Apabila ditemukan hal tersebut, masyarakat bisa melakukan pengawasan terhadap hal tersebut. Apabila terjadi hal tersebut maka masyarakat dapat melaporkan hal tersebut. Ini menunjukkan menu ini sangat penting untuk ada di website sabilulungan.

iii. Rekap total nominal

Selain menu tersebut, ada menu lain yang juga perlu ada di website sabilulungan yaitu menu total nominal dana hibah dan bansos. Menu ini sangat penting untuk mengetahui rekap nominal dana hibah dan bansos setiap tahunnya. Hal ini untuk mengetahui jumlah anggaran hibah dan bansos yang disediakan pemerintah daerah dan jumlah penggunaan dana tersebut. Masyarakat dan pihak terkait dapat membandingkan antara dana hibah dan bansos yang disediakan dengan dana yang digunakan sehingga dapat diketahui tingkat penyerapan dananya. Menu ini sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan hibah dan bansos kepada masyarakat.

iv. Sebaran penerima

Menu lain yang perlu ada sebagai salah satu saran KPK terhadap Pemerintah Kota Bandung di dalam website sabilulungan adalah adanya menu sebaran penerima hibah dan bansos. Menu ini menunjukkan sebaran penerima hibah dan bansos di Kota Bandung. Hal ini berguna untuk mengetahui daerah mana saja yang sudah pernah menerima hibah dan bansos serta daerah mana yang belum menerima hibah dan bansos tersebut. Ini untuk membantu Pemerintah Kota Bandung dalam mengelola dana hibah dan bansos selanjutnya agar penerima hibah dan bansos dapat diterima oleh seluruh daerah di Kota Bandung. Diharapkan terdapat keadilan kepada seluruh daerah untuk menerima dan hibah dan bansos tersebut. Menu ini sangat diperlukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam melakukan pengelolaan dana hibah dan bansos terutama untuk menentukan penerima dana tersebut agar adil dan merata.

v. Standar Biaya Harga Daerah

Menu lain yang diperlukan oleh pengusul hibah dan bansos adalah menu standar biaya harga Kota Bandung. Pengusul saat ini dalam membuat rencana anggaran untuk kegiatan yang diusulkannya tidak berdasarkan standar biaya harga Kota Bandung, sehingga dalam verifikasi oleh Inspektorat banyak satuan harga yang tidak sesuai sehingga

vi. Pengumuman

Selain menu tersebut, juga perlu ada menu pengumuman di website sabilulungan. Hal ini sebagai wadah bagi pengelola hibah dan bansos untuk menyampaikan berbagai informasi kepada seluruh penerima dana hibah dan bansos serta kepada masyarakat. Pengumuman berupa informasi dan berita terkait pengelolaan dana hibah dan bansos. Khususnya informasi penggunaan dana hibah dan bansos oleh penerima yang disertai foto kegiatannya yang diunggah secara berkala sehingga dapat memberikan gambaran kemanfaatan dana hibah dan bansos tersebut kepada masyarakat. Selain itu, apabila ada informasi yang perlu disampaikan Pemkot Bandung kepada penerima hibah dan bansos dapat dicantumkan di menu tersebut. Oleh karena itu maka menu ini perlu ditambahkan pada website sabilulungan.

c. Penyempurnaan Pengelolaan Internal di BPKAD

BPKAD sebagai instansi utama pengelola hibah dan bansos perlu memperbaiki sistem internalnya agar pengelolaan dan hibah dan bansos dapat berjalan lebih baik, efisien dan efektif. Khususnya dalam pengelolaan website sabilulungan ini, perlu ada kerjasama yang lebih baik di internal BPKAD. Langkah yang perlu dilakukan adalah:

i. Membangun komitmen

Langkah pertama untuk memperbaiki pengelolaan hibah dan bansos di BPKAD adalah meningkatkan komitmen semua unsur pengelola hibah dan bansos. Hal ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan seluruh unsur di BPKAD baik unsur pimpinan dan staf agar dapat dibangun komitmen dalam mengelola hibah dan bansos agar lebih baik. Khususnya untuk mendukung pengelolaan website sabilulungan agar lebih baik.

ii. Menyempurnakan SOP

Selain membangun komitmen, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi dan memperbaiki SOP pengelolaan hibah dan bansos yang sudah ada. SOP disempurnakan agar pengelolaan lebih efektif dan efisien. Selain itu, pembagian tugas pada setiap tahapan pengelolaan hibah dan bansos akan lebih jelas.

iii. Membangun sistem

Untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengeolaan hibah dan bansos maka perlu dibuat sistem IT dalam pelaksanaan SOP

pengelolaan hibah dan bansos. Hal ini akan lebih mempercepat dan mempermudah pelaksanaan SOP pengelolaan hibah dan bansos.

Perbandingan Model Inovasi saat ini dengan Model Inovasi yang disempurnakan

Aspek	Model Inovasi saat ini	Model Inovasi yang disempurnakan
Sistem	Saat ini sistem website sabilulungan masih belum terintegrasi dengan sistem lain.	Sistem sabilulungan terintegrasi dengan sistem pada SKPD yang terkait, misalnya sistem kependudukan di Disdukcapil, sistem informasi status organisasi berbadan hukum di Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat, dll.
Menu	Saat ini menu yang disajikan pada website sabilulungan masih terbatas.	Website sabilulungan dengan menyajikan tambahan menu sehingga lebih lengkap, informatif dan akuntabel.
Ketatalaksanaan	SOP Pengelolaan Hibah dan Basos di internal BPKAD belum berjalan efektif dan efisien	Pengelolaan hibah dan bansos dengan membangun komitmen, penyempurnaan SOP dan membangun sistem internal BPKAD yang lebih baik, efektif dan efisien.

5. Daftar Pustaka

- Iqbal T.Lazuardi S.2015.Pejabat Bandung Tersangkut Korupsi Bansos Rp. 3M:Tempo.Co tanggal 3 Fubrauri 2015
- Udin S Sa'ud.2009.Inovasi Pendidikan. Alfabeta.Bandung
- Imanudin, Muhammad. 2016.Inovasi Pelayanan Publik
- Mutiarin, Dyah.2013. Transparansi Publik Wujudkan Good Governance. disampaikan dalam Seminar Memperingati Hak Untuk Tahu Sedunia diselenggarakan Dishubkominfo Propinsi DIY
www.sabilulungan.bandung.go.id
www.lapor.go.id
- Suryana.2010.Metodologi Penelitian:Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif:Buku Ajar Perkuliahan. Univerisitas Pendidikan Indonesia
- Dea Deviyanti.2013.Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balik Papan Tengah:ejournal.an.fisip-unmul.org

- Amin Rahmanurrasjid.2008.Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah:Tesis.Program Megister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang
- Ira Dwiana,Yunia Wardi,Susi Evanita.Pengaruh Tingkat Kepercayaan dan Kepuasan atas Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah Tabungan Pada Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang.<http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jrmbp/article/download/3189/2670>
- DPKAD.Inovasi Pelayanan Publik Online Pemerintah Kota Bandung.Bahan Presentasi
- Diskominfo Kota Bandung.2013.131223 Launching Hibah dan Bansos OnLine:Youtube. diupload tanggal 23 Desember 2013
- Galih,Persiana.2013.Ada Kejanggalan Dana Bansos Kota Bandung 2014:Tempo.co.diupload tanggal 30 Desember 2013
- Haryanto, Awal.2015. Penggunaan Media Online Sabilulungan.go.id untuk Transparansi dan Akuntabilitas Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Bandung (Inovasi Pelayanan Publik Online Pemerintah Kota Bandung):DPKAD Kota Bandung.www.dpkadbandung.info diupload tanggal 11 Februari 2015
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

<http://bandung.lan.go.id>